

**Asep Sulaeman,
Muhammad Fikri Arsyad, Dkk**



Tokoh, Sosial, Budaya dan Politik di Indonesia

**Editor :
Ai Halimah**

Tokoh, Sosial, Budaya dan Politik di Indonesia

Penyusun:

Asep Sulaeman

Editor

Ai Halimah

Penulis:

Muhammad Fikri Arsyad

Muhammad Fikri Hidayat

Muhammad Kautsar Thariq

Muhammad Yusuf Kurniawan

Nabilla Ilmidini

Nadila Aulia Nurfauzah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehat dan kuat. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Penulisan laporan penelitian tentang Tokoh dan Perkembangan Sosial Budaya Islam yang dalam membahas tokoh Islam yang berperan dalam berbagai bidang serta perkembangan sosial budaya banyak keterbatasan. Walaupun demikian penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada; Fakultas Adab dan Humaniora UIN Bandung dan keluarga besar Jurusan SPI, rekan-rekan mahasiswa yang membantu mengumpulkan dan menghimpun data, terutama para penulis saudara; Muhammad Fikri Arsyad, Muhammad Fikri Hidayat, Muhammad Kautsar Thariq, Muhammad Yusuf Kurniawan, Nabilla Ilmidini, Nadila Aulia Nurfauzah. Amin.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan

Bandung, 24 April 2020

Ketua Tim Penyusun

Dr. Asep Sulaeman, S.Ag., M.Pd
Ai Halimah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
BIOGRAFI DAN TOKOH	1
PERANAN POLITIK MOHAMAD ROEM PADA MASA ORDE LAMA.....	1
PERAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PRIBUMI TAHUN 1922-1932.....	36
PERAN S.K. TRIMURTI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK- HAK BURUH PEREMPUAN DI INDONESIA (1945-1954)	63
BAB II.....	87
SEJARAH SOSIAL, POLITIK, DAN BUDAYA	87
PERAN IKHAWANUL MUSLIMIN TERHADAP INDONESIA 1940-1950	87
PERKEMBANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI KOTA BOGOR TAHUN 2010-2017	117
SEJARAH KARAWANG SEBAGAI KOTA PADI 2009-2019	171

BAB I

BIOGRAFI DAN TOKOH

PERANAN POLITIK MOHAMAD ROEM PADA MASA ORDE LAMA

1.1 Latar Belakang

Mohamad Roem adalah seorang diplomat ulung yang berasal dari Indonesia. Sudah banyak perundingan yang telah dijalankan olehnya. Puncaknya adalah ketika Roem menjadi ketua pada perundingan Roem-Roijen yang membuat namanya semakin dikenal baik di Indonesia maupun Belanda.

Selain menjadi seorang diplomat Roem juga banyak memiliki peranan lain dalam pemerintahan, khususnya pada saat Orde Lama ini yang tercatat mulai dari 1945-1965.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Biografi Mohamad Roem?
2. Bagaimana Peranan Politik Mohamad Roem pada masa Orde Lama?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari Penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Biografi Mohammad Roem.
2. Untuk Mengetahui Peranan Politik Mohamad Roem pada Masa Orde Lama.

1.4 Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan saya ajukan dengan penelitian sejenis

yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.¹

Untuk kajian pustaka sendiri saya menggunakan buku “10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang” karya S.T Rais Alamsjah yang diterbitkan pada tahun 1952 dan “Suka Duka Berunding dengan Belanda” karya Mohamad Roem untuk dibagian Biografinya. Selain kedua buku itu saya juga mengutip beberapa mengenai Biografi Mohamad Roem dari skripsi-skripsi sebelumnya. Untuk peranannya sendiri saya banyak mengutip dari Buku “10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang” Karya S.T Rais Alamsjah, kemudian buku “30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964” yang disusun oleh Nugroho Notosusanto dan “Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950” karya Garda Maeswara.

Buku “10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang” sendiri membahas tokoh-tokoh nasional pada tahun 1952 yang menurut Survey kebanyakan orang adalah pemimpin-pemimpin terbesar Indonesia pada waktu itu.

Buku “Suka Duka Berunding dengan Belanda” sendiri berisi mengenai perundingan Indonesia dengan Belanda lewat perspektif Mohamad Roem. Buku ini memang tidak terlalu banyak membahas perundingan melainkan membahas asal mula perundingan itu terjadi.

Buku “30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964” sendiri adalah buku yang disusun oleh tim yang diketuai oleh Ir, Ginandjar Kartasmita dan diketuai oleh Drs. Nugroho Notosusanto pada tahun 1981 namun cetakan pertamanya telah terbit pada tahun 1977. Buku ini sendiri dibagi menjadi 2 Jilid

¹ Abdullah Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 182.

yang pertama yang membahas dari tahun 1945-1949 dan yang kedua adalah buku ini yang membahas dari tahun 1950-1964.

Buku "Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950" sendiri menceritakan apa saja hal-hal yang terjadi mengenai Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Buku ini sendiri saya banyak menggunakannya untuk membahas kabinet-kabinet yang mana Mohamad Roem ikut andil dalam kabinet tersebut. Meski buku ini cetakan tahun 2010 namun buku ini juga banyak mengutip buku-buku di tahun-tahun sebelumnya seperti buku "30 Tahun Indonesia Merdeka" dan "40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1".

1.5 Metode Penelitian

Meneliti masalah yang berkaitan dengan judul yang penulis Bahasa, Cara yang digunakan adalah metode yang umum dalam penelitian sejarah. Dalam buku "Mengerti Sejarah" karya Louis Gottschalk disitu Gottschalk menerangkan kalau Metode Penelitian Sejarah adalah proses pengujian serta analisis kesaksian sejarah untuk menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintetis atas data semacam itu agar menjadi sebuah kisah sejarah yang dapat dipercaya.² Secara berurutan, seorang sejarawan harus mengikuti tahapan-tahapan berupa heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.³

1. Heuristik

Heuristik atau Heuristis adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Menurut Notosusanto heristik atau heruristis berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein*, artinya sama dengan *to find* yang berarti bukan sekedar menemukan, tetapi mencari terlebih dahulu. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber

² Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 74.

³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 70.

yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian maupun temuan benda dan sumber lisan. Pada tahap pertama ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan topik sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. Mengumpulkan sumber yang diperlukan dalam penulisan merupakan pekerjaan pokok yang dapat dikatakan *gampang-gampang susah*, sehingga diperlukan kesabaran dari peneliti.⁴

Sebelum Peneliti melakukan pencarian sumber dengan terperinci, alangkah baiknya ia membaca bibliografi terdahulu mengenai topik penelitian. Dengan seperti itu maka peneliti dapat menjangkau sebanyak mungkin mengenai jejak-jejak sejarah yang ditemukan. Kemudian peneliti dapat memperhatikan setiap jejak itu dan bagian-bagian penelitian itu dengan selalu bertanya apakah itu merupakan sumber yang tepat dan apakah itu merupakan data sejarah atau bukan.⁵

Sumber sejarah dibagi menjadi dua: yang pertama, sumber primer dan yang kedua, sumber sekunder. *Sumber primer* adalah kesaksian dari seorang orang yang melihat peristiwa bersejarah dengan mata kepala sendiri atau panca indra lainnya atau bisa dibayangkan melihatnya secara langsung. Sementara *Sumber Sekunder* adalah kesaksian dari orang yang bukan merupakan saksi atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang diceritakan.⁶

Adapun *Sumber Primer* yang saya pergunakan adalah Buku "10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang", "Bunga Rampai dari Sedjarah", dan "Suka Duka Berunding dengan Belanda". Untuk *Sumber Sekunder* sendiri saya menggunakan buku "Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950" karya Garda Maeswara dan Skripsi-skripsi yang menyangkut Mohamad Roem.

⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 93.

⁵ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 105.

⁶ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 95–96.

2. Kritik

Setelah mengetahui secara persis topik dan sumber yang sudah dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber.⁷ Kritik atau verifikasi adalah kegiatan menganalisis data secara kritis baik ekstern maupun intern. Kritik ekstern dilihat dari segi luar sumber, seperti kalimat, serta dari unsur penampilan lainnya.⁸ Kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber:kesaksian (testimoni).⁹

Kritik sendiri dilakukan oleh sejarawan ketika sumber-sumber sejarah itu telah dikumpulkan. Tahapan kritik memiliki tujuan tertentu saat pelaksanaannya contohnya untuk menentukan otensitas (*authenticity*).¹⁰

Kritik yang saya gunakan yaitu Kritik Internal dan Eksternal yang mana saya melihat dari sumber sekunder itu apakah sudah sesuai dengan yang terjadi pada sumber primer. Seperti dari kebanyakan sumber yang menyatakan bahwa perundingan Roem-Roijen menghasilkan perjanjian Roem-Roijen namun sebenarnya itu adalah Pernyataan Roem-Roijen dikarenakan dalam Buku Mohamad Roem sendiri ia menyebutnya Statemants Roem-van Roijen, yang jika diartikan bahwa Statements itu berarti pernyataan bukan perundingan.

Untuk Kritik Eksternal sendiri saya tidak terlalu banyak mengkritik dikarenakan pada buku “10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang” dan “Suka Duka Berunding dengan Belanda” adalah buku yang saya anggap sumber primer dikarenakan buku itu terbit pada jamannya. Untuk Buku “Sejarah Revolusi Indonesia Sendiri” dianggap sumber Sekunder karena buku yang terbit sudah jauh dari tahun

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 77.

⁸ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), 103.

⁹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2007), 112.

¹⁰ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 101.

peristiwanya. Namun, buku ini mengambil dari beberapa sumber yang terdahulu seperti dari buku “30 Tahun Indonesia Merdeka” dan “40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1” yang insyaallah sudah tidak diragukan dikarenakan kedua buku itu dianggap sejaman bahkan buku yang disusun langsung oleh tim dari pemerintahan.

3. Interpretasi

Tahapan yang dilakukan setelah sumber-sumber terkumpul dan sudah dilakukan kritik sumber untuk kemudian di analisis adalah interpretasi.¹¹ Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun baik analisis maupun sintesis dipandang sebagai metode-metode utama didalam interpretasi.¹²

Teori Interpretasi yang saya pergunakan sendiri yaitu Teori Great Man atau Teori orang besar yang dikemukakan oleh dua sejarawan asal Inggris yaitu Thomas Carlyle dan James A. Froude. Keduanya berpendapat tokoh-tokoh besar lah yang menjadi faktor utama dalam dalam perkembangan sejarah. Yang dimaksud orang besar disini sendiri ialah seperti negarawan, kaisar, raja, panglima, para Nabi DLL.¹³

Alasan saya menggunakan Teori Great Man sendiri adalah dikarenakan Mohamad Roem adalah salah seorang Negarawan. Selain itu Roem juga salah satu tokoh politik yang terkemuka dan sekaligus Diplomat terkemuka yang kemampuannya sudah tidak perlu diragukan lagi.

Sudut pandang dalam kajian ini yaitu mengenai Peranan Politik Mohamad Roem pada masa Orde Lama, baik sebagai menteri dan seorang diplomat

4. Historiografi

¹¹ Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 114.

¹² Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, 114.

¹³ Sjamsudin, *Metodologi Sejarah.*, 131.

Historiografi adalah proses penyusunan dari berbagai sumber yang telah diseleksi ke dalam bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data tersebut, sejarawan harus mempertimbangkan struktur serta gaya bahasa dalam penulisannya. Sejarawan juga harus bisa menyadari dan berusaha agar orang lain bisa memahami pokok-pokok pemikiran yang diajukan olehnya.¹⁴

Ketika sejarawan melakukan penulisan, maka ia harus mengerahkan seluruh daya pikirnya, tidak hanya keterampilan teknis dalam penggunaan kutipan dan catatan, tetapi yang paling utama adalah menggunakan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya kerana pada akhirnya ia harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu kedalam suatu penulisan utuh yang disebut *Historiografi*. Keberartian (signifikasi) semua fakta yang terjaring kedalam metode kritik baru dapat dipahami hubungannya satu sama lain setelah semuanya tertulis dalam suatu keutuhan bulat historiografi. Dari sinilah istilah ini mempunyai arti “penulisan sejarah” karena ada pengertian lain untuk istilah historiografi yaitu “sejarah penulisan sejarah”¹⁵

Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah juga hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal yaitu fase perencanaan sampai pada akhirnya yaitu penarikan kesimpulan. Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan dapat dinilai apakah penelitian itu berlangsung dengan prosedur yang tepat atau tidak; apakah sumber atau data yang mendukung itu tepat atau tidak; dan sebagainya. Jadi dengan penulisan sejarah itu akan dapat ditentukan kualitas penelitian sejarah itu sendiri.¹⁶

¹⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 147.

¹⁵ Sjamsudin, *Metodologi Sejarah.*, 121–22.

¹⁶ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, 117.

Penulisan mini Skripsi ini yang berjudul “Peranan Politik Mohamad Roem pada Masa Orde Baru” disusun berdasarkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dimulai pada tahun 1946-1952. Alasan pemilihan tahun 1946 itu sendiri karena pada saat itulah Roem mulai aktif dalam perpolitikan pemerintah dengan menjabat sebagai Menteri dalam Negeri. Sementara untuk akhirnya sendiri itu disebabkan oleh tahun terakhir Roem menjabat sebagai menteri, dikarenakan setelah tahun 1952 Roem tidak pernah lagi masuk dalam jajaran menteri Kabinet pada masa Orde Lama.

2.1 Biografi Mohamad Roem

Mohamad Roem lahir pada pada tahun 1908 tepatnya pada tanggal 16 Mei di Parakan tepatnya di desa Klewongan, (Keresidenan Kedu). Roem adalah putra dari lurah desa Klewongan yang bernama Djojosasmito.¹⁷ Djojosasmito memiliki tujuh orang anak, diantaranya dua orang perempuan dan lima orang laki-laki.¹⁸ Roem Sekolah dasar di Temanggung. Ketika kelas 3 pindah ke HIS Pekalongan, karena pada saat itu parakan diserang oleh wabah Choler dan kemudian diserang lagi wabah Pest.¹⁹ Ketika Roem mengikuti gerakan JIB, beliau mendapat tempat yang baik. Namanya juga menjadi harum berkat keaktifannya. Seorang putri didalam kepanduan Natipy yang sama-sama menjadi pemimpin kepanduan dengan Roem, tertarik kepadanya. Akhirnya keduanya pun menikah, wanita itu bernama Dahlia. Keduanya dikaruniai satu putra yang bernama Rumoso dan satu putri yang bernama Rumesa.²⁰

1. Pendidikan

Roem baru masuk sekolah pada saat berusia 9 Tahun. Pada saat itulah kedua orang tuanya dan rakyat parakan baru terbangkit hatinya untuk mengirim anaknya ke sekolah akibat menjalarnya gerakan Sarekat Islam yang membuka mata rakyat menuju kemajuan. Ayahnya ingin Roem kelak menjadi orang yang berilmu. Didalam sekolah ini pun Roem mendapat kemajuan karena kecerdasannya. Kemudian setelah tamat dari HIS, Roem masuk ke sekolah Stovia di Jakarta. Setelah tamat, Roem pindah ke AMS. Roem bercita-

¹⁷ Mohamad Roem, *Suka Duka Berunding Dengan Belanda* (Jakarta: Idayu Press, 1977), 68.

¹⁸ Sudarmin Bakir, "Kiprah Politik Muhammad Roem Dalam Konstelasi Perpolitikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (1945 – 1957)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 10.

¹⁹ Roem, *Suka Duka Berunding Dengan Belanda*, 68.

²⁰ S.T. Rais Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang* (Jakarta: Mutiara, 1952), 51–52.

cita masuk Sekolah Tabib Tinggi, karena itulah Roem harus menempuh AMS dulu.

Roem ingin menjadi dokter. Setelah melalui AMS ini, ia terus memasuki sekolah Tabib Tinggi di Jakarta pada tahun 1930. Tapi Roem tidak lama bersekolah disana. Hanya 2 tahun saja, Roem merasa tidak sesuai bakatnya untuk menjadi Dokter. Roem pun pindah ke sekolah Hakim Tinggi dan Tamat dengan gelar Meester in de rechten ditahun 1939. Roem pun menjadi ahli Hukum.²¹

2. Masa Muda

Ketika Roem masih menjadi mahasiswa, ia memasuki PSII. Kemudian ketika terjadinya peristiwa gerakan penjadar oleh H. Agus Salim dalam PSII, Roem memihak Salim. Karena gerakannya ini dianggap suatu pelanggaran dalam partai, maka Salim dan yang lainnya pun dikeluarkan oleh Abikusno.

Dengan demikian, Salim lalu menyatakan penjadar sebagai suatu partai politik yang terlepas dari PSII. Orang-orang kuat yang bergabung dalam partai baru ini adalah Salim, Sangadji, dan Roem. Ketiga orang ini merupakan trio utama dalam gerakan penjadar. Kejadian ini terjadi pada tahun 1936. Penjadar diketuai oleh H. Agus Salim, sedangkan Roem dipilih menjadi Ketua Badan Pekerja. Disini mulailah Roem dalam gelanggang politik dan mempunyai nama yang terkemuka.

Roem adalah seorang yang ulet dan hati-hati. Kerjanya berjalan dengan baik dan memuaskan. Hubungannya dengan Salim pun sangat rapat didalam partai, apalagi dirumah tangga. Sehingga banyak orang yang keliru dan menganggap bahwa Roem adalah anak atau menantu Salim. Memang dari pemimpin inilah Roem banyak sekali

²¹ Alamsjah, 50.

menerima pemikiran-pemikiran baru dalam politik dan agama. Pekerjaannya sebagai ketua badan pekerja ini dipegangnya sampai tahun 1939.²²

3. Sebagai Diplomat

Setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifudin, Roem kini menjadi ketua delegasi yang sebelumnya Roem saat bersama Syahrir hanya menjadi anggota saja. Roem lah yang mengatur cara-cara, siasat dan taktik untuk menghadapi belanda. Hatinya sendiri merintih memikirkan tanggung jawab yang diberikan padanya oleh pemerintah dan rakyat. Rakyat menuntut kemerdekaan penuh. Cita-cita inilah yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Sekarang Roem harus berusaha dengan segenap kecakapannya dan kepandaianya untuk mencapai tujuan bangsa itu. Apa yang dicapai dulu ketika perundingan Linggarjati yang dimaksudkan sebagai batu loncatan, kini telah turun lagi dengan apa yang dinamakan Renville. Kota-kota dan daerah-daerah penting telah diduji oleh Belanda akibat perundingan Renville itu sendiri. Negara juga telah mengakui dan menandatangani persetujuan Renville itu sendiri. Mau tak mau politik Republik harus didasarkan pada hasil Renville yang telah disetujui itu. Padahal rakyat menuntut kemerdekaan yang penuh. Modal Republik pun sudah tinggal sedikit lagi. Meskipun begitu pedirian dan keyakinan belum berubah, baik dari Pemerintah maupun rakyat masih ada optimisme yang besar. Biarpun Republik hanya tinggal setapak, namun yang setapak itu tetap akan dijadikan modal untuk mencapai kemerdekaan seluruhnya.

Roem memulai diplomasinya dimeja perundingan dengan Belanda dengan tugas yang berat, yaitu supaya ketika melaksanakan Renville itu, Republik yang sudah merosot dapat terpelihara agar tidak semakin merosot lagi.

²² Alamsjah, 52.

Roem tidak kehilangan akal. Ia optimis dari celah-celah yang masih dapat dilaluinya, Roem akan mencoba berbagai jalan.

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap Republik. Inilah agresi Belanda yang ke-2, semua daerah Republik Diserang. Dengan adanya agresi ke 2 ini maka terputuslah perundingan di meja diplomasi untuk sementara waktu. Tetapi berkat usaha dari Delegasi Republik yang diketuai oleh Roem, dimata dunia Internasional, Republik Indonesia berada ditempat yang kuat dilihat dari sudut moril dan politik. Mulai saat itulah politik Amerika yang tadinya masih ragu-ragu sekarang mulai membantu Republik. Terbukti pada sikapnya dalam sidang-sidang Dewan Keamanan yang diadakan berhubungan dengan aksi ke-2 ini.²³

4. Karya-Karya Mohamad Roem

Selain menjadi seorang diplomat, Mohamad Roem juga adalah seorang negarawan, diplomat, pejuang, pemikir, dan penulis masalah-masalah sosial politik dan masalah diplomasi, hukum dan agama. Karya-karya dan hasil tulisannya adalah sebagai berikut²⁴:

- 1) *Haji Agus Salim dalam 100 Tahun Haji Agus Salim*, Sinar Harapan, 1984.
- 2) *Bung Kecil yang Bernuat Besar, dalam Mengenang Sutan Syahrir*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
- 3) *Muhammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia*, dalam Bung Hatta, Mengabdikan pada Cita-cita Perjuangan Bangsa, Jakarta, 1972.
- 4) *Indonesia dan PBB*, dalam Panji Masyarakat, nomor 3, tahun 1966.
- 5) *Pelajaran dari Sejarah*, Documenta, Surabaya, tahun 1970.

²³ Alamsjah, 56–58.

²⁴ Bakir, “Kiprah Politik Muhammad Roem Dalam Konstelasi Perpolitikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (1945 – 1957),” 18–21.

- 6) *2.500 ex-Masyumi/ PSI Kehilangan Hak Disiplin*, Documenta, Embong Belimbing 3, Surabaya, 1970.
- 7) *Tinjauan Pemilihan I dan II dari Sudut Hukum*, Budaya, Documenta, Jakarta, 1971.
- 8) *Sumpah Pemuda, Puncak Perkembangan Awal Pertumbuhan*, Yayasan Fajar Sodiq, Jakarta, 1975.
- 9) *Jejak Langkah Agus Salim*, Jakarta: Tintamas, 1969.
- 10) *Bunga Rampai dari Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, Jilid ke- 1.
- 11) *Suka Duka Berunding Belanda*, Jakarta: Idayu Press, 1977.
- 12) *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, Penyunting Kustiniati Muchtar, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- 13) *Apa yang Terjadi dalam Republik Indonesia Jika Tidak ada Hamungkubuwono IX*, dalam tahta untuk Raja, Sinarharapan, 1983.
- 14) *Tentang Hukum Mati*, Bulan Bintang, Jakarta, atau lihat dalam Muhamad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan Bangsa*, Gramedia, 1989.
- 15) *Hak Manusia dalam UU 1945*, dalam makalah penyambutan Hari Natal 1978.
- 16) *Monogami Poligami dan Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- 17) *Bunga Rampai Dari Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 4 Jilid, 1972.
- 18) *Monogami, Poligami atau Pergundikan*. Keperhatian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dimuat dalam Suara Muhammadiyah pada tahun 1976.
- 19) *Karena Benar dan Adil*, Hudaya, Jakarta, 1969. *Pelajaran dari Sejarah*, Documenta, Surabaya, 1970.
- 20) *Renungan Tentang Pancasila dan UUD 1945*, Panji Masyarakat, no. 348, tahun 1967.
- 21) *Rakyat Pilihan*, Panji Masyarakat, no. 50 dan 51, 1969.
- 22) *Partai Muslimin Indonesia Setelah Muktamar*, Panji Masyarakat, no. 48 dan 49, tahun 1969.

2.1 Peranan Politik Mohamad Roem Pada Masa Orde Lama

1. Menteri Dalam Negeri (Kabinet Syahrir III)

Setelah lama beristirahat dari seluruh kegiatan politik, dikarenakan ditembak oleh tentara Belanda pada bagian kakinya. Roem akhirnya diajak oleh Mr. Kasman Singodimejo ke Yogyakarta. Ketika berada disana Roem diminta untuk duduk sebagai pengurus dan akhirnya Roem pun duduk sebagai Ketua bagian di Partai Masyumi. Kemudian, Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden membujuk agar Roem untuk ikut serta masuk kedalam kabinet Sultan Syahrir yang ketiga yang dibentuk oleh Sultan Syahrir sendiri. Pada awalnya Mohamad Roem berfikir ada tujuan apa ia diminta untuk turut serta dalam kabinet Syahrir ini, tapi Bung Hatta sudah percaya dengan kompetensi seorang Muhamad Roem.

Roem pun berkonsultasi kepada Dr. Sukiman, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Masyumi mengenai tawaran Hatta tersebut. Dr. Sukiman tidak setuju jika Mohamad Roem mewakili Masyumi dalam Kabinet RI, tetapi tidak keberatan ikut jika Roem sebagai perseorangan. Akhirnya Mohamad Roem pun menjadi Menteri Dalam Negeri sebagai perseorangan. Sebaliknya, Syahrir duduk, mewakili partainya. Padahal Baru tiga bulan Mohamad Roem turut aktif dalam pengurus Pusat Masyumi di Yogyakarta, sudah harus melepaskan jabatannya karena telah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Syahrir III.²⁵

Melanjutkan Kabinet yang kedua, Syahrir membuat program kerja untuk kabinetnya yang ketiga,²⁶:

²⁵ Bakir, 46.

²⁶ Garda Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 112.

- 1) Menyempunakan susunan Pemerintah Daerah yang berdasarkan kepada kedaulatan Rakyat.
- 2) Memperoleh Koordinasi segala tenaga rakyat dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia.
- 3) Serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan peri-kemanusiaan.
- 4) Memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan melakukan pembagian pangan.
- 5) Mempercepat perihal keberesan uang Republik Indonesia.

Pada kabinet inilah Roem dipilih menjadi menjadi Menteri Dalam Negeri, dan sebagai Menteri Mudanya adalah Wijono. Disini, mulailah Roem memperlihatkan kapasitasnya dalam politik Negara sebagai staatman. Saat itu adalah saat yang sangat kritik.²⁷

2. Perundingan Linggarjati

Sebelum perundingan Linggajati, terlebih dahulu telah diadakan perundingan-perundinga seperti perundingan Hoge Veluwe yang terjadi pada tanggal 14, 22, dan 24 April 1946 yang menuntut pengakuan de facto di Jawa, Madura, dan Sumatra. Tetapi perundingan ini mengalami kebuntuan, hingga akhirnya dilanjutkan keperundingan Linggajati pada tanggal 15 November 1946.²⁸ Persetujuan Linggarjati adalah persetujuan yang pertama bagi RI dan Belanda, diparaf pada tanggal 15 November tahun 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Kemerdekaan yang akan dicapai dari persetujuan *Linggajati* sendiri bukanlah negara kesatuan, melainkan negara federasi. Kemudian Negara Indonesia Serikat itu sendiri akan ikut

²⁷ Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 54.

²⁸ Septi Daru Kurniawati, "MOHAMAD ROEM: SEORANG PEJUANG INDONESIA (1946-1949)" (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007), 34.

bergabung kedalam Uni Nederland-Indonesia, dengan ratu belanda sebagai Kepala Uni.

Meskipun Persetujuan Linggarjati itu sudah diparap dan ditandatangani, pada akhirnya juga tidak dapat terlaksana, dikarenakan kedua pihak masih jauh berbeda. Keadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk melancarkan *agresi militer* pada tanggal 21 Juli 1947. Sebelum peristiwa itu terjadi di Indonesia telah terjadi pergantian Pemerintahan RI. Kabinet Syahrir digantikan oleh kabinet Amir Sjarifudin, alasan digantikan ini adalah karena Syahrir sudah terlalu mengalah kepada Belanda.

Persetujuan Linggarjati itu memang dari awal itu sudah banyak menimbulkan pertentangan. Presiden Soekarno dan wakil Preseiden Hatta sejak awal diikutsertakan oleh Syahrir karena ia sudah sadar bahwa persoalannya memang sulit dan sensitip.²⁹ Berikut adalah delegasi dari tiap negara.

Anggota-anggota Delegasi Belanda adalah³⁰:

- 1) Willem Schermerhorn, ketua
- 2) F De Boer, sebagai anggota
- 3) Van Mook, sebagai anggota
- 4) Max van Poll, sebagai anggota

Sementara Anggota delegasi Indonesia adalah:

- 1) Sutan Sjahrir, ketua
- 2) Mohamad Roem, anggota
- 3) J.Leimena, anggota
- 4) Amir Syariffudin, anggota
- 5) A. K. Gani, anggota
- 6) Susanto Tirtoprodjo, anggota

Selama penundaan ratifikasi Linggarjati yang lama, suasana optimis yang dapat memudahkan perubahan drastis dalam hubungan Belanda-Indonesia dibiarkan

²⁹ Roem, *Suka Duka Berunding Dengan Belanda*, 16–17.

³⁰ Kurniawati, “MOHAMAD ROEM: SEORANG PEJUANG INDONESIA (1946-1949),” 35.

menguap. Kaum kapitalis Belanda mulai menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali ke usaha-usaha praperang mereka kecuali dibawah perlindungan senjata Belanda.³¹

Hasil perundingan ini adalah sebagai berikut³²:

- 1) Belanda mengakui Indonesia secara *de facto* dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
- 2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI peling lambat pada tanggal 1 Januari 1949
- 3) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membuat Negara Indonesia Serikat, yang akan dinamakan Republik Indonesia Serikat dan salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
- 4) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membuat Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Pada peristiwa ini, Roem, Natsir, Sjafruddin dan lainnya sebagai kabinet mendapatkan banyak kritikan. Mereka sebagai bagian pemerintahan ini dianggap setuju dengan Perjanjian Linggarjati, sedangkan partainya tidak menyetujui.³³ Tetapi Mohamad Roem menganggap persetujuan ini adalah pengakuan Republik Indonesia secara *de facto* oleh pihak Belanda.³⁴

3. Perundingan Renville

Atas pengawasan KTN, dilangsungkanlah perundingan resmi Indonesia-Belanda di kapal Renville yang pada saat itu sedang berlabuh di teluk Jakarta. Indonesia diketuai oleh

³¹ Anthony J.S. Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 190.

³² Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*, 118.

³³ Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 55.

³⁴ Bakir, "Kiprah Politik Muhammad Roem Dalam Konstelasi Perpolitikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (1945 – 1957)," 49.

Perdana Menteri Amir Sjarifoedin dan Belanda diketuai oleh R. Abdulkadir Widjoatmodjo.³⁵ Berikut adalah delegasi dari tiap negara.

Anggota Delegasi Belanda adalah³⁶:

- 1) Raden Abdoelkadir Widjoatmodjo, Direktur Jenderal Urusan Umum, Sebagai ketua.
- 2) Jhr. Mr. H.L.F.K. van Vredenburg, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, anggota/ketua Pengganti.
- 3) Ch. Somoukil, anggota.
- 4) Tengku Dzulkarnain, anggota.
- 5) P.J. Koets, anggota.
- 6) Adji Pangeran Kartanegara, anggota.
- 7) Masjarif Gelar Lelo Bendahara, anggota.
- 8) H. Ophuyzen, anggota.
- 9) Thio Thian Tjong, anggota.
- 10) J. Tahiya, anggota.
- 11) D.C. Buurman van Vreeden, anggota.
- 12) N.L. 's Jacob, anggota.
- 13) D. Bolderhey, anggota.

Sekretaris-sekretaris:

- 1) Jhr. A. Th. Baud, Penasihat Gubernur Jenderal
- 2) J. Stuyt sekretaris kedutaan besar kelas satu

Anggota-anggota Delegasi Republik adalah:

- 1) Amir Sjarifoeddin, Ketua
- 2) Ali Sastroamidjojo, wakil ketua
- 3) Tjoa Sik Ien, anggota
- 4) Sutan Sjahrir, anggota
- 5) Hadji Agoes Salim, anggota

³⁵ Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*, 158.

³⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 57–59.

- 6) Nasrun, anggota
- 7) Djoeanda, anggota pengganti
- 8) Setyadjid, anggota pengganti

Pada tahun 1947 tepatnya pada tanggal 8 Desember dimulailah Perundingan Renville dan pada tahun 1948 tepatnya pada tanggal 17 Januari dengan ditandatangani persetujuan Renville.³⁷ Pokok-pokok hasil Perundingan Renville, antara lain³⁸:

- 1) Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak menembak di sepanjang “Garis Van Mook”.
- 2) Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer;
- 3) Perundingan-perundingan dilanjutkan sampai akhirnya tercapai persetujuan yang disebut perjanjian Renville.

Saat pelaksanaannya, perundingan ini ternyata tetap memiliki hambatan seperti perundingan-perundingan sebelumnya karena pada umumnya perundingan ini ditolak oleh sebagian rakyat Indonesia karena dengan adanya persetujuan ini semakin memperlemah kedudukan RI dan semakin memperkecil wilayah RI. Beberapa partai termasuk Masyumi juga ikut menolak persetujuan ini dengan menarik menteri-menterinya yang duduk dalam kabinet. Selain partai Masyumi, ternyata penolakan juga datang dari partai PNI. Akibat penolakan dan tuntutan pembubaran Kabinet Amir Sjarifuddin yang dilakukan dua partai besar dalam kabinetnya, yaitu PNI dan Masyumi, maka tidak ada jalan lain bagi Amir selain menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden pada tanggal 23 Januari 1948.

³⁷ Kurniawati, “MOHAMAD ROEM: SEORANG PEJUANG INDONESIA (1946-1949),” 46.

³⁸ Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*, 158–59.

Setelah dibubarkannya Kabinet Amir pada tanggal 23 Januari 1948 kemudian tanggal 29 Januari 1948 terbentuk kabinet yang baru sebagai pengganti. Kabinet yang baru ini dipimpin oleh Mohammad Hatta dan kabinetnya disebut dengan Kabinet Hatta I. Kabinet ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar karena harus menanggung konsekuensi persetujuan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Selanjutnya atas prakarsa KTN, perundingan antara RI dan Belanda dimulai kembali pada pertengahan Maret 1948. Kabinet ini menunjuk Mohamad Roem sebagai ketua delegasi, sedang wakilnya adalah Mr. Ali Satroamidjojo dan Mr. Latuharhary dan beberapa anggota yang lain seperti Dr. Tjoa Siek Ien, Mr. Nasrun, Prof. Dr. Supomo, serta Prof. Mr. Sunario Kolopaking.

Sebagai ketua delegasi RI, Mohamad Roem dalam memimpin harus bekerja keras mengatur taktik dan siasat dalam menghadapi Belanda. Mohamad Roem harus memikul tanggung jawab yang sangat berat yang telah diberikan oleh pemerintah RI. Ia harus berusaha dengan segala kemampuan, kecakapan dan kepandaiannya untuk mencapai kemerdekaan penuh seperti yang telah diperjuangkan bangsa Indonesia sejak dulu. Mengingat perundingan Renville sangat merugikan pihak Indonesia dibandingkan dengan persetujuan Linggajati maka mau tak mau Indonesia terpaksa menerima. Di sini Mohamad Roem dituntut untuk mempertahankan wilayah RI yang terlanjur berkurang agar tidak semakin sempit. Inilah peranan konkret Mohamad Roem dalam perundingan Renville. Di samping ia menjabat sebagai ketua delegasi RI atas usulan dari Mohammad Hatta, ia juga menjabat sebagai menteri dalam negeri.³⁹

³⁹ Kurniawati, "MOHAMAD ROEM: SEORANG PEJUANG INDONESIA (1946-1949)," 47-48.

4. Pernyataan Roem-Royen

Meskipun pemerintahan semuanya telah diasingkan namun perjuangan masih terus berjalan. Pimpinan pemerintahan yang sekarang dipengang oleh Mr. Sjafruddin Prawinegara di Sumatera yang mendirikan Pemerintahan Darurat. Perlawanan secara gerilya pun diteruskan, dan makin lama makin kuat dan menakutkan Belanda. Akhirnya Belanda mengajukan usul berunding kembali. Sudah dipasikan oleh Belanda menyelesaikan persoalan ini melalui senjata tidak mungkin berhasil dan hanya dapat dengan mengadakan perundingan kembali.⁴⁰

Atas inisiatif dari UNCI, diselenggarakanlah perundingan antara RI dan Belanda yang dipimpin oleh Mark Cochran asal Amerika Serikat di Hotel Des-Indies, Jakarta pada tanggal 4 April 1949. Berikut adalah delegasi dari tiap negara.

Anggota Delegasi Belanda adalah⁴¹:

- 1) Dr. J.H. Van Royen, ketua
- 2) Mr. N.S. Blom, anggota
- 3) Mr. A.S. Jacob, anggota
- 4) Dr. J. Van Dervelde, anggota
- 5) Empat orang pensihat.

Anggota Delegasi RI adalah:

- 1) Mr. Mohamad Roem, ketua
- 2) Mr. Ali Sastroamidjojo, wakil ketua
- 3) Dr. Leimena, anggota
- 4) Ir. Djuanda, anggota
- 5) Prof. Soepomo, anggota
- 6) Mr. Latuharhary, anggota
- 7) Lima orang Penasihat.

⁴⁰ Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 60.

⁴¹ Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*, 199–200.

Pada perundingan yang terjadi pada tanggal 7 Mei di Hotel Des Indes, Jakarta tercapailah persetujuan antara Republik Indonesia dengan Belanda. persetujuan ini terkenal dengan nama statement Roem-van Royen.⁴² Isi perundingan tersebut adalah⁴³:

- 1) Pihak RI dan Belanda bekerjasama mengembalikan perdamaian, menjaga keamanan dan ketertiban,
- 2) Membebaskan tanpa syarat para pemimpin RI dan tahanan politik lainnya, yang ditangkap sejak 19 Desember 1948,
- 3) Ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Persetujuan Roem-Royen ini, mendapat tantangan yang hebat dari pihak yang menghendaki terhapusnya Republik. Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia Dr. Beel meletakkan jabatannya karena tak setuju dengan persetujuan ini. Jenderal Spoor tidak setuju dengan politik. Tetapi pada tanggal 25 Mei 1949 ia meninggal dengan tiba-tiba meninggal dunia. Dialah pelaksana agresi I dan ke II, dengan meninggalnya Jenderal ini, berarti ditutupnya sejarah mengenai politik kekerasan Belanda di Indonesia. Untuk menyambut penyelenggaraan penyerahan kedaulatan ini, dibentuklah suatu badan yang diberi nama "Panitia Persiapan Nasional" yang dibentuk atas kerjasama antara Republik dan B.F.O. yang ketuanya adalah Mr. Mohamad Roem.⁴⁴

Setelah Satatement Roem-Royen ini menjadi kenyataan pada tanggal 7 Mei 1949, maka tinggal menunggu waktu saja untuk pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Untuk

⁴² Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 61.

⁴³ Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*, 200.

⁴⁴ Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 62.

keperluan ini Sri Sultan Hamengkubuwono, mendapat perintah penuh dari Perdana Menteri Hatta untuk menjalankan sesuatu agar penarikan mundur pasukan Belanda dan masuknya pasukan Republik tidak menimbulkan guncangan.⁴⁵

Kembalinya Republik di Yogya tidak dapat dihindari lagi, dan ikut sertanya Republik di Konferensi Meja Bundar tidak lagi sebagai pemimpin Indonesia yang terkemuka. Maka sekalipun Republik dalam bentuk Undang-undang Dasar 1945 akan hilang, tetapi pada saat itulah lahir kesatuan yang lebih tinggi yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu akan tercapai pada saat KMB, berkat kemampuan anggota RI dan BFO yang menarik garis yang sama.⁴⁶

Pada tanggal 6 Juli 1949 mendaratlah di Maguwo, pesawat terbang dari Komisi PBB yang membawa Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin yang lainnya dari Bangka. Soekarno-Hatta yang telah ditawan oleh pasukan Jenderal Spoor telah beristirahat ditengah-tengah prajuritnya di Mentengpulo, Jakarta. Rupanya kekuatan senjata bukanlah faktor satu-satunya dan juga bukan faktor yang utama diantara faktor-faktor lainnya yang menggerakkan sejarah.⁴⁷

Setelah para pemimpin Republik Indonesia berkumpul di Ibukota Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 tepatnya pada pukul 20.30, diadakan Sidang Kabinet yang pertama, dalam kesempatan itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil

⁴⁵ Mohamad Roem, *Bunga Rampai Dari Sedjarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972),

⁴⁶ Roem, *Suka Duka Berunding Dengan Belanda*, 25.

⁴⁷ Roem, *Bunga Rampai Dari Sedjarah*, 108.

Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta. Selain itu dalam Sidang Kabinet tersebut diputuskan pula pengangkatan Sri Sultan Hamengkubowono ke-IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan Negara.

Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Ibukota Yogyakarta, yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir bulan Juni 1949. Namun demikian Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI), Jenderal Soedirman dan para pimpinan tentara lainnya enggan mengakui kekuasaan sipil yang mereka anggap telah meninggalkan Republik, tetapi pada akhirnya pihak militer mau mengakuinya ketika Soekarno mengancam bahwa dirinya akan mengundurkan diri jika mereka tidak melakukannya.⁴⁸

5. Konferensi Meja Bundar

Usaha Belanda untuk menguasai Indonesia dengan jalan kekerasan Gagal. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Beberapa pertemuan antara Indonesia dan Belanda dilakukan guna menyelesaikan masalah lewat diplomasi. Diantaranya adalah Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar yang dihelat pada tanggal 23 Agustus 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut⁴⁹:

- 1) Penyerahan Kedaualatan Republik Indonesia dari pemerintahan Belanda, Kecuali Irian Barat.
- 2) Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun.
- 3) Dibentuknya persekutuan Belanda-Indonesia, Republik Indonesia Serikat.

⁴⁸ Agus Budiman, "Sejarah Diplomasin Roem-Roijen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949," *Wahana Pendidikan* 4, no. 1 (2017): 106.

⁴⁹ Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*, 213–14.

- 4) Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
- 5) Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan tidak dapat dicabut. Karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
- 6) Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

Akhirnya Konferensi Meja Bundar selesai pada tanggal 2 November 1949 dan penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Persiapannya kurang dari dua bulan. Alasan persiapan kurang dari dua bulan adalah karena dalam Persetujuan Linggarjati pernah ditentukan, bahwa Negara Indonesia Serikat akan lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Kalau harinya sudah sangat terlambat maka tahunnya jangan sampai terlambat.

Penyerahan kedaulatan itu berlangsung dalam dua upacara yang diadakan di Belanda dan di Indonesia pada saat yang sama. Namun di Jakarta memiliki kelebihan yaitu turunnya bendera merah putih biru dan naiknya Sang Merah Putih. Pada hari itu ditetapkan bahwa Hari Nasional kita tetap tanggal 17 Agustus, sedangkan tanggal 27 Desember itu tidak pernah dirayakan.⁵⁰

Perundingan Bilateral mengenai penyerahan Irian Barat kepada Indonesia memang dilakukan tetapi tidak ada hasilnya karena Belanda selalu menghindar atau mempersulit. Sepanjang tahun 1950-an, Belanda tetap bersikeras bercokol di Irian Barat. Bagi Belanda, wilayah ini

⁵⁰ Roem, *Suka Duka Berunding Dengan Belanda*, 26–27.

dianggap sebagai simbol sisa kebanggaannya sebagai bekas kekuasaan kolonial yang besar. Bahkan sejak 1954, Belanda menutup pintu rapat-rapat, menolak untuk merundingkan masalah tinggalan KMB itu dengan Indonesia.⁵¹

6. Menteri Negara

Setelah terciptanya penyerahan kedaulatan, dimana Indonesia merupakan negara federal, maka dalam pembentukan kabinetnya yang pertama jang terbentuk pada tanggal 20 Desember 1949, Hatta memegang pimpinan sebagai Perdana Menteri. Roem mendapat tempat sebagai menteri Negara.

Tetapi jabatannya ini tak lama dipegangnya, karena serentak dengan pendirian RIS, maka dinegeri Belanda harus diadakan Komisiaris Tinggi sebagai wakil Indonesia disana.⁵²

7. Komisiaris Agung di Belanda

Roem harus bekerja dinegeri Belanda, berpangkat Duta Besar. Pada awalnya disebut-sebut nama Sulthan Abdul Hamid akan menduduki tempat itu.

Kemudian ada juga nama Sjahrir. Tetapi tentu saja Sjahrir tak akan mau, karena beliau adalah orang yang anti KMB. Yang paling cocok untuk menempati tempat itu, ialah Roem. Pihak Indonesia sendiri tidak khawatir melepas Roem kesana. Pendiriannya sudah diketahui benar-benar. Ia tak akan mudah dipengaruhi atau berkhianat disana. Sehingga pengangkatannya disetujui oleh segala pihak, baik pihak Belanda maupun Pihak Indonesia.

Untuk menghadapi belanda dinegerinya sendiri tidaklah mudah, kalau tidak tepat orang yang dipilih. Di Belanda, Roem harus mengoper kantor Commissariaat Voor Indische

⁵¹ Devi Nurhikmi, Ajid Thohir, and Samsudin, "Peran Abdul Haris Nasution Dalam Pembebasan Irian Barat (1957-1962)," *Historia Madania* 4, no. 1 (2020): 178.

⁵² Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 63.

Zaken, dimana pegawainya kebanyakan orang Belanda dan orang Indonesia yang berjiwa kolonial. Di Indonesia keluar suara yang mengejek Roem. Ia dikatakan menjadi alat kolonial dinegeri Belanda, karena pegawainya banyak orang Belanda. Orang-orang menyebutkan bahwa kantor Roem di Den Haag, adalah benteng kolonialisme.

Roem pun terkejut mendengar ocehan ini. Roem yang tak pernah marah dalam hidupnya pun, sekali ini terpaksa marah dan keluar pernyataannya mengenai duduk perkara sebenarnya.

Selama dinegeri Belanda dalam jabatan itu, perhubungannya makin luas. Roem disegani oleh pembesar-pembesar Belanda. Kakinya yang pincang itupun menjadi kebanggaannya dalam perjuangan. Disamping bergaul dengan ahli-ahli politik dan diplomatik, Roem juga banyak membuat hubungan baik dengan para seniman dan sastrawan.⁵³

8. Menteri Luar Negeri (Kabinet Moh. Natsir)

Roem akhirnya dipanggil pulang, karena di Indonesia terjadi perubahan besar dalam politik. Negara federal yang berbentuk RIS berubah menjadi Negara Kesatuan berbentuk Republik Indonesia. Roem pun pulang ketanah air dan kedudukannya di Negeri Belanda sebagai Komisiaris Tinggi digantikan oleh wakilnya Mr. Djumhana.⁵⁴

Pada tanggal 7 September 1950, dilantiklah kabinet pertama setelah kembali ke negara kesatuan. Mohammad Natsir pun didapuk sebagai perdana menterinya.

Kabinet Natsir pun memiliki program kerja sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante.

⁵³ Alamsjah, 62–63.

⁵⁴ Alamsjah, 63.

- 2) Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat.
- 3) Menggiat usaha mencapai keamanan dan ketentraman.
- 4) Mengembangkan dan memperkuat kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat serta melakukan keragaman antara buruh dan majikan.
- 5) Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
- 6) Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
- 7) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun 1950.

Kabinet Ini menyerahkan mandatnya pada tanggal 21 Maret 1950, setelah DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara) menerima mosi Hadikusumo mengenai pencabutan PP No. 39 Tahun 1950.⁵⁵ Selama jabatannya ini, Roem 2 kali mengetuai delegasi Indonesia keluar negeri, pertama pada bulan Nopember ketika sidang PBB di Lake Success setelah Indonesia berhasil diterima menjadi anggota PBB dan yang kedua ketika Roem pergi ke Belanda untuk mengetuai delegasi Indonesia dalam Konfransi Irian.⁵⁶

9. Delegasi RI di Sidang Umum PBB Tahun 1950

Pada tanggal 27 September 1950, Majelis Umum PBB menerima Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 dengan suara bulat. Setelah resmi menjadi anggota PBB, Indonesia mengirimkan delegasinya untuk mengikuti

⁵⁵ Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*, 257–58.

⁵⁶ Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 63–64.

Sidang Umum PBB. Susunan Delegasi RI dalam Sidang Umum PBB, terdiri dari: Mr. Mohamad Roem (Ketua), L.N. Palar (Wakil Ketua), Dr. Darmasetiawan, Mr. Soedjono, Mr. Tambunan, Mr. Soemanang, Prawoto (Anggota).⁵⁷ Dalam sidang pleno PBB ini, Roem sebagai Menteri Luar Negeri mengepalari delegasi itu dan mempertlihatkan kemuka dunia Internasional negara Republik Indonesia yang diperjuangkan rakyatnya selama ini.⁵⁸

10. Menteri Dalam Negeri (Kabinet Wilopo SH)

Setelah Kabinet Soekiman jatuh, maka dibentuklah kabinet baru dibawah Perdana Menteri Wilopo. Program kerja dari kabinet Wilopo tidak banyak berbeda dengan kabinet sebelumnya, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Organisasi Negara :
 - a. Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan Daerah;
 - b. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah; dan
 - c. Menyederhanakan organisasi Pemerintahan Pusat.

- 2) Kemakmuran :
 - a. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat; dan
 - b. Melanjutkan usaha perubahan agraria.

- 3) Keamanan :

Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah kewananan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, dan mengembangkan

⁵⁷ Maeswara, *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*, 261.

⁵⁸ Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 63.

tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

4) Perburuhan :

Memperlengkap undang-undang buruh untuk meningkatkan derajat kaum buruh.

5) Pendidikan dan Pengajaran :

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.

6) Luar Negeri :

a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional dalam hubungan dengan perdamaian dunia;

b. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar *Unie-statuu*t menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa dan menghilangkan hasil-hasil Konfrensi Meja Bundar yang dianggap merugikan rakyat dan negara; dan

c. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya.

Diantara kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kabinet Wilopo adalah timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan mengganggu stabilitas politik di Indonesia selama beberapa tahun berikutnya.

Pada tanggal 3 Juni 1952, Kabinet Wilopo jatuh diakibatkan keretakan dalam kabinet itu sendiri.⁵⁹

⁵⁹ Nughroho Notosusanto, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964* (Jakarta: Cicero Indonesia, 1981), 65-66.

Dalam kabinet Wilopo yang diresmikan pada tanggal 1 April 1952, Roem menempati Menteri Dalam Negeri. Roem ingin pemilihan Umum di Indonesia dapat diselenggarakan. Dalam kabinet yang lalu, belum dapat diselenggarakan pemilihan umum untuk konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah kabinet Wilopo ini jatuh dan digantikan oleh kabinet Ali-Wongso, Roem tidak mendapat jabatan lagi.⁶⁰

⁶⁰ Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, 65.

3.1 Kesimpulan

Roem adalah putra dari lurah desa Klewogan yang bernama Djojomasmito. Djojomasmito memiliki tujuh orang anak, diantaranya dua orang perempuan dan lima orang laki-laki. Roem Sekolah dasar di Temanggung. Ketika kelas 3 pindah ke HIS Pekalongan, karena pada saat itu parakan diserang oleh wabah Choler dan kemudian diserang lagi wabah Pest. Kemudian setelah tamat dari HIS, Roem masuk ke sekolah Stovia di Jakarta. Setelah tamat, Roem pindah ke AMS. Roem bercita-cita masuk Sekolah Tabib Tinggi, karena itulah Roem harus menempuh AMS dulu. Setelah melalui AMS ini, ia terus memasuki sekolah Tabib Tinggi di Jakarta pada tahun 1930. Tapi Roem tidak lama bersekolah disana. Hanya 2 tahun saja, Roem merasa tidak sesuai bakatnya untuk menjadi Dokter. Roem pun pindah ke sekolah Hakim Tinggi dan Tamat dengan gelar Meester in de rechten ditahun 1939. Setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifudin, Roem kini menjadi ketua delegasi yang sebelumnya Roem saat bersama Syahrir hanya menjadi anggota saja Roem memulai diplomasinya dimeja perundingan dengan Belanda dengan tugas yang berat, yaitu supaya ketika melaksanakan Renville itu, Republik yang sudah merosot dapat terpelihara agar tidak semakin merosot lagi. Roem tidak kehilangan akal. Ia optimis dari celah-celah yang masih dapat dilaluinya, Roem akan mencoba berbagai jalan. Selain sebagai diplomat, Roem juga adalah seorang negarawan, pemikir, dan penulis.

Roem berperan penting pada perpolitikan di Indonesia khususnya pada saat Orde Lama. Perananan pertama Roem setelah istirahat dari segala aktivitas politik dikarenakan tertembak oleh tentara Belanda adalah ketika beliau ditunjuk oleh Hatta menjadi Menteri dalam Negeri pada kabinet Sjahrir III yang berlangsung dari tahun 1946-1947. Ketika menjadi menteri dalam Negeri ini Roem juga ikut menjadi anggota

delegasi pada Perundingan Linggarjati dan ikut menandatangani perihal gencatan senjata dengan Belanda. Kemudian pada tahun 1948, Roem ditunjuk menjadi ketua delegasi Indonesia untuk meneruskan perundingan Renville menggantikan Mr. Amir Sjarifoeddin. Pada tahun 1949, tepatnya tanggal 7 Mei Roem menandatangani Statements Roem-Royen di Hotel Des Indes, Jakarta. Kemudian untuk melanjutkan perundingan ini maka terciptalah Konferensi Meja Bundar. Pada konferensi Meja Bundar ini Roem menjadi wakil dan ketuanya adalah Hatta. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat maka Roem pun terpilih sebagai Menteri Negara namun jabatan itu tidak berlangsung lama dikarenakan adanya RIS maka di negeri Belanda sana harus diadakan Komisaris Tinggi sebagai wakil Indonesia. Menjadi Komisaris Tinggi juga tidak berlangsung lama dikarenakan Roem dipanggil pulang karena di Indonesia terjadi perubahan besar dalam politik. Setelah kembali ke Indonesia, Roem menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Natsir. Ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ini, Roem 2 kali mengetuai delegasi Indonesia keluar negeri, pertama pada bulan Nopember ketika sidang PBB di Lake Success setelah Indonesia berhasil diterima menjadi anggota PBB dan yang kedua ketika Roem pergi ke Belanda untuk mengetuai delegasi Indonesia dalam Konferensi Irian. Jabatan yang terakhir pada saat Orde Lama adalah ketika Roem menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Wilopo S.H. Setelah menjadi Menteri Dalam Negeri ini Roem tidak pernah menjabat sebagai pemerintahan kembali dikarenakan partainya yaitu Partai Masyumi menjadi partai oposisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos, 1999.
- — —. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Agung, Ide Anak Agung Gde. *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Alamsjah, S.T. Rais. *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*. Jakarta: Mutiara, 1952.
- Bakir, Sudarmin. "Kiprah Politik Muhammad Roem Dalam Konstelasi Perpolitikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan (1945 – 1957)." UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Budiman, Agus. "Sejarah Diplomasin Roem-Roijen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949." *Wahana Pendidikan* 4, no. 1 (2017).
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Kurniawati, Septi Daru. "MOHAMAD ROEM: SEORANG PEJUANG INDONESIA (1946-1949)." Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007.
- Maeswara, Garda. *Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Nata, Abdullah. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Notosusanto, Nugroho. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. Jakarta: Cicero Indonesia, 1981.
- Nurhikmi, Devi, Ajid Thohir, and Samsudin. "Peran Abdul Haris Nasution Dalam Pembebasan IrianBarat (1957-1962." *Historia Madania* 4, no. 1 (2020).
- Reid, Anthony J.S. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 1996.

Roem, Mohamad. *Bunga Rampai Dari Sedjarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

— — —. *Suka Duka Berunding Dengan Belanda*. Jakarta: Idayu Press, 1977.

Sjamsudin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

PERAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM MEMPERJUANGKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PRIBUMI TAHUN 1922-1932

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum bangsa Barat datang ke Hindia Belanda, masyarakat pada saat itu sudah mengenal pendidikan baik dari keluarga ataupun dari lingkungan pendidikan dalam keluarga, peran orang tua sangatlah berpengaruh sehingga sang anak nantinya dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Selain itu kedatangan Islam juga memberi pengaruh pada pendidikan di Hindia Belanda yaitu pendidikan yang dilakukan di mushola dan pondok pesantren⁶¹.

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia memberikan bentuk pendidikan masyarakat yang feodal karena pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial berdasarkan garis warna dan diskriminatif, prinsip ini dibedakan pada jenis dan tingkatan yang telah dibagi oleh pemerintah kolonial menjadi kelompok yaitu, kelompok Eropa, Timur, Asing (Arab dan Cina), dan pribumi. Dalam praktiknya sendiri penduduk pribumi masih terbagi menjadi golongan masyarakat dan status sosial. Dan perbedaan tersebut di pertegas dengan adanya penggunaan bahasa pengantar yaitu bahasa Belanda contohnya adalah Eerste Klasse School atau Sekolah Kelas Satu dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya⁶².

⁶¹ Sri Soetjianingsih S. Kutoyo, *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid V)* (Jakarta: PT. Grafitas, 1981).

⁶² Danusputra Djumhur, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1974), 146.

Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara melihat bahwa dengan pendidikan mampu mengubah watak dan sikap bangsa untuk menjadikan bangsa yang mempunyai derajat tinggi dan sejajar dengan bangsa lain. Dan untuk mewujudkan hal itu pendidikan yang harus dijalankan haruslah pendidikan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan berjiwa Timur. Ia menolak pendidikan yang hanya mengajarkan masyarakat pribumi menjadi masyarakat mekanis yang lupa dengan tujuan hidup. Karena itulah ia mengenalkan konsep pendidikan dan pengajaran yang mampu membuat masyarakat pribumi menjadi manusia seutuhnya⁶³. Maka oleh karena itulah Ki Hajar Dewantara mendirikan Tamansiswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Pendidikan Tamansiswa bersifat kultural nasional. Perguruan ini didirikan dengan tujuh asas pokok yaitu kemerdekaan, metode among, berperadaban bangsa sendiri, pemerataan pendidikan, mandiri, sederhana, dan maha karya serta dengan suci hati dan tidak mengharap sesuatu hak berkehendak berhamba kepada sang anak⁶⁴.

Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara memiliki peranan penting dalam memajukan pendidikan pribumi, sekolah yang ia dirikan bertujuan untuk memajukan pendidikan pribumi dan selain itu juga untuk membangun rasa nasionalisme pada masyarakat pribumi.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Riwayat Hidup Ki Hajar Dewantara?
2. Bagaimana Peran Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan masyarakat pribumi tahun 1922-1932?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui riwayat hidup Ki Hajar Dewantara.

⁶³ Suparto Raharjo, *Ki Hajar Dewantara Biografi Singkat 1889-1959* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 68.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 55-56.

2. Untuk mengetahui Peran Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan tahun 1922-1932.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah telah terhadap literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Kajian pustaka dapat berupa buku-buku, jurnal, skripsi maupun sumber-sumber lain yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang saya ambil ialah:

Pertama, pada buku yang di tulis oleh Suparto Raharjo, yang berjudul *Ki Hajar Dewantara Biografi Singkat 1889-1959* di dalam buku ini menjelaskan tentang Riwayat Ki Hajar Dewantara, Aktivitas Pergerakan, Taman Wisma, Pemikiran Pendidikan, dan Mengenal Kepribadian Ki Hajar Dewantara.

Kedua, pada skripsi yang ditulis oleh Iva Olami Hasdani, mahasiswi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang berjudul *Sejarah Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Tentang Perempuan Tahun 1922-1959* di dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai perempuan dan pengaruh pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai perempuan.

Ketiga, pada Jurnal Ilmu Pendidikan, Agustus 1994, Jilid 1, Nomor 2, h 125-135, yang di tulis oleh Dwi Purwoko, yang berjudul *Semangat Taman Siwa Dan Perlawanannya terhadap Undang-Undang Sekolah Liar* di dalam jurnal ini membahas tentang berdirinya Taman Siwa, Obsesi Suwardi, Reaksi Pemerintah, dan Reaksi Kaum Pergerakan.

Keempat, pada skripsi yang di tulis oleh Gerfasius Tasen, yang berjudul *Pengasingan Ki Hajar Dewantara (1913-1917)* di dalam skripsi ini membahas tentang Kehidupan Ki Hajar Dewantara di Tanah Pengasingan, dan Dampak Pengasingan Ki Hajar Dewantara.

Dari beberapa karya atau tulisan ilmiah diatas, terdapat keterkaitan mengenai Perjuangan Ki Hajar Dewantara Dalam

Memajukan Pendidikan Masyarakat Pribumi, namun dengan pembahasan yang berbeda dan focus yang berbeda.

1.5 Langkah-langkah Penelitian

a. Heuristik

Tahapan pertama yang penulis lakukan dalam penelitian yaitu tahapan heuristik. Langkah ini adalah cara kerja penulis dalam memperoleh, menemukan dan mengumpulkan sumber berikut dengan memberikan klasifikasi terhadap sumber yang penulis dapat dilapangan⁶⁵.

Setelah menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dengan Peran Ki Hajar Dewantara Dalam Memperjuangkan Pendidikan Tahun 1922-1936 penulis memperoleh beberapa sumber. Sumber-sumber yang di dapatkan terdiri dari sumber primer dan sekunder.

Sumber Primer

- 1) Ki Hajar Dewantara, *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- 2) Ki Hajar Dewantara, *Menuju Manusia Merdeka Ki Hajar Dewantara*, Yogyakarta: Leutika, 2009.

Sumber Sekunder.

- 1) Darsiti Soeratman. Ki Hajar Dewantara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.
- 2) Muchammad Tauchid. Perjuangan Dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 2011.
- 3) Suparto Raharjo. Ki Hajar Dewantara Biografi Singkat 1889-1959. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- 4) Tim Museum Kebangkitan Nasional. Ki Hajar Dewantara: Pemikiran Dan Perjuangannya. Jakarta:

⁶⁵ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), 96.

Museum Kebangkitan Nasional dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

b. Kritik

Setelah sumber terkumpul, hal selanjutnya yang penulis lakukan yaitu, memverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intren maupun ekstren. Kritik Intren dilakukan untuk menilai kelayakan sumber atau kredibilitas sumber. Kritik Ekstren dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autensitas sumber⁶⁶.

1) Kritik Intren

Untuk menilai kelayakan sumber atau kredibilitas sumber, jika dilihat isi atau konten yang terdapat pada Buku Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan dan Menuju Manusia Merdeka Ki Hajar Dewantara, sumber itu mampu menyampaikan kebenaran tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan Peran Kemerdekaan Ki Hajar Dewantara Dalam Bidang Pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber tertulis berupa buku ini layak digunakan dan dapat menyampaikan fakta-fakta perihal Peran Ki Hajar Dewantara Dalam Memperjuangkan Pendidikan Masyarakat Pribumi Tahun 1922-1932.

2) Kritik Ekstren

Untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autensitas sumber, dalam pengaplikasiannya, penulis menggunakan sumber tertulis yang penulis dapatkan yaitu Buku Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan dan Menuju Manusia Merdeka Ki Hajar Dewantara, Jika dilihat dari tahunnya Buku Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan ditulis

⁶⁶ Johan Wahyudi M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), 223–224.

pada tahun 1977, dan Menuju Manusia Merdeka Ki Hajar Dewantara ditulis pada tahun 2009, yang mana penulis asli dari buku ini (bukan turunan) adalah Ki Hajar Dewantara, bahasa yang digunakan pada buku ini menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) sebelum diganti dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia); material yang digunakan merupakan material yang sesuai dan dibutuhkan dalam penulisan, dan sumber tersebut masih utuh (tidak ada lembaran yang hilang ataupun rusak). Secara fisik, sumber tertulis (Buku Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan dan Menuju Manusia Merdeka Ki Hajar Dewantara) tersebut layak untuk digunakan sebagai sumber yang otentik dan kredibel dalam penelitian ini.

c. Interpretasi

Setelah penulis memperoleh sumber-sumber yang penulis dapatkan melalui proses heuristik dan lolos dari proses pengujian/validasi (kritik sumber). Selanjutnya yaitu tahapan interpretasi (menafsirkan). Interpretasi atau penafsiran sejarah dilakukan penulis dalam rangka menganalisis dan mensintesis sumber-sumber yang telah menjadi fakta-fakta sejarah yang akan direkonstruksi⁶⁷.

Jika dianalisis dengan pendekatan sejarah, maka teori yang sesuai untuk menganalisis Peran Ki Hajar Dewantara Dalam Memperjuangkan Pendidikan Tahun 1922-1932 yaitu teori menurut Thomas Carlyle dan James A. Froude berpendapat bahwa faktor penyebab utama dalam perkembangan sejarah adalah tokoh-tokoh orang besar (Great Men Theory) mereka berpendapat bahwa sejarah

⁶⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 102–103.

merupakan “biografi kolektif”⁶⁸. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosial, pendekatan sosial mempelajari tentang masyarakat, dan hubungan anatar manusia didalamnya⁶⁹.

d. Historiografi

Tahap terakhir dari metode sejarah yaitu historiografi atau penulisan, setelah melalui fase heuristic, kritik, interpretasi⁷⁰. Secara umum, dalam metode sejarah, penulisan sejarah merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan⁷¹.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan langkah-langkah penelitian.

BAB II merupakan bab pembahasan yang berisi tentang riwayat hidup Ki Hajar Dewantara dan Peran Ki Hajar Dewantara Dalam Memperjuangkan Pendidikan Masyarakat Pribumi Tahun 1922-1932.

BAB III merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

⁶⁸ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 125.

⁶⁹ Anton Dwi Lakosno, *Apa Itu Sejarah: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode Dan Penelitian* (Pontianak: Derwati Press, 2018), hlm 56.

⁷⁰ M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, hlm 230.

⁷¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 67.

2.1 Riwayat Hidup Ki Hajar Dewantara

Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton tepatnya Pura Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat, sedangkan Ibunya adalah R.A Sandiyah yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, keturunan dari Sunan Kalijaga. Suwardi merupakan cucu dari Sri Paku Alam III.

Pendidikan awalnya ia dapatkan di Pesantren Kalasan di bawah asuhan K. H. Abdurrahman, disini ia mendapatkan pendidikan agamanya, sejak awal melihat Suwardi pengasuh pesantren tersebut sudah melihat adanya keistimewaan didalam dirinya. Kemudian, pendidikan dasarnya ditempuh di ELS (Europeesche Lagere School). Sekolah ini adalah sekolah dasar pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sekolah ini menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah dasar ini awalnya hanya terbuka untuk warga Belanda di Hindia. Namun pada tahun 1930, orang-orang pribumi yang mampu dan warga Tioghoa diberikan kesempatan untuk belajar disekolah ini.

Setelah lulus dari ELS, Suwardi meneruskan studinya di Kweekschool (Sekolah Guru Belanda). Ia hanya bersekolah selama satu tahun kemudian pindah ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumi Putera). Karena kecerdasannya dalam penguasaan bahasa Belanda yang sangat baik, ia menerima beasiswa di STOVIA. Ia belajar disana hanya lima tahun, dikarenakan ia sakit selama empat bulan sehingga iya terpaksa keluar karena ia tidak naik kelas dan beasiswanya dicabut⁷².

Ada hal lain yang menjadi alasan dari pencabutan beasiswanya itu, yaitu karena Suwardi telah mendeklamasikan sebuah sajak pada suatu pertemuan. Dalam

⁷² Suparto Raharjo, *Ki Hajar Dewantara Biografi Singkat 1889-1959*, hlm 9-11.

sajak itu ia menggambarkan tentang kepahlawanan Ali Basah Sentot Prawirodirjo, yang merupakan seorang panglima perang andalan Diponegoro. Yang kemudian sajak itu diubah kedalam bahasa Belanda oleh Multatuli. Setelahnya, pada pagi harinya Suwardi di panggil oleh Direktur Stovia dan ia dimarahi habis-habisan. Ia kemudian di tuduh, karena isi sajak yang ia buat itu telah membangkitkan semangat untuk memberontak terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Setelah ia keluar dari Stovia, ia lalu bekerja sebagai seorang wartawan di beberapa surat kabar, yaitu di Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timur, dan Poesara. Ia juga menerbitkan Goentoer Bergerak dan Hindia Bergerak. Selain menjadi wartawan, ia juga berkiprah di organisasi-organisasi sosial politik. Pada Tahun 1908, ia aktif dalam seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan membangun kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Lalu pada 25 desember 1912 ia bersama dengan Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangun Kusumo, mendirikan Indische Partij, yang kemudian tiga tokoh tersebut dikenal dengan julukan "Tiga Serangkai". Indische Partij adalah partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia dan bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Kemudian pada November tahun 1913 Suwardi ikut dalam pembentukan Komite Bumiputera. Komite ini merupakan komite tandingan dari Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Bumiputera ini memberikan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang ingin merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Perancis, namun untuk merayakan pesta tersebut Pemerintah Belanda mengambil uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut.

Mengenai hal itu, Suwardi pun memberikan kritik kepada Pemerintahan Belanda lewat tulisannya *Als Ik Eens Nederlander Was* (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan *Een voor Allen maar Ook Allen voor Een* (Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga). Tulisan *Seandainya Aku Seorang Belanda* dimuat dalam surat kabar *de Expres* milik Douwes Deker⁷³.

Dalam tulisannya tersebut Suwardi menyatakan bahwa jika dia seorang Belanda dia tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan ditanah yang kemerdekaanya saja telah dirampas, ia juga menyatakan bahwa tidak adil menyuruh Inlander (pribumi) yang memberikan sumbangan untuk perayaan tersebut. selain itu penyelenggaraan pesta itu saja sudah menghina mereka lalu mereka dimintai pula sumbangan untuk perayaan itu, dan juga kenyataan bahwa Inlander (pribumi) diharuskan untuk membiayai perayaan tersebut yang bahkan mereka sendiri tidak ada kepentingannya atau kaitanya dengan acara itu.

Namun para pejabat Pemerintah kolonial Belanda meragukan bahwa tulisan tersebut dibuat oleh Suwardi. Karena mereka menilai bahwa gaya bahasa tulisan tersebut berbeda dari tulisan-tulisan Suwardi sebelumnya. Kalaupun benar yang menulis adalah Suwardi pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa Douwes Dekker lah yang berperan dalam mendorong Suwardi untuk menulis dengan gaya bahasa seperti itu.

Pemerintah Belanda pun berusaha membujuk Suwardi, sampai-sampai mereka meminta bantuan pada Sri Paku Alam III dan Kanjeng Pangeran Haryo Surya Ningrat yang kedua tokoh tersebut merupakan kakek dan ayah Suwardi, untuk membujuk Suwardi agar tidak bersikap Radikal, namun kakeknya sendiri berkata kepada Suwardi “ Ingatlah, seorang bangsawan tidak akan menelan ludahnya sendiri”. Kakek dan

⁷³ Ibid., hlm 12-13.

ayahnya sendiri justru mendukung sikap dan tindakan progresif yang dilakukan oleh Suwardi.

Kemudian akibat tulisannya tersebut Suwardi dijatuhi hukuman tanpa proses pengadilan oleh pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenbrug. Hukumannya yaitu hukuman *internering* (hukum buang) hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal. Kemudian Suwardi pun dihukum dan di buan ke Pulau Bangka. Karena perlakuan pemerintahan Belanda tersebut tidaklah adil kepada Suwardi, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela Suwardi dengan menerbitkan tulisan yang membela Suwardi. namun pihak Belanda menganggap tulisan itu menghasut rakyat unruk memusuhi dan memberontak pada pemerintah kolonial. Hingga akhirnya mereka berdua mendapatkan hukuman yang sama. Douwes Dekker di buang ke Kupang dan Cipto Mangunkusumo di buang ke Pulau Banda.

Mereka bertiga menginginkan dibuang ke Belanda dan menjalankan hukumannya di Belanda, tujuannya agar mereka bisa mempelajari banyak hal di daerah terpencil. Kemudian mereka dizinkan ke Belanda pada bulan Agustus tahun 1913. Sebelum berangkat ke Belanda, Suwardi Suryaningrat sudah menikah dengan R. A Sutartinah Sastraningrat pada 1907, Sutartinah lahir pada tanggal 14 September 1890. Ia merupakan cucu dari Sri Paku Alam II dan masih sepupu dari Suwardi. Sutarnih lebih dikenal dengan Nyi Hajar Dewantara yang nantinya ikut dalam mengembangkan pendidikan yang dibangun oleh Suwardi, yaitu Tamansiswa. Dan pada masa pengasingannya ke Belanda Sutarnih turut ikut menemani Suwardi dalam menjalani masa pengasingannya di Belanda⁷⁴.

Pada masa pengasingannya di Belanda Suwardi dan Istrinya hidup dalam kekurangan Meskipun demikian ia dan

⁷⁴ Ibid., hlm 13-15.

istrinya tidak menyerah dengan keadaan, dalam masa pengasingannya itu ia memperdalam ilmu pendidikan dengan mengikuti kursus-kursus tertulis dan kursus-kursus malam, sehingga hasil dari giatnya ia memperdalam ilmu pendidikan ia berhasil meraih Akte Guru Eropa dalam pendidikan Paedagogie pada 12 Juni 1915, Sedangkan istrinya Raden Ayu Sutartinah ia mengajar di *Frobel School* yaitu taman kanak-kanak di Weimaar, Den Haag.

Meskipun dalam masa pengasingan Suwardi Siryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker tetap melanjutkan perjuangannya di Belanda. Mereka diberikan kesempatan untuk menulis dan menyalurkan pikiran-pikiran tentang cita-cita dan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia, lewat surat-surat kabar Belanda yang sangat bersahabat dengan mereka, surat-surat kabar Belanda tempat mereka menyalurkan tulisannya yaitu "Het Volk" dan "De Nieuwe grone Amstredamer". Berkat pengaruh dari mereka, maka penghimpunan mahasiswa Indonesia di negri Belanda yang tergabung dalam "Indische Vereeniging" semakin menonjolkan semangat kebangsaan dan semangat kemerdekaan, sehingga membuat mereka berani mengubah nama perhimpunan itu menjadi "Perhimpunan Indonesia".

Karena Suwardi berkecimpung dalam pers pergerakan kesadaran politiknya menjadi berkembang. Selain itu dunia jurnalistik yang ia tekuni juga telah membawanya pada pergaulan yang lebih luas dan progresif. Dari berkecimpungnya ia ke dalam dunia jurnalistik, hal itu telah memberikannya kesempatan mengutarakan berbagai pemikiran dan persoalan yang dihadapi bangsanya. Tulisan-tulisannya diberbagai surat kabar, majalah, dan brosur menjadi penerang bagi bangsanya yang sedang dirundung kegelapan.

Kemudian masa pengasingan Tiga Serangkai di Belanda perlahan-lahan mulai berakhir dan mereka dibebaskan dan diizinkan pulang ke Indonesia, Cipto Mangunkusumo yang

terlebih dahulu pulang ke Indonesia karena ia jatuh sakit, karena hal itu ia diizinkan pulang ke Indonesia pada tahun 1914, dan kemudian Douwes Dekker pada tahun 1918, dan Suwardi Suryaningrat pada tahun 1919. Suwardi sebenarnya sudah dibebaskan pada 17 Agustus 1917 oleh pemerintah Belanda. tetapi ia belum bisa kembali karena di eropa sedang berkecamuk Perang Dunia I, selain itu juga karena dana untuk pulang ke tanah air belum cukup. Mr. Van Deventer mengumpulkan dana untuk kepulangan ia dengan keluarganya namun dengan sopan ia menolaknya⁷⁵.

Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Padepokan Ki Hajar Dewantara dan di semayamkan di pendopo Agung Tamansiswa Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dimakamkan pada tanggal 26 April 1959 secara militer dengan Inspektur Upacara kolonel Soehrato di makam Taman Wijaya Brata, Celeban, Yogyakarta.

Ki Hajar Dewantara meninggalkan seorang istri Raden Ayu Sutartinah Sastraningrat dan 6 orang anak: Ni Niken Wandasari Sutapi Asti, Ki Subroto Aryo Mataram (Brgjen. TNI), Nyi Ratih Tarbiyah, Ki Sudiro Ali Murtolo (lahir 9 Agustus 1925), Ki Bambang Sokawati (lahir 9 Maret 1930) dan Ki Syailendra Wijaya (lahir 28 September 1932)⁷⁶.

2.3 Peran Ki Hajar Dewantara Dalam Memperjuangkan Pendidikan Masyarakat pribumi Tahun 1922-1932

Setelah masa pengasingan Suwardi berakhir pada 17 Agustus 1918⁷⁷, ia tetap memegang erat visi dan tujuannya, yaitu menggapai kemerdekaan Indonesia melalui pembangunan dan pengembangan pendidikan untuk putera-

⁷⁵ Tim Museum Kebangkitan Nasional, *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran Dan Perjuangannya* (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm 154-156.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 163.

⁷⁷ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm 60.

putrera bangsa⁷⁸. Dalam surat kabar “Nieuwe Amsterdammer” dan “Het Volk” tanggal 15 September 1917 no. 142, ia menulis kata perpisahannya “Kembali ke Medan Perjuangan”, hal itu menjadi pernyataan bahwa kembalinya ia dari pengasingan tidak akan membuatnya berhenti berjuang, ia akan kembali ke medan perjuangan meneruskan cita-citanya bagi kemerdekaan bangsa dan tanah air⁷⁹.

Pengalaman Ki Hajar Dewantara dengan teman-temannya di lapangan perjuangan politik, yang melalui banyak rintangan, penjara dan pembuangan, menghasilkan pemikiran baru untuk meninjau cara-cara dan jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Kekecewaan dan kekalahan yang dialami dalam perjuangan politik, kebohongan “Janji November” (November belofte) Belanda, telah menimbulkan fikiran baru untuk meneruskan perjuangan menuju kemerdekaan bangsa dan tanah air. Perjuangan bangsa harus didasari jiwa merdeka dan jiwa nasional dari bangsa itu. Maka dari itu perlu penanaman jiwa merdeka yang harus dimulai dari sejak anak-anak. Hanya jiwa-jiwa orang yang merdeka yang sanggup berjuang menuntut dan mempertahankan kemerdekaannya. Pendidikan nasional dan pendidikan merdeka pada anak-anak, yang dapat memberi bekal kuat untuk perjuangan kemerdekaan nasional. Jalanya ialah pendidikan rakyat, disamping pergerakan politik.

Pada masa beralihnya VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) menjadi pemerintahan Hindia Belanda, tidak ada sama sekali perubahan sikap dan tindakan terhadap segala urusan yang berada di Indonesia. Pada hakikatnya pemerintahan Hindia Belanda merupakan konsolidasi, yaitu penetapan dari segala hal yang telah dilakukan oleh VOC. Sesudah adanya pembangunan nasional pada permulaan abad

⁷⁸ Tim Museum Kebangkitan Nasional, *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran Dan Perjuangannya*, hlm183.

⁷⁹ Muchammad Tauchid, *Perjuangan Dan Ajaran Hidup* (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 2011), hlm 16.

ke 20 bersamaan dengann mulai tumbuhnya aliran kolonial modern, yang disebut *ethisce koers* atau *ethische politiek* (politik etis) di Nederland, barulah adanya perubahan sikap pada pemerintahan kolonial. Namun, perubahan tersebut hanya terjadi dalam beberapa hal yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran untuk rakyat.

Pada zaman VOC, Belanda menganggap Indonesia sebagai objek perdagangan. Mereka mencari dan mendapat keuntungan materil yang besar dan itu merupakan tujuan dari segala usaha yang mereka lakukan. Pendidikan dan pengajaran diserahkan kepada para pendeta Kristen. Dan ada intruksi yang menegaskan bahwa rakyat hanya seperlunya saja diberi pelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung, khususnya untuk orang-orang yang bekerja membantu beberapa usaha VOC. Dan pendidikan yang dilakukan itu hanya untuk menambah keuntungan perusahaan-perusahaan VOC.

Pada masa kekuasaan Napoleon Bonoparte jatuh dan pemerintahan Nederland dibentuk kembali pada 1816, Maka pemerintahan Hindia Belanda melakukan beberapa perubahan pada Indonesia. Pada tahun 1818 misalnya, dibuat peraturan pemerintah yang penting semacam Undang-Undang Dasar (yang disebut *Regeeringsreglement*, singkatan dari *Reglement op het beleid van Nederland Indie*). Dalam Undang-Undang Dasar 1818 tersebut, pemeliharaan pengajaran mulai diperhatikan, namun hal itu tidak pernah dilakukan. Pada 1836 Undang-Undang Dasar itu diubah, dan pengajaran sama sekali tidak disebut kembali. Setelah adanya Undang-Undang Dasar tahun 1854, pasal-pasal mengenai pendidikan dan pengajaran mulai dimunculkan kembali. Seperti yang tercantum dalam pasal 125 yaang berbunyi: *Het openbaar onderwijs vormt een voormerp van aanhoudende zorg vvn den gouverneur general* (Pengajaran negeri adalah yang senantiasa menjadi perhatian gubernur jendral). Hal itu sungguh baik dan mengembirakan,

tetapi pada pasal-pasal berikutnya, isinya membikutkan jiwa kolonial pemerintah Hindia Belanda. Yaitu pada pasal 126: Het onderwijs aan Europeanen is vrij (pemberian pengajaran pada anak-anak bangsa Eropa diperbolehkan secara bebas). Dan pada pasal 127: Voldoend openbaar lager onderwijs moet worden gegeven overal, waar de behoefte der Europese bevolking dit vordent en de omstandigheden het toelaten (sebisa mungkin harus ada pemberian pengajaran rendah dari pemerintah yang mencukupi keperluan penduduk bangsa Eropa).

Dalam pasal-pasal tersebut sangatlah jelas bahwa, pemerintah Hindia Belanda mengingatkan agar jangan samapi anak-anak bangsa Eropa tidak mendapatkan pengajaran. Kemudian pada pasal 128: de goudenur general zorgt voor de oprichting van scholen tendienste van de inlandse bevolking (gubernur jendral disertai mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat). Namun yang terjadi pemerintah Hindia Belanda tidak sama sekali mendirikan sekolah tersebut⁸⁰

Setelah pemerintah kolonial melaksanakan politik etis, jumlah sekolah yang didirikan bertambah banyak. Meskipun demikian dibandingkan jumlah anak usia sekolah masih sangat jauh dari cukup. Sekolah-sekolah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan kolonial, baik kepentingan dalam bidang politik, ekonomi maupun administrasi. Dan itu sama sekali tidak ditunjukkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sebelum di buka sekolah dasar yang dikenal H. I. S, sudah disediakan sekolah bumiputra tetapi rendah sekali pengajarannya. Hanya sebagian kecil rakyat yang bisa bersekolah, yaitu priyayi, yang diperbolehkan menuntut pelajaran di sekolah Belanda, sehingga mereka dapat meneruskan

⁸⁰ KI Hajar Dewantara, *Menuju Manusia Merdeka* (Yogyakarta: Leutika, 2009), hlm 64.

pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi tingkatannya. Akan tetapi sekolah itu tertutup untuk masyarakat umum

Orang-orang merasa senang, karena kemudian pemerintah membuka sekolah Bumiputera kelas satu yang kemudian lebih dikenal dengan H. I. S, karena mereka mempunyai pengharapan terhadap anak-anaknya untuk mencapai kepandaian yang dapat menjadi tangga untuk mempertinggi derajat penghidupannya yang sama dengan penghidupan bangsa lain. Namun harapan itu menjadi sia-sia. Anak keluaran dari H. I. S umumnya masih kurang pandai untuk meneruskan pelajarannya pada tingkat sekolah yang lebih tinggi, dan kebanyakan anak-anak tidak diterima untuk masuk M. U. L. O karena kurang pandai, terutama dalam bahasa Belanda. Untuk mencari pekerjaan, biasanya anak-anak keluaran H. I. S hanya menjabat sebagai jurutulis atau jurutulis pembantu dengan gaji yang sama dengan gaji jongos dan koki.

Anak-anak yang didik di H. I. S itu banyak yang kehilangan tabiat kerakyatan dan mereka cenderung merasa lebih tinggi derajatnya, daripada saudara-saudaranya yang tidak pandai berbahasa Belanda. Hal itu karena dimulai dari usia enam tahun mereka didik menjadi seperti Belanda, setiap hari mereka membaca berbagai kitab-kitab berbahasa Belanda, sehingga terpisahlah mereka dari rasa kerakyatannya, seringkali bacan dan cerita yang diterima oleh anak-anak itu menganding pengihinaan terhadap rakyatnya sendiri. Sehingga membuat mereka tidak suka lagi hidup seperti rakyat. Sehingga jika mereka tidak cukup pandai maka mereka akan mudah jatuh ke jurang perbudakan.

Oleh karena itu maka Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa kita wajib berusaha sendiri untuk:

- a. memperbanyak sekolah-sekolah untuk anak-anak diseluruh Indonesia
- b. memperbanyak pelajarannya, agar anak-anak dapat dengan mudah menuntut pelajaran yang lebih tinggi

- c. mendidik anak-anak agar mereka merasa banga sebagai anak rakyat.

Tujuan dari ketiga hal tersebut yaitu, supaya dikemudian hari mempunyai rakyat yang kuat lahir dan batinnya untuk menjunjung tinggi derajat bangsanya⁸¹.

Melihat Pendidikan yang pada waktu itu bagi rakyat Indonesia sangat kurang pengajarannya yang diberikan oleh Belanda, dan juga pendidikannya tidak sesuai dengan kepentingan hidup bangsa, meracuni jiwa anak, dan juga menanamkan jiwa budak pengabdian untuk kepentingan kolonial semata⁸². Maka didirikanlah Tamansiswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara⁸³. Berdirinya Tamansiswa ditandai dengan pemakaian *candrasengkala* yang berbunyi "*Lawan Sastra Mgesti Mulya*". Arti *candrasengkala* yaitu dengan berilmu mencita-citakan kemuliaan atau ilmu yang luhur dan mulia menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban⁸⁴.

Perguruan Tamansiswa dengan tegas menanamkan rasa nasionalisme didalam perguruannya yang pada saat itu berada ditengah-tengah kekuasaan kolonial, Perguruan yang diciptakan itu untuk tempat membangun manusia baru, menyiapkan tenaga-tenaga pejuang kemerdekaan nasional, pembela kemanusiaan dan kebenaran, tempat menempa jiwa-jiwa kebangsaan. Ditengah-tengah kekuasaan dan kolonial, Tamansiswa menentang dan melawan kolonialisme tersebut⁸⁵.

Setelah berdirinya Taman Siwa banyak orang-orang yang tertarik kepada usaha pendidikan nasional tersebut, dan mereka mendirikan Taman Siswa. Medan, Sedangkan Taman

⁸¹ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1997), hlm 103-104.

⁸² Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, hlm 18-19.

⁸³ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, hlm 47.

⁸⁴ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, hlm 91.

⁸⁵ Muchammad Tauchid, *Perjuangan Dan Ajaran Hidup*, hlm 20.

Siswa di Bandung adalah bekas sekolah milik Sarikat Rakyat. Penyerahan sekolah ini dilakukan oleh Ir. Soekarno (yang kemudian menjadi Presiden RI ke I). Untuk mengadakan ikatan antara Taman Siswa di Mataram, Yogyakarta dengan Taman Siswa di tempat-tempat lainya Pada 23 Oktober 1923 diadakan konperensi. Dari hasil konprensi tersebut dibentuklah persatuan dengan nama "*Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa*" di tambah dengan keterangan "*Hoofdzetel Yogyakarta*" artinya yang berpusat di Yogyakarta. Untuk mengenang peristiwa tersebut ditandai dengan *candrasengkala* yang berbunyi "*Suci Tata Ngesti Tunggal*", artinya Suci hatinya, tertib lahirnya, luhur maksudnya dan sempurna tujuannya⁸⁶.

Pada tahun 1928 Taman Siswa mengemparkan masyarakat, karena tujuh dari dua belas siswa lulus pada ujian masuk AMS (SMA) bagian alam-pasti. Sejak saat itu presentase anak-anak yang lulus ujian masuk kesekolah-sekolah menengah atas selalu meningkat jurusanya⁸⁷. Selain itu pada tahun 1928 Taman Siswa mengeluarkan brosur-brosur dan majalah-majalah, dan terbitlah majalah "*Wasita*"⁸⁸.

Perkembangan Taman Siswa yang semakin pesat juga terasa pada perkembangan pergerakan kebangsaan yaitu dengan lahirnya parta-partai. Golongan pemuda melahirkan kongresnya yang kedua pada 27-28 Oktober lahirnya kongres tersebut telah melahirkan tekad bulat dikalangan bangsa Indonesia. Keputusan yang berupa ikrar, bahwa Putera-peteri Indonesia mengakui bertumpah darah satu, tanah Indoneisa; berbangsa satu, bangsa Indonesia dan berbaahasa Indonesianisasi.

Sejak saat itu persatuan dikalangan Indonesia semakin kuat, Bahasa Indonesia menolong mengikat persatuan yang akan mengiatkan nasionalisme. Tindakan partai-partai politik

⁸⁶ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, hlm 91-92.

⁸⁷ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, hlm 87.

⁸⁸ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, hlm 92-93.

semakin radikal untuk mencapai Indonesia Merdeka. Sehingga Pemerintah Kolonial melakukan tindak kekerasan, antara lain melarang pegawai negeri menjadi anggota suatu partai. Polisi melakukan pengeledahan di rumah pemimpin-pemimpin partai, menangkap dan menahan para pemimpin. Peristiwa itu terjadi pada sekitar tahun 1932. Pemerintah dihadapkan pada masalah-masalah besar. Di dalam Dewan Rakyat juga nampak adanya persatuan dengan berdirinya "Fraksi Nasional" pada 27 Januari 1930. Yang diketuai oleh Moh. Husni Thamrin⁸⁹.

Ketika seluruh pergerakan nasional pada saat itu semakin hidup dan kuat, Pemerintah Kolonial mulai bertindak waspada. Dan kewaspadaan itu juga diarahkan kepada pergerakan sosial, terutama pada kegiatan dalam bidang pendidikan. Sehingga dibuatlah "Undang-Undang Pengajaran" yang berlaku pada 1 Oktober 1932, yang dikenal dengan "Undang-Undang Sekolah Liar"⁹⁰. Selain itu juga karena kemajuan Taman Siswa yang begitu cepat, dan hal itu membuat Pemerintah Kolonial merasan takut sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonantie*).

Secara garis besar isi Undang-Undang Sekolah Liar terdiri dari empat bagian yaitu:

1. Tentang guru-guru. Guru-guru yang akan mengajar harus meminta izin kepada Hoofd van Gewestelijk Bestuur (Kepala Pemerintahan Daerah)
2. Tentang bangunan sekolah. Jika ingin mendirikan sekolah baru, pendiri harus meminta izin pada Hoofd van Gewestelijk Bestuur.
3. Hukuman. Untuk pelanggaran ordonasi ini, maka akan mendapat hukuman selama 8 hari penjara atau denda f.25. Hukuman ini dapat diperberat menjadi satu bulan dan denda f.200, jika pada waktu itu pelanggaran yang

⁸⁹ Ibid., hlm 95.

⁹⁰ Ibid., hlm 96.

dilakukan oleh (atau bestuur/pengurus) belum lewat dari dua tahun.

4. Aturan Perubahan. Guru-guru apabila pada tanggal 1 Oktober 1932 memberi pengajaran seperti dalam ordonasi tersebut, maka diwajibkan untuk terlebih dahulu meminta izin dalam tempo 6 Bulan (paling lambat 31 Maret 1933). Hal itu juga berlaku untuk kepala sekolah dan harus melapor kepada Hoofd van gewestelijk Bestuur⁹¹.

Pada kenyataannya sendiri, para guru, kepala sekolah, ataupun upaya untuk mendirikan sekolah baru, mengalami kesulitan dalam hal perizinan kepada Hoofd van Gewestelijk Bestuur. Karena hal itu dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mempersulit dan membatasi perkembangan Taman Siswa. Ordonasi tersebut dikeluarkan secara mendadak dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1932. Dan ordonasi itu tidak sempat dibahas dalam kongres Taman Siswa. Maka dengan dasar wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran dasar Taman Siswa mengambil kebijaksanaan untuk melawan ordonasi itu.

Suwardi dan para pengikutnya berjuang menentang ordonasi tersebut. Dan Taman Siswa yang sekolahnya terkena ketentuan ordonasi itu bertekad melakukan perlawanan pasif. Hal itu dinyatakan oleh Suwardi dalam kawatnya kepada Gubernur Jendral dan juga pembicaraanya dengan Kiewiet de Jonge yang merupakan pejabat yang bertindak selaku kuasa pemerintah yang pada saat itu sedang berkunjung kerumahnya. Selain itu Suwardi juga meyebarkan perlawanannya terhadap ordonasi tersebut melalji media massa (pers), sehingga menjadi ramai, dan Voolksraad (Dewan Rakyat) pun membahas masalah tersebut. Selain itu perjuangannya mendapatkan banyak simpatidan dukungandari kaum pergerakan nasional,

⁹¹ Dwi Purwoko, "Semangat Taman Siswa Dan Perlawanannya Terhadap Undang-Undang Sekolah Liar," *Jurnal Ilmu Pendidikan* Jilid 1, N (1994): hlm 129-130.

umumnya mereka yang mengelola sekolah partikelir (swasta), baik dari kaum pergerakan nasional yang berasaskan islam maupun berasaskan nasionalisme.

Awalnya organisasi yang mendapat subsidi dari pemerintah seperti Muhammadiyah merasa ragu untuk menghadapi ordonasi tersebut. Tetapi melalui konsprensi darurat di Yogyakarta pada tanggal 18-19 November 1932, mereka pun menolak ordonasi sekolah liar tersebut. Sehingga perlawanan muncul dari organisai PSII, Permi, Muhammadiyah, Taman Siswa, Budi Utomo, PNI, Partindo dan Istri Sedar untuk menentang ordonasi tersebut⁹².

Organisasi Permi menyelenggarakan sebuah rapat untuk rakyat di rapat itu dijelaskan tentang aordonasi dan akibat buruk yang telah ditimbulkan dari ordonasi tersebut. Dari konferensi yang diadakan pada tanggal 26-27 Desember 1932, Permi memutuskan bahwa ordonasi yang dimaksud itu telah melanggar sadar islam dan dasar umum, serta cenderung membelengu kebebasan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun pendidikan menurut harapannya sendiri⁹³.

Selain itu pada bulan Oktober 1932 hingga Februari 1933, diadakan konprensi yang dilakukan oleh organisasi sosial politik, baik yang koopreasi maupun nonkoopreasi. Melalui konperensi yang diadakan pada bulan Desember 1932, Budi Utomo memutuskan bahwa jika akhir bulan Maret 1933, ordonasi tersebut tidak dicabut maka seluruh wakilnya di Volksraad dan dewan setempat akan ditarik kembali.

Protes terhadap ordonasi tersebut juga dilakukan oleh organisasi keaderahan seperti Pasundan. Dan itu telah menandakan bahwa protes terhadap ordonasi tersebut telah meluas. Selain itu juga dari protes tersebut memberikan kesadaran untuk bekerjasama dikalangan organisasi politik

⁹² Aqib Sumanto, "*Politik Islam Hindia Belanda*" Jakarta:LP3ES, 1985. hlm 63

⁹³ Deliar Noer, "*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*". Jakarta: LP3ES, 1982. hlm 201

maupun nonpolitik. Dan kondisi itu pun menjadi boomerang bagi pemerintah kolonial. Protes tersebut tampak diperhatikan oleh Gubernur Jendral de Jonge, ia merupakan seorang gubernur yang mempunyai sikap keras terhadap kau pergerakan nasional.

Hal itu menjadi sebuah kemenangan politik untuk kaum pergerakan nasional terhadap pemerintah kolonial. Selain itu juga karena Taman Siswa telah menanamkan ideologi nasional ke sejumlah pemuda. Menurut John Inghleson, hal itu menjadi kemenangan yang menentukan karena setelah terjadinya penekanan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral de Jonge terhadap partai politik yang berhaluan nonkooperasi pada akhir tahun 1933, ribuan sekolah kebangsaan tetap menghidupkan dan mengembangkan ideologi nasional yang sejak semula dipertahankan oleh partai tersebut⁹⁴⁹⁵.

Adapun Undang-Undang sekolah liar 1932 ditunda selama satu tahun dan sebagai pengantinya, dihidupkan lagi ordonasi lama dari tahun 1923/1925. Dan ketetapan penundaan Undang-Undang Sekolah Liar 1932 itu telah disahkan dalam *Staatblad* 21 Februari 1933, no. 66⁹⁶.

3.1 Simpulan

Ki Hajar Dewantara atau yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta, pada 2 Mei 1889 dan wafat pada 26 April 1959. Ia merupakan tokoh pejuang dan pendidik bangsa Indonesia. Meskipun sempat bercimpung dalam dunia politik dan jurnalistik namun ia mengambil jalan yang berbeda dalam perjuangannya yaitu dengan menjadikan

⁹⁴ John Inghleson, "Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1942" Jakarta: LP3ES, 1983. (Sumanto, 1985) (Noer, 1982) hlm 230

⁹⁵ Ibid., hlm 131-133.

⁹⁶ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, hlm 102.

pendidikan sebagai jalan perjuangannya. Perguruan Tamansiswa yang ia dirikan dengan tegas menanamkan dirinya sebagai perguruan nasional ditengah-tengah kekuasaan kolonial, tempat untuk membangun manusia baru, menyiapkan tenaga-tenaga pejuang kemerdekaan nasional, pembela kemanusiaan dan kebenaran, tempat menempa jiwa-jiwa kebangsaan. Ditengah-tengah kekuasaan dan alam kolonial Tamansiswa menentang dan melawan kolomnialisme⁹⁷.

3.2 Saran

Perjuangan yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara dalam memajukan pendidikan di Indonesia dan menanamkan rasa nasionalisme diharapkan dapat dijadikan pembelajaran, inspirasi, dan motivasi. Bukanlah hal mudah pada saat itu untuk memperjuangkan pendidikan, ketika sekolah-sekolah hanya diperuntukkan untuk para kaum priyayi dan bangsa Eropa. Meskipun begitu Ki Hadjar Derwantara telah mampu memajukan pendidikan bangsa Indonesia pada saat itu, Maka kita sebagai anak bangsa, dan kaum terpelajar harus meneruskan perjuangan tersebut, karena meski Indonesia telah merdeka tidak menentukan bahwa pendidikan di Indonesia telah terjamin, maka dari itu teruslah menambah wawasan dan pembelajaran sehingga sebagai generasi penerus kita bisa menjadi cendekiawan dan melahirkan cendekiawan-cendekiawan lainnya.

⁹⁷ Muchammad Tauchid, *Perjuangan Dan Ajaran Hidup*, hlm 20.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Ciputat: Logos wacana Ilmu.
- Dewantara, K. H. (1997). *Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewantara, K. H. (2009). *Menuju Manusia Merdeka*. Yogyakarta: Leutika.
- Djumhur, D. (1974). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Inghleson, J. (1983). *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Ki dan Nyi Hadjar Dewantara. (2020, November 30). Retrieved from Koleksi Foto Museum Digital Dewantara Kirti Griya (Tamansiswa): <https://musuemdewantara.omeka.net/items/>
- Ki Hadjar Dewantara. (2020, November 30). Retrieved from Koleksi Museum Digital Dewantara Kirti Griya (Tamansiswa): <https://museumdewantara.omeka.net/items/>
- Ki Hadjar Dewantara, *pembukaan kongres Taman Siswa*. (2020, November 30). Retrieved from Koleksi Foto Museum Digital Dewantara Kirti Griya (Tamansiswa): <https://museumdewantara.omeka.net/items/>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laksono, A. D. (2018). *Apa Itu Sejarah: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode Dan Penelitian*. Pontianak: Derwati Press.
- M. Dien Madjid, J. W. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar Sejarah*. Jakarta: Kencana.

- Nasional, T. M. (2017). *Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Purwoko, D. (1994). Semangat Taman Siswa dan Perlawanannya Terhadap Undang-Undang Sekolah Liar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 1, Nomor 2 h.125-135.
- S. Kutoyo, S. S. (2012). *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid V)*. Jakarta: PT. Grafitas.
- Sekolah Pertama Taman Siswa*. (2020, November 30). Retrieved from Koleksi Museum Digital Kirti Griya (Tamansiswa): <https://museumdewantara.omeka.net/items/>
- Siswa-Siswa Taman Siswa*. (2020, November 30). Retrieved from Koleksi Foto Digital Museum Dewantara Kirti Griya (Tamansiswa): <https://museumdewantara.omeka.net/items/>
- Sjamsudin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soeratman, D. (1986). *Ki Hadjar Dewantara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sumanto, A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Tauchid, M. (2011). *Perjuangan Dan Ajaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Tiga Serangkai*. (2020, November 30). Retrieved from Koleksi Foto Mueum Digital Dewantara Kirti Griya (Tamansiswa): <https://museumdewantara.omeka.net/items/>

PERAN S.K. TRIMURTI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK BURUH PEREMPUAN DI INDONESIA (1945-1954)

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya sektor industri, memicu seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tidak terlepas dengan peran perempuan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dalam keluarga. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan harus masuk kedalam sektor industri dikarenakan kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup yang tidak terjangkau, dan membantu suami dalam mencari nafkah. Selain itu, kebanyakan perempuan yang bekerja di sektor industri merupakan golongan ekonomi menengah kebawah yang tingkat pendidikan dan keahliannya rendah. Buruh perempuan yang dihadapkan pada sektor industri, dituntut dalam dua peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Tentu hal itu tidak mudah dilakukan secara bersamaan.⁹⁸

Keadaan pergerakan buruh di Indonesia dan sikap pemerintah Hindia Belanda, sedikit banyak yang terpengaruh oleh situasi nasional. Sejak adanya depresi besar tahun 1930-an, sampai menjelang Perang Dunia II, suasana politik di Indonesia terasa makin hangat. Pada 7 Oktober 1938 berdiri partai buruh bernama Indische Partij van Werknemers.⁹⁹

Adanya ketidakadilan terhadap buruh-buruh perempuan membuat geram seorang tokoh perempuan yang hidup pada masa-masa perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan ia menjadi saksi hidup pada saat pembacaan teks Proklamasi oleh

⁹⁸ Aristya Rahma Haryati, "Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 4, no. 2 (2017). hlm 230.

⁹⁹ S.K. Trimurti, *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia Dengan Kemerdekaan Nasional* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975). Hlm 13.

Soekarno pada tahun 1945. Ia adalah Surastri Karma Trimukti atau dikenal dengan S.K. Trimurti. Upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan yang berkaitan dengan pembelaan kedudukan perempuan dalam ketenagakerjaan.¹⁰⁰

S.K. Trimurti merupakan tokoh yang sangat penting peranannya terutama dalam pembelaan terhadap hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia. Perhatiannya terhadap buruh perempuan sangat besar, sehingga dimuat dalam Undang-Undang dalam pasal yang berkaitan dengan posisi perempuan. Diantaranya berkaitan dengan jam kerja perempuan, bahwa perempuan dilarang dipekerjakan pada malam hari kecuali perawat dan bidan. Kebijakan tersebut berhubungan dengan kondisi pada waktu itu yang masih rawan. Bahkan, ia juga mengeluarkan hak cuti haid bagi buruh perempuan.¹⁰¹

Menurut S.K. Trimurti, kaum buruh tidak boleh melupakan kepentingannya sebagai anggota masyarakat, kaum buruh tidak hanya berjuang untuk kepentingan kaum buruh sendiri, tetapi harus turut serta berjuang untuk bangsa. Kaum buruh tidak akan merasakan keberuntungan apabila bangsanya belum makmur.¹⁰²

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai keterlibatan aktif pejuang perempuan perlu mendapatkan perhatian. S.K. Trimurti yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tidak begitu banyak dikenal

¹⁰⁰ Giana Fitri Indraswari and Leli Yulifar, "Surastri Karma Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954," *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.17509/factum.v7i1.11928>. Hlm 68.

¹⁰¹ Ipong Jazimah, *S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016). Hlm 168.

¹⁰² Atik Evi Agustina, "S.K. Trimurti Dan Pemikirannya Untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962," *Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (2014). Hlm 257.

masyarakat Indonesia. Pernegetahun tentang siapa S.K. Trimurti dan bagaimana kiprah perjuangannya dalam mempertahankan hak-hak buruh perempuan di Indonesia mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai sosok S.K. Trimurti.

1.2 Langkah-Langkah Penelitian

a. Heuristik

Heuristik adalah tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lalu yang relevan dengan penelitian.¹⁰³ Pengumpulan sumber yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan sumber tertulis yang relevan dengan kajian penulis mengenai peran S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan di Indonesia (1945-1954), dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan data-data lainnya. Pengumpulan sumber yang dilakukan oleh penulis tidak terpaku kepada pengumpulan sumber mengenai tokoh saja, namun penulis juga mencari sumber lain yang dapat membantu dalam proses penulisan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur atau kepustakaan adalah studi mengenai sumber-sumber tertulis berupa naskah, buku, serta jurnal¹⁰⁴ yang berhubungan dengan topik pembahasan yang relevan dengan kajian penulis.

Adapun sumber-sumber yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian penulis diantaranya:

1. Sumber primer

¹⁰³ Anton Dwi Laksono, *Apa Itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup, Metode Dan Penelitian* (Kalimantan Barat: Derwati Press, 2018). Hlm 97.

¹⁰⁴ M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Ciputat: Kencana, 2014). Hlm 222.

- S.K. Trimurti, *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Kemerdekaan Nasional*, (1975)

2. Sumber sekunder

- Soebagjo I.N., *“S.K. Trimurti Wanita Pengabdian Bangsa”*, (1982)
- Agus Salim, *“Ensiklopedi Tokoh Nasional S.K. Trimurti”*, (2018).
- Ipong Jazimah, *“S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia”*, (2016).
- Giana Fitri Indraswari dan Leli Yulifar, *“Surastri Karma Trimukti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954”* (2018).
- Atik Evi Agustina dan Suparwoto, *“S.K. Trimurti Dan Pemikirannya Untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962”* (2014).

b. Kritik

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa benda, sumber tertulis maupun sumber lisan, kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik bersifat intern maupun ekstern.¹⁰⁵ Dalam hal ini penulis tentunya melakukan kritik terhadap kajiannya mengenai peran S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan di Indonesia (1945-1954) dengan menggunakan kritik intern dan ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber. Kritik terhadap autentisitas sumber tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan tanggal penerbit dokumen, pengecekan bahan yang berupa kertas atau tinta apakah cocok dengan masa

¹⁰⁵ Madjid. Hlm 223.

dimana bahan semacam itu biasa digunakan atau diproduksi.¹⁰⁶

c. Interpretasi

Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa.¹⁰⁷ Dalam interpretasi terdapat dua hal yang penting untuk diperhatikan. *Pertama*, yaitu analisa merupakan penguraian terhadap fakta-fakta yang didapatkan. Hal ini bertujuan untuk melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. *Kedua*, yaitu sintesis merupakan proses menyatukan semua fakta yang telah diperoleh sehingga tersusun sebuah kronologi peristiwa dalam bentuk rekonstruksi sejarah.¹⁰⁸ Dengan demikian, penulis dapat menguraikan fakta-fakta tersebut dari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul atau topik pembahasan.

Berdasarkan penafsiran diatas, maka penulis menggunakan teori menurut Thomas Carlyle dan James A. Froude, yang berpendapat bahwa faktor penyebab utama dalam perkembangan sejarah adalah tokoh-tokoh orang besar (Great Men theory). Menurut mereka, sejarah merupakan "biografi kolektif".¹⁰⁹ Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosial dan politik. Pendekatan sosial yaitu mempelajari masyarakat, dan hubungan antar manusia didalamnya. Sedangkan pendekatan politik yaitu

¹⁰⁶ Madjid. Hlm 224.

¹⁰⁷ Laksono, *Apa Itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup, Metode Dan Penelitian*. Hlm 112.

¹⁰⁸ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Hlm 75.

¹⁰⁹ Sulasman. Hlm 125.

mempelajari tentang sistem pemerintahan sekelompok manusia (termasuk negara).¹¹⁰

Setelah melakukan analisis melalui pendekatan-pendekatan tersebut, penulis mencoba menyatukan semua fakta-fakta menjadi sebuah kronologi peristiwa kedalam bentuk rekonstruksi sejarah dengan kajian penulis mengenai peran S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan di Indonesia (1945-1954).

d. Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah, setelah melalui tahap heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Pada tahap terakhir inilah penulisan dilakukan.¹¹¹ Dengan kata lain penulisan sejarah merupakan representasi kesadaran penulis sejarah dalam masanya. Penulisan sejarah (historiografi) merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.¹¹²

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan langkah-langkah penelitian

BAB II merupakan bab pembahasan yang berisi tentang riwayat hidup S.K. Trimurti dan peran S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan di Indonesia pada tahun 1945-1954.

BAB III merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹¹⁰ Laksono, *Apa Itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup, Metode Dan Penelitian*. Hlm 60.

¹¹¹ Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Hlm 230.

¹¹² Madjid. Hlm 231.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana riwayat hidup S.K. Trimurti?
2. Bagaimana peran S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan di Indonesia (1945-1954)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui riwayat hidup S.K. Trimurti.

2. Untuk mengetahui bagaimana peran S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan di Indonesia (1945-1954).

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah telaah terhadap literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Kajian pustaka dapat berupa buku-buku, jurnal, skripsi, maupun sumber-sumber lain yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang saya ambil diantaranya adalah:

Pertama, buku yang ditulis oleh Agus Salim yang berjudul “Ensiklopedi Tokoh Nasional S.K. Trimurti” pada tahun 2018. Buku ini menjelaskan tentang riwayat hidup S.K. Trimurti yang merupakan anak dari seorang pekerja carik atau juru tulis yang kemudian diangkat menjadi Asisten Wedana atau Camat. Masa pendidikannya yang pertama ialah di Sekolah Dasar Hindia Belanda yang dalam pengajarannya menggunakan bahasa Belanda dan melanjutkan sekolah di Meisjes Normaal School dengan status lulusan terbaik dan dapat bekerja sebagai seorang guru. Setelah itu S.K. Trimurti berkecimpung di dunia politik dan jurnalistik dan wafat pada usia 96 tahun dikarenakan sakit.

Kedua, buku yang ditulis oleh Ipong Jazimah yang berjudul “S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia” pada tahun 2016. Buku ini menjelaskan tentang perjalanan hidup S.K. Trimurti sampai meninggalnya dapat disimpulkan bahwa pembentuk karakter S.K. Trimurti adalah lingkungan di sekitarnya yang menurutnya sangat tidak adil. Selain itu juga karena pergaulannya di dunia organisasi. Soekarno adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam hidup S.K. Trimurti untuk membentuk jiwa kepribadiannya yang kuat dan anti penjajah. S.K. Trimurti terjun ke dunia pers juga karena

permintaan Soekarno di majalah Fikiran Rakyat yang saat itu menjadi corong bagi Partindo.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Giana Fitri Indraswari dan Leli Yulifar yang merupakan mahasiswi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, yang berjudul “Surastri Karma Trimukti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954” pada tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan tentang keadaan ekonomi-sosial kaum buruh perempuan di Indonesia tahun 1930-1944, latar belakang kehidupan S.K. Trimurti, upaya S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia tahun 1945-1954, dan menjelaskan mengenai dampak dari perjuangan S.K. Trimurti terhadap hak-hak kaum buruh perempuan di Indonesia pada tahun 1948-1954.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Atik Evi Agustina dan Suparwoto yang merupakan mahasisiwa Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul “S.K. Trimurti Dan Pemikirannya Untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962” pada tahun 2014. Jurnal ini menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran S.K. Trimurti dan dampaknya untuk kemajuan bangsa tahun 1933-1962. Berdasarkan kesimpulannya, pemikiran S.K. Trimurti terdiri dari beberapa bidang. Dalam bidang politik, S.K. Trimurti beranggapan bahwa politik merupakan salah satu wadah untuk menampung aspirasi rakyat dan menjadi salah satu pembuktian bahwa kaum perempuan dapat sejajar dengan kaum laki-laki yang dapat saling bekerja sama. Dalam bidang sosial, penentangan S.K. Trimurti karena adanya ketidaksamaan dalam status sosial menyebabkan tidak dapat berkembangnya masyarakat karena terhalang oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam bidang ekonomi, mengenai sistem ekonomi kapitalis dianggap S.K. Trimurti sebagai sistem ekonomi yang tidak sesuai bagi bangsa Indonesia.

Kelima, buku yang ditulis oleh Soebagijo I.N. yang berjudul “S.K. Trimurti Wanita Pengabdian Bangsa” pada tahun 1982. Buku ini menjelaskan tentang riwayat hidup S.K. Trimurti, seorang pejuang wanita yang sebagian besar dari hidupnya diabdikan kepada bangsanya. Dimana masa mudanya dipergunakan untuk menuntut ilmu serta belajar berpolitik. Dan bagaimana caranya orang mengabdikan kepada gerakan kemerdekaan tanah air dan bangsanya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Riwayat Hidup S.K. Trimurti

Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan S.K. Trimurti lahir pada tanggal 11 Mei tahun 1912 di Desa Sawahan, Boyolali, Karesidenan Surakarta. Ayahnya bernama R.Ng. Salim Banjarsari Mangunsuromo dan ibunya bernama R.A. Saperinten Mangunbisomo. Ayah S.K. Trimurti adalah seorang carik yang kemudian diangkat menjadi Asisten Wedana atau Camat. Bila melihat kategori jabatan menurut aturan Kasunanan Surakarta, ayah S.K. Trimurti tergolong kedalam pejabat luar kasunanan karena bekerja di kabupaten luar keraton, yaitu Kabupaten Boyolali.¹¹³ S.K. Trimurti tumbuh dalam belaian kasih sayang yang penuh dari kedua orangtua serta keluarga besarnya. Limpahan kasih sayang juga didapatkan dari kakak dan adik-adiknya. S.K. Trimurti adalah anak kedua dari lima bersaudara. Kakaknya bernama Suranto, dan adik-adiknya bernama Sumakti, Sunaryo, dan Sumanto.¹¹⁴

¹¹³ Jazimah, *S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia*. Hlm 1-3.

¹¹⁴ Jazimah. Hlm 5.

Oleh orangtuanya, S.K. Trimurti dimasukkan ke Sekolah Dasar *Ongko Loro* atau *Tweede Inlandsche School* (TIS). TIS sama dengan *Eerste School* (ES), dimana ES adalah Sekolah Dasar khusus anak-anak pejabat pribumi. ES lama pendidikannya 5 tahun dan hanya ada di tingkat karesidenan saja, semestara TIS mempunyai masa pendidikan lebih pendek, yaitu tiga tahun karena mata pelajaran yang diajarkan lebih sedikit, juga tersedia di tingkat kabupaten. TIS menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah, dan bahasa Belanda diajarkan hanya sebagai pengetahuan saja. TIS saat itu digunakan Pemerintah Kolonial Belanda untuk memberantas buta huruf. Karena itu, kualifikasi dari lulusan TIS setidaknya dapat membaca dan berhitung.¹¹⁵ Akhirnya, S.K. Trimurti harus sudah cukup puas dengan bersekolah di TIS yang terletak di dekat rumahnya.

Bersekolah di TIS sangat menyenangkan bagi S.K. Trimurti. Selain sekolahnya dekat rumah, ia juga bisa bergaul dengan siapapun tanpa harus dibatasi status sosial. Lulus dari TIS, atas kehendak ayahnya, S.K. Trimurti melanjutkan sekolah di *Meisjes Normaal School* (MNS) yang mempunyai masa studi selama 4 tahun. Ayah S.K. Trimurti mempunyai alasan yang sangat kuat mengapa mengirim putrinya ke sekolah guru. Selain karena menganggap guru adalah sebuah profesi yang sangat sesuai bagi S.K. Trimurti sebagai seorang perempuan, masalah keuangan pun menjadi alasannya. Dapat dimaklumi bahwa saat itu kakak laki-laki S.K. Trimurti masih menempuh sekolah di ELS yang terkenal sangat mahal dengan masa pendidikan selama 6 tahun. Ayah S.K. Trimurti berprinsip bahwa laki-laki adalah prioritas utama.

MNS mewajibkan siswanya untuk tinggal di asrama selama masa studi berlangsung. Dengan demikian S.K. Trimurti harus rela berpisah dengan kedua orangtua dan saudara-

¹¹⁵ Jazimah. Hlm 8.

saudaranya. Kedua orangtua S.K. Trimurti pun dengan berat hati melepas kepergian putri tercintanya untuk menimba ilmu di Solo.¹¹⁶ Keberhasilannya menjadi peringkat pertama mengantarkannya menjadi guru di Sekolah Latihan.

Dari Sekolah Latihan ia berpindah mengajar ke sekolah *Ongko Loro* di Alun-Alun Kidul Kota Solo. Di sekolah ini pun S.K. Trimurti belum menemukan ketenangan sehingga ia lagi-lagi berpindah ke sekolah khusus untuk anak-anak perempuan atau *Meisjesschool* di Banyumas. Kepindahan S.K. Trimurti ke Banyumas jelas tak mudah bagi kedua orangtuanya. Banyumas dianggap terlalu jauh. Namun, kegigihan S.K. Trimurti untuk meyakinkan orangtua bahwa ia mampu hidup jauh dari orangtua apalagi di Banyumas ia akan tinggal di rumah Ibu Sudibio yang juga salah satu guru di *Meisjesschool*.

Sambil belajar di *Meisjesschool* Banyumas, ia mengawali perjuangan dengan semangat membebaskan rakyat dari penindasan bangsa kulit putih. Di *Meisjesschool* Banyumas tempat ia mengajar, S.K. Trimurti aktif dalam perkumpulan koperasi.¹¹⁷ S.K. Trimurti pertama terjun di dunia organisasi adalah dengan bergabung menjadi anggota Rukun Wanita. Keinginan kaum perempuan untuk ikut berjuang didorong semangat agar perempuan juga bisa maju bersama laki-laki. Selain di Rukun Wanita, S.K. Trimurti juga kerap mengikuti berbagai rapat-rapat yang diadakan oleh Budi Utomo (BU) cabang Banyumas. Tak hanya rajin mengikuti pertemuan dan rapat organisasi, S.K. Trimurti juga senang membaca.¹¹⁸

S.K. Trimurti tutup usia di Rumah Sakit Ousat Angkatan Darat (RSPAD) Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2008, pukul 18.30 WIB. pejuang yang tak kenal lelah itu

¹¹⁶ Jazimah. Hlm 10-12.

¹¹⁷ Jazimah. Hlm 14-15.

¹¹⁸ Jazimah. Hlm 18.

wafat pada usia 96 tahun karena sakit. S.K. Trimurti dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Kalibata sesuai permintaan Pemerintah karena beliau adalah salah satu saksi proklamasi.¹¹⁹

2.2 Peran S.K. Trimurti Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Buruh Perempuan di Indonesia (1945-1954)

Serikat buruh yang pertama kali berdiri di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda adalah serikat buruh dari perusahaan kereta api negara (*staatsspoor*) pada tahun 1905. Namun tidak berlangsung lama karena dibubarkan dan anggota-anggotanya masuk menjadi *Vereniging van Spoor en Tramwegpersoneel* (VSTP) dibawah pimpinan Sneevliet dan Semaun pada tahun 1908, yang didirikan di Semarang.¹²⁰ S.K. Trimurti bergabung dalam serikat buruh yang pertama kali adalah di Gabungan Serikat Buruh Partikelir Indonesia (GASPI).¹²¹

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, banyak sekali tugas yang menanti yang harus dikerjakan oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya para pejuang-pejuang kemerdekaan. Salah satu tokoh bernama Maruto Nitimihardjo mendirikan *committee van actie* pada 18 Agustus 1945 di Menteng Raya 31 Jakarta.¹²² Tujuan pembentukan *committee van actie* untuk mengadakan badan-badan yang membantu mempercepat usaha mengisi kemerdekaan, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia (API) untuk menggerakkan para pemuda, Barisan Rakyat Indonesia (BARA) untuk menggerakkan petani,

¹¹⁹ Agus Salim, *Ensiklopedi Tokoh Nasional S.K. Trimurti* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018). Hlm 90.

¹²⁰ S.K. Trimurti, *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia Dengan Kemerdekaan Nasional*. Hlm 5.

¹²¹ Jazimah, *S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia*. Hlm 147.

¹²² S.K. Trimurti, *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia Dengan Kemerdekaan Nasional*. Hlm 16.

dan Barisan Buruh Indonesia (BBI) untuk menggerakkan buruh.¹²³

BBI mempelopori perjuangan rakyat untuk merebut kekuasaan, terutama di perusahaan-perusahaan milik musuh. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah direbut itu ditempel dengan tulisan: "Milik Republik Indonesia". Waktu itu kaum buruh belum merasa perlu untuk menggolongkan diri dalam serikat-serikat buruh. Mereka bersepakat untuk menekankan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bersama seluruh rakyat.¹²⁴

Ketiga badan tersebut didirikan bukan untuk kepentingan golongan mereka, namun untuk membantu para prajurit yang saat itu berperang mempertahankan kemerdekaan. Untuk membantu kerja BBI, didirikanlah juga badan lain, yaitu Barisan Buruh Wanita (BBW). S.K. Trimurti aktif di BBW sekaligus dia adalah ketuanya. Dalam perjalanannya, BBW membentuk Laskar Buruh Wanita yang juga bertugas membantu para pejuang kemerdekaan. Perhatian S.K. Trimurti terhadap perempuan memang sangat besar. Selain memberikan kursus pada kader BBW ia bersama Sri Mangunsarkoro, Suprapti, dan tokoh perempuan lainnya terlibat langsung dalam penyelenggaraan Rapat Samudra Wanita di Kridosono Yogyakarta, tanggal 24 Februari 1946, yang akan dihadiri oleh golongan-golongan kaum wanita dari segala lapisan. Tujuan diselenggarakannya Rapat Samudra Wanita ini adalah memberi anjuran kepada wanita untuk mengikuti perjuangan mengisi kemerdekaan dengan lebih berani. S.K. Trimurti sendiri menganjurkan supaya kaum wanita ikut ambil bagian dalam usaha menghindari

¹²³ S.K. Trimurti. Hlm 18.

¹²⁴ Soebagijo I.N., *S.K. Trimurti Wanita Pengabd Bangsa* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982). Hlm 136.

kekurangan di bidang ekonomi untuk menambah kekuatan benteng perjuangan.

Saat BBW mengadakan kongres di Kediri pada tanggal 25-28 Januari 1946, S.K. Trimurti turut hadir dan menyampaikan gagasan mengenai perjuangan buruh di Indonesia. Pidato S.K. Trimurti pada kongres BBW tersebut dimuat di harian *Kedaulatan Rakyat* selama 2 hari berturut-turut yaitu tanggal 24-25 Januari 1946. Mengenai pokok-pokok penting dalam pidatonya yaitu:¹²⁵

“Mengenai nasib buruh wanita yang khusus. Nasib kaum buruh wanita yang khusus itu terkadang tidak terasa oleh buruh lelaki sehingga dalam usaha menuntut hal itu ketinggalan. Nasib buruh wanita yang khusus ini hendaknya disampaikan kepada organisasi buruh umum. Organisasi umum inilah yang menuntut. Jadi bukan organisasi buruh wanita sendiri.

Hal-hal yang khusus yang lebih dulu dirasakan oleh buruh wanita misalnya: kekurangan perlindungan terhadap buruh wanita yang mengandung dan melahirkan anak, kekurangan perlindungan dalam hal penjagaan kehormatan dan kesopanan wanita di tempat-tempat pekerjaannya. Tidak adanya tempat-tempat penitipan anak-anak kecil bagi kaum buruh wanita dan lain sebagainya.

Barisan Buruh di Indonesia harus berusaha segiat-giatnya menyusun kekuatan di segala lapangan agar supaya cita-cita buruh tentang bentuk susunan masyarakat bisa tercapai sehingga nasib kaum buruh bisa diperbaiki bersama sehingga penindasan antara manusia dengan manusia, golongan dengan

¹²⁵ Jazimah, S.K. Trimurti: *Pejuang Perempuan Indonesia*. Hlm 149-159.

golongan, atau bangsa dengan bangsa, hilang dari muka dunia, dan hilang dari bumi Indonesia khususnya.

Lain dari itu, dimasa perjuangan ini sangat perlu tenaga-tenaga dikerahkan, lelaki perempuan yang telah dewasa, wajib menyokong sepenuhnya perjuangan Indonesia. Bagi kaum buruh memperbanyak hasil productie, sangat penting. Supaya anak-anak kecil (dibawah umum 4 tahun) dari kaum buruh wanita jangan sampai terlantar, baiklah diadakan tempat penitipan anak-anak. Juga kesehatan buruh, ditempat pekerjaannya atau dirumahnya masing-masing, bisa diurus oleh Barisan Buruh Wanita.”

Tepat pada perayaan hari buruh tahun 1946 S.K. Trimurti secara resmi membuka Latihan Asrama BBW untuk seluruh Jawa yang terletak di Yogyakarta. S.K. Trimurti bertindak sebagai pemimpin asrama dibantu oleh Sri Mangunsarkoro yang juga ikut menjadi pelatih. Tujuan pendirian Latihan Asrama BBW adalah untuk memberi pendidikan tentang perjuangan buruh wanita. Pada 7 Juni 1946 BBW berhasil menggelar konferensi yang dihadiri oleh berbagai utusan organisasi, kementrian, dan pers. Dalam konferensi itu S.K. Trimurti mempertegaskan bahwa perempuan hendaknya terlibat aktif bersama laki-laki dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.¹²⁶

BBI kemudian dibubarkan dan diganti dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI)¹²⁷ pada kongresnya di Madiun Mei 1946. GASBI kemudian memilih melebur menjadi satu dengan organisasi Gabungan Serikat Buruh Vertical. Gabungan dua perserikatan tersebut kemudian menjadi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Berbagai organisasi buruh yang kemudian juga ikut lebur

¹²⁶ Jazimah. Hlm 151-152.

¹²⁷ Soebagijo I.N., *S.K. Trimurti Wanita Pengabdai Bangsa*. Hlm 122.

dalam SOBSI adalah Perserikatan Kaum Buruh Kereta Api yang beranggota 85.000 orang, kaum buruh minyak 20.000, perkebunan 60.000 orang, laut dan pelabuhan 200.000 orang, pos 5.000, listrik 10.000, gula 10.000, kesehatan 5000, pegadaian 5.000, bank rakyat 3000 dan sebagainya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa SOBSI adalah organisasi buruh yang cukup besar masa itu.

S.K. Trimurti justru tidak memilih bergabung dengan SOBSI, karena bersamaan dengan berubahnya BBI menjadi GASBI, berdiri Partai Buruh Indonesia (PBI) di bawah pimpinan Syamsu Harya Udaya. S.K. Trimurti memilih menjadi anggota PBI dan ia pun terpilih menjadi pengurus besarnya.¹²⁸ Kebesaran hati S.K. Trimurti untuk berkecimpung secara total dalam PBI mendatangkan lamaran dari Setiadjud. Setiadjud, kawannya di PBI yang diutus Soekarno untuk menyusun cabinet datang ke rumahnya malam itu juga setelah mendapat perintah dari Presiden Soekarno. Pilihan Setiadjud jatuh pada S.K. Trimurti untuk posisi Menteri Perburuhan karena ia tahu betul kemampuan S.K. Trimurti dalam bidang itu. Setiadjud kemudian menyatakan tawarannya kepada S.K. Trimurti. Namun, S.K. Trimurti menolak. S.K. Trimurti bimbang dan dia belum bisa memberikan jawaban pada Setiadjud saat itu juga.¹²⁹ S.K. Trimurti akhirnya menerima jabatan sebagai Menteri Perburuhan disaat suaminya berada dalam tahanan. S.K. Trimurti menjadi satu-satunya perempuan yang duduk di Kabinet Amir Sjarifoeddin I.¹³⁰

Pada 13 Juli 1947 dalam rangka memperkenalkan Kementerian Perburuhan sebagai kementerian yang baru, diadakanlah sebuah pertemuan yang bertempat di Kementerian Sosial. Acara yang dihadiri pemimpin-pemimpin

¹²⁸ Jazimah, *S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia*. Hlm 153.

¹²⁹ Soebagijo I.N., *S.K. Trimurti Wanita Pengabdian Bangsa*. Hlm 228.

¹³⁰ Jazimah, *S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia*. Hlm 159.

organisasi perburuhan dan pers ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab Kementerian Perburuhan. S.K. Trimurti dalam pidato pertamanya sebagai menteri perburuhan, menyampaikan:

“Dengan adanya kementerian yang baru ini dapatlah kita menaruh perhatian juga langsung dengan perburuhan. Organisasi buruh haruslah dipandang dari sudut nasib dan cita-cita buruh, sedangkan kementerian dari sudut negara.

Berhubung dengan situasi politik pada masa ini, dimana kita tidak saja berhadapan dengan Belanda tetapi juga dengan Amerika, Inggris, dll, haruslah semua langkah dan tindakan merupakan sesuatu rencana yang lebih prinsipil lagi agar dapatlah disusun masyarakat yang tidak kapitalistis.

Dalam hal ini kaum buruh harus segera dapat mengambil tindakan yang tegas pula menyelenggarakan negara yang merdeka dan dipegangnya sebagai alat untuk perjuangan. Jangan hanya merupakan golongan pengikut, tetapi jadilah tenaga yang aktif supaya mudah kita mengerahkan diri terjun dalam masyarakat.

Dalam menghadapi kapital asing nanti organisasi buruh harus mempunyai tujuan yang tegas karena kita yakin bahwa selain itu kita akan berhadapan pula dengan infiltrasi-infiltrasi politik juga, akan menjalankan perang urat syaraf, untuk melaksanakan perjuangan kita, dengan membelokkan tujuan kita kearah sifat yang reformistis (untuk kepentingan nasib).

Dalam menjalankan segala pekerjaan kita harus berani menerima kritik-kritik bagaimanapun juga, asalkan kritik-kritik tadi disertai dengan pertanggung jawab dan menuju kearah kemajuan dan perbaikan.”¹³¹

¹³¹ Jazimah. Hlm 162.

Di Kabinet Amir Sjarifoeddin II, S.K. Trimurti tetap menjabat sebagai Menteri Perburuhan.¹³² Karena banyaknya silang pendapat antarpantai mengenai Perjanjian Renville menyebabkan Kabinet Amir II hanya bertahan selama 6 bulan, yakni sejak 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Saat Kabinet Amir Sjarifoeddin II dinyatakan bubar S.K. Trimurti tak lagi menjabat sebagai Menteri Perburuhan.

Ketika kabinet dinyatakan bubar, pada 1948, S.K. Trimurti sedang berada di Pati. Undang-Undang Kerja yang masih harus disahkan, akhirnya diselesaikan oleh penerus S.K. Trimurti semasa kabinet Hatta tahun 1948. S.K. Trimurti kembali ke Jakarta.

Bubarnya kabinet Amir II tempat dia bernaung tak membuat pupus semangat S.K. Trimurti. Saat menjadi Menteri Perburuhan S.K. Trimurti giat menjalankan tugasnya. Prestasi yang dicapai adalah lahirnya Undang-Undang Perburuhan, yaitu Undang-Undang¹³³Kecelakaan No. 33 tahun 1947. Selain itu Kementerian Perburuhan pimpinan S.K. Trimurti juga berhasil menyusun Undang-Undang Kerja yang baru disahkan pada masa Kabinet Hatta tahun 1948.

Perhatiannya terhadap pekerja perempuan sangat besar, sehingga Undang-Undang Perburuhan yang baru itu memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan posisi perempuan. Diantaranya yang berkaitan dengan jam kerja perempuan, bahwa perempuan dilarang dipekerjakan pada malam hari kecuali perawat dan bidan. Kebijakan tersebut berhubungan dengan kondisi pada waktu itu yang masih rawan. Bahkan, ia juga mengeluarkan hak cuti haid bagi buruh perempuan.

¹³² Jazimah. Hlm 164.

¹³³ Jazimah. Hlm 166-168.

Perihal ini disampaikan sendiri oleh Kartinah Kurdi, mantan Sekretaris Jenderal Gerwani.

Beliau yang pertama kali menerbitkan ketentuan hak cuti haid bagi buruh perempuan. Permasalahan cuti perempuan saat hamil dan melahirkan yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pemerintah, menjadi perhatian S.K. Trimurti. Perusahaan-perusahaan sering meributkan hak cuti tiga bulan bagi wanita hamil dan itulah sebabnya mereka lebih suka menerima laki-laki sebagai pekerja. Mereka menganggap rugi untuk memberi cuti tiga bulan. Lha, apa mau mengingkari sesuatu yang sudah ilmiah? Menurut saya, cuti tiga bulan itu sebenarnya tak cukup, karena sebagai ibu ia harus terus menyusui anaknya.¹³⁴

S.K. Trimurti menjadi ketua kelompok II dalam Badan Pemeriksa Penggantian Undang-Undang dan Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan oleh kongres KOWANI di Solo pada tanggal 26-28 Agustus 1948. S.K. Trimurti bertugas untuk menangani masalah yang berkenaan dengan pekerja perempuan. Walaupun aktif di dunia politik, ia juga tak melewatkan aktif di organisasi wanita seperti KOWANI.

Dalam menjalankan tugasnya S.K. Trimurti tidak sendiri, karena Badan Pemeriksa Penggantian Undang-Undang dan Undang-Undang Perkawinan terdiri atas tiga kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Maria Ulfah Subadio yang mengurus tentang masalah sosial. Kelompok kedua S.K. Trimurti dengan tugas masalah perburuhan. Kelompok ketiga dipimpin J. Sulianti yang berurusan dengan penelitian tentang kesehatan masyarakat.

Saat masih menjabat Menteri Perburuhan, perhatiannya terhadap perempuan memang sangat besar. Pada peringatan

¹³⁴ Jazimah. Hlm 169.

hari ibu tahun 1947 di alon-alon Yogyakarta, bersama dengan Presiden Soekarno, ibu negara Fatmawati, Sri Mangunsarkoro, tokoh perempuan lainnya, dan dari berbagai wakil badan dan partai S.K. Trimurti mengatakan bahwa perempuan adalah bagian dari kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga setiap perempuan wajib untuk mengisi kemerdekaan dan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Sri Mangunsarkoro juga menghendaki agar perempuan tahu kewajibannya, sementara Presiden Soekarno mengingatkan agar perempuan senantiasa bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan kaum laki-laki dalam usaha mengisi kemerdekaan.¹³⁵

Ditengah situasi politik yang seperti ini, S.K. Trimurti ingin menghidupkan kembali peran dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan. Beberapa pejuang wanita membentuk suatu organisasi wanita Indonesia yaitu Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis). Gerwis kemudian menjadi badan gabungan dari berbagai organisasi wanita lainnya, seperti Gerakan Wanita Rakyat Indonesia, Persatuan Wanita Sedar Surabaya, dan Rukun Putri Indonesia (Rapindo).

Setelah melalui dua kali rapat di Semarang, pada 6 Juni 1950 terbentuk Pengurus Besar Gerwis, dan S.K. Trimurti menduduki jabatan sebagai Ketua III. Misi pendirian Gerwis adalah berjuang untuk melepaskan RI dari ikatan KMB dan perjanjian-perjanjian lainnya yang merugikan rakyat. Selain itu, Gerwis juga bertekad untuk menolak segala macam bentuk kolonialisme dan imperialisme gaya guru. Gerwis yakin sepanjang masih ada imperialisme dalam bentuk apapun, selama itu pula kaum wanita Indonesia tidak akan bisa mengangkat harkat dan martabatnya.

¹³⁵ Jazimah. Hlm 170.

Dalam kongres di Surabaya pada bulan Desember 1952, S.K. Trimurti naik jabatan menjadi Wakil Ketua. Pada kongres selanjutnya di Jakarta, nama Gerwis diubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Gerwani berdiri dengan tekad di atas semua kepentingan, terutama kepentingan kaum perempuan Indonesia, dan menyatakan tidak menjadi bagian atau berafiliasi kepada partai dan ideologi manapun. Dengan visinya itu maka cabang-cabang Gerwani bermunculan di berbagai kota dan daerah.¹³⁶

Namun, sebagai organisasi dengan basis massa yang sangat besar, Gerwani menjadi sasaran partai-partai yang berusaha menempatkan organisasi ini ke dalam afiliasi dan kepentingan politiknya. Hal ini menyebabkan Gerwani disusupi oleh orang-orang yang mengemban misi untuk mengarahkannya berpihak pada salah satu partai politik tertentu. Melihat hal ini, S.K. Trimurti dan beberapa rekannya berusaha mengingatkan dan mencegah agar Gerwani kembali pada misi dan visi semula.¹³⁷

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

S.K. Trimurti adalah saksi hidup perjuangan bangsa Indonesia saat dijajah Belanda dan Jepang. Merasakan sendiri bagaimana khidmatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan ikut serta menyebarkan berita kemerdekaan sampai ke pelosok negeri Indonesia. S.K. Trimurti merupakan tokoh yang sangat penting peranannya terutama dalam pembelaan terhadap hak-hak kaum buruh

¹³⁶ Salim, *Ensiklopedi Tokoh Nasional S.K. Trimurti*. Hlm 75.

¹³⁷ Salim. Hlm 76.

perempuan di Indonesia. Perhatiannya terhadap buruh perempuan sangat besar, sehingga dimuat dalam Undang-Undang dalam pasal yang berkaitan dengan posisi perempuan. Diantaranya berkaitan dengan jam kerja perempuan, bahwa perempuan dilarang dipekerjakan pada malam hari kecuali perawat dan bidan. Kebijakan tersebut berhubungan dengan kondisi pada waktu itu yang masih rawan. Bahkan, ia juga mengeluarkan hak cuti haid bagi buruh perempuan.

3.2 Saran

Melalui perjuangan-perjuangan S.K. Trimurti dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan zaman saat ini. Terutama untuk kalangan perempuan agar kita dapat mempertahankan derajat perempuan di mata laki-laki dan para penguasa supaya tidak ditindas dan diperlakukan dengan semena-mena. S.K. Trimurti merupakan pejuang perempuan yang sangat mengabdikan kepada bangsanya. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya patut diberi kehormatan atas jasa-jasanya sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dengan cara mempelajari dan menuliskan perjuangan beliau ke dalam buku sejarah agar lebih diketahui oleh khalayak luas. Selain itu diharapkan juga jasa-jasa beliau menjadi tauladan bagi generasi penerusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. E. (2014). S.K. Trimurti Dan Pemikirannya Untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962. *Pendidikan Sejarah*.
- Haryati, A. R. (2017). Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sejarah*.
- I.N., S. (1982). S.K. Trimurti Wanita Pengabdian Bangsa. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Jazimah, I. (2016). S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Laksono, A. D. (2018). *Apa Itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian*. Kalimantan Barat: Derwati Press.
- Salim, A. (2018). *Ensiklopedi Tokoh Nasional S.K. Trimurti*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Trimurti, S. (1975). *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia Dengan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Wahyudi, M. D. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: Kencana.
- Yulifar, G. F. (2018). Surastrin Karma Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954. *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*.

BAB II

SEJARAH SOSIAL, POLITIK, DAN BUDAYA

PERAN IKHAWANUL MUSLIMIN TERHADAP INDONESIA

1940-1950

1.1 Latar Belakang Masalah

Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu dari organisasi masyarakat yang berbasiskan agama Islam di negara Mesir, namun jikalau kita lihat dalam pergerakan setiap organisasi tersebut, hanya Ikhwanul Muslimin lah yang begitu terlihat sangat mencolok dan begitu berani dalam mengambil sebuah tindakan di Mesir. Dalam sejarah perjalanan Ikhwanul Muslimin di Mesir, terdapat banyak kejadian yang terjadi di dalamnya, di mulai dari reaksi positif masyarakat terhadap Ikhwanul Muslimin, hingga reaksi negatif dari kubu pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin yang dimulai dengan pembekuan organisasi Ikhwanul Muslimin dari Mesir, pemenjaraan puluhan bahkan ratusan anggota-anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir, hingga pembebasan Ikhwanul Muslimin dari pembekuan dan pergerakan Ikhwanul Muslimin untuk bertahan di dalamnya.¹³⁸

Sepanjang sejarah perkembangan di Mesir selalu diduduki oleh bangsa lain. seperti Arab (641-935 M), Dinasti Fathimiyah (969-1171 M), Dinasti Ayyubiyah (1171-1250), Dinasti Mamluk (1250-1517 M), dan Turki Utsmani (1517-1805 M). Bahkan setelah itu berdatangan lah bangsa lain dari luar Arab ke daerah ini dengan alasan dan tujuan tertentu. Walaupun statusnya hanya sebagai wilayah kekuasaan Turki Utsmani, Mesir secara *de facto* dipegang oleh fraksi militer lokal

¹³⁸ chalfan chairil, *Ikhwanul Muslimin Di Empat Masa Pemerintahan Di Mesir* (depok: universitas indonesia, 2014), 6.

yaitu dinasti Mamluk. Sejak sampai saat itu kedudukan ulama dan organisasi tarekat sufi cukup mengakar dan berdiri kokoh di Mesir. Di sisi lain Hasan al-Banna yang tidak sendirian itu juga mengagas pembentukan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang kemudian akhirnya menyebar pengaruhnya di belahan dunia Islam luas . Khususnya politik, tidak sedikit peran gerakan tersebut di basissi di Negara Mesir. Ia kemudian memberi peran cukup signifikan terhadap konstalasi politik kenegaraan Mesir.¹³⁹

Organisasi ini dahulu adalah orgnisasi yang kecil akan tetapi dari yang kecil lah organisasi ini dapat bisa membangun untuk membebaskan negaranya dari pengaruh-pengaruh Barat dan inilah diperlukan untuk terus membela Agama Islam dan menjunjung setinggi-tingginya karena sudah banyak negara silam yang tertindas oleh para-peenjajah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Biografi Ikhwanul Muslimin ?
2. Bagaimana peran Ikhwanul Muslimin terhadap Indonesia (1940-1950) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang dituliskan di dalam rumusan masalah maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa itu Ikhwanul Muslimin
2. Untuk mengetahui peran Ikhwanul Muslimin terhadap Indonesia (1930-1940)

¹³⁹ Rusydi Sulaiman, "Ikhwanul Muslimin Dan Politik Kenegaraan Mesir" (1998): 243–244.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustka bagi peneliti sangatlah penting untuk mencari suatu pijakan yang kokoh sehingga terdapat acuan-acuan untuk digunakan dalam penelitian yang sesuai dengan bidang yang hendak ingin dikaji. Kajian pustaka di sisi lain juga dapat membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan, juga bisa mencerminkan kedalam teori yang terlibat dalam penelitian. Jadi kedudukan kajian pustaka dalam sebuah penelitian dapat menempati peranan yang sangat strategis karena dia dapat merefleksikan kadar keilmiah suatu penelitian. Kajian pustaka mencakupi beberapa berbagai sumber diacu dan telah disajikan secara bentuk konfrehensif serta membahas serta mebahas kesimpulan-kesimpulannya untuk selanjutnya dengan uraian peneliti sendiri sampai kepada kesimpulan yang berdasarkan dengan hasil-hasil penelitian orang lain.¹⁴⁰

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah suatu prosedur atau bias juga disebut dengan langkah-langkah dalam mendapatkan suatu pengentahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian itu adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu kepada bentuk-bentuk peneliian.¹⁴¹

Metode sejarah atau metode penelitia merupakan suatu prosedur atau metode yang digunakan untuk mengetahui suatu cara . Metodologi sejarah sebagai *science of methods* berarti membagi ilmu yang membahas cara, yaitu cara untuk

¹⁴⁰ karuru p, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian" 2 (2013): 2.

¹⁴¹ MSi. Prof. Dr. Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia* (2012)

mengetahui beberapa peristiwa yang telah terjadi pada masa dahulu (sejarah).

Dalam suatu metodologi sejarah, seseorang sejarawan sangat dituntut untuk menguasai metode yang dipakai agar mengetahui peristiwa di masa lalu. Oleh karena itu dilakukannya suatu penelitian yang berupa prosedur penyelidikan dengan memperoleh Teknik pengumpulan data sejarah, yaitu baik berupa arsip dan juga perpustakaan (di dalam atau di luar negeri) maupun dengan wawancara oleh para tokoh yang masih hidup yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah. Mempelajari suatu metodologi sejarah berarti kita juga menguraikan metode penelitian sejarah, sumber sejarah, dan penulisan sejarah.¹⁴²

1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu kegiatan untuk mencari sumber data-data materi sejarah, atau evidensi sejarah. Heuristik berasal dari Bahasa Yunani *heuriskein*, yang berarti sama dengan to find yang memiliki arti tidak hanya menemukan, akan tetapi mencari dahulu. Pada tahap ini, kegiatan yang diarahkan kepada penjajakan, pencarian, dan juga pengumpulan sumber-sumber yang akan nanti diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, yang terdapat temuan benda maupun sumber lisan. Pada tahap awal, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Mengumpulkan sumber yang akan dibutuhkan dalam penulisan merupakan pekerjaan pokok yang dapat dikatakan gampang-gampang susah, sehingga akan diperlukan kesabaran dari penulis.¹⁴³

¹⁴² sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (bandung: pustaka setia, 2014), 74.

¹⁴³ Ibid., 93.

Ada beberapa unsur penting yang mesti diperhatikan oleh peneliti heuristik. Pertama, peneliti sendiri wajib memiliki pengalaman dan kemauan yang tinggi terhadap fenomena yang akan diteliti. Kedua, orang lain yang menjadi mitra peneliti (co-researcher), wajib juga membagi pengalamannya dengan peneliti.¹⁴⁴

Dalam tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan dengan mencari data-data yang relevan mengenai pembahasan yang akan penulis teliti, melalui beberapa studi pustaka yang baik berupa buku, jurnal, foto, dan juga internet. Langkah pertama, penulis mencari sumber informasi mengenai perjalanan mengenai Hasan Al-Banna selaku pencetus Gerakan Ikhwanul Muslimin sehingga bisa memiliki peran sampai ke Indonesia. dengan mencari arsip-arsip yang merupakan rekaman kegiatan pada zaman nya atau peristiwa itu sendiri.

Dari sana penulis mendapatkan data dan fakta. Kemudian dalam studi pustaka penulis mencoba untuk mencari buku atau karya Hassan Al-Banna yang dianggap dapat membantu dalam penyusunan laporan ini. Adapun sumber Primer dan sumber Sekunder yang penulis dapatkan antara lain yaitu:

a. **Sumber Primer**

Adapun sumber primer akan penulis ambil dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terkait dan orang yang mengetahui tentang Ikhwanul Muslimin. Diantaranya sumber yang sudah penulis wawancarai anantara lain adalah:

1. Bapak Rudi Ano (selaku anggota).

¹⁴⁴ M. Rahardjo, *Studi Heuristik Dalam Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Islam Negeri 2018), hlm 2

2. Bapak Irfan (selaku musrif dan juga masuk sebagai anggota).

b. **Sumber Sekunder**

Sedangkan adapun penulis mengambil sumber tertulis untuk bisa membantu mendukung terhadap penulisan ini. Adapun sumber sekunder sebagai berikut :

- Muhammad Hanif Fuadi, 2017, *Pesan Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Buku Majmu'at Al-Rasail*, Universita Islam Negeri Bandung.
- Umma Farida, 2014, *Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial di Mesir*, STAIN Kudus.
- Rusydi Sulaiman,,2014, *Ikhwanul Muslimin dan Politik Kenegaraan di Mesir*, STAIN Bangka-Belitung.
- Novi Maria Ulva, 2016, *Sejarah dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

2. **Kritik**

Kritik merupakan tahapan selanjutnya setelah tahap heuristic dengan dilakukan oleh para sejarahwan jika sumber-sumber sejarah telah dikumpulkan. Tahapan kritik tentu memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Salah satunya merupakan otentitas (*authenticity*). Proses kritik meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan internal. Aspek ekstern bersangkutan dengan apakah sumber itu memang sumber. Aspek intern

berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.¹⁴⁵

a. Kritik Eksternal

Wawancara dengan Bapa Rudi Ano “anggota dari Ikhwanul Muslimin”. Penulis menilai narasumber tersebut dapat dijadikan sumber primer karena memiliki informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

Adapun realisasi dalam tahapan ini penulis melakukan kritik terhadap narasumber-narasumber yang memiliki usia lanjut, penulis khawatir pada faktor usia narasumber mempengaruhi ingatan-ingatan narasumber yang sudah memudar tetapi setelah dilakukan wawancara dengan narasumber tersebut ternyata semua narasumber yang berusia lanjut masih ingat dengan jelas semua ingatannya sehingga memberikan informasi yang akurat kepada penulis.

b. Kritik Internal

Setelah melakukan kritik ekstern penulis melakukan tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik intern dimana penulis harus melakukan kritik terhadap isi wawancara dengan beberapa orang yang masih menjadi anggotanya. Adapun isi wawancaranya mengenai bagaimana sejarah munculnya organisasi tersebut dan siapakah pencetusnya. Hasil wawancara ini layak dijadikan sebagai

¹⁴⁵ sulasman, *MeIbid.todologi Penelitian Sejarah*, 101–102.

sumber primer dan dapat dipakai sebagai referensi bagi penulis.

3. Interpretasi

Setelah tahap kritik tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Tahap ini juga bisa diartikan sebagai tahap penafsiran. Mengapa di namakan penafsiran, karena sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas dasar sejumlah fakta yang diperoleh melalui sumber sejarah dan bersamaan dengan teori disusunlah fakta itu dalam interpretasi yang menyeluruh dan karena itu pula, interpretasi atas data yang sama sekalipun memungkinkan hasil yang beragam.¹⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pola utama perubahan sosial yang ditemukan oleh Lauer bahwa terdapat dua teori utama perubahan sosial.

a. Teori Siklus

Teori siklus melihat perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Di dalam pola perubahan ini tidak tampak batas-batas antara pola primitif, tradisional dan modern.

b. Teori Perkembangan

Teori ini percaya bahwa perubahan dapat di arahkan ke suatu titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks.

¹⁴⁶ sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 111.

4. Historiografi

Historiografi merupakan sebagai hasil dari karya sejarah yang dapat pula diartikan sebagai salah satu proses penulisan sejarah. Pengertian yang pertama berkenaan dengan studi hasil tentang karya tulis sejarah. Studi ini pada intinya mempelajari ciri-ciri dan kecendrungan dari materi yang ditulis. Sedangkan pengertian kedua berkaitan dengan tahap-tahap metode penelitian sejarah.¹⁴⁷

Setelah melewati beberapa tahapan sebelumnya, pada tahapan ini penulis mencoba untuk mengaitkan data, fakta, serta hasil dari interpretasi yang akan penulis susun menjadi sebuah tulisan. Adapun susunan penulisannya sebagai berikut:

BAB I membahas tentang latar belakang hingga proses penulisan akhir, yang mana penulis membahas apa itu organisasi Ikhwanul Muslimin.

BAB II membahas tentang tujuan dibentuknya organisasi Ikhwanul Muslimin tersebut, siapakah tokoh dibalik organisasi tersebut, dan bagaimana organisasi Ikhwanul Muslimin masuk ke Indonesia dan bagaimana peran organisasi itu terhadap Indonesia.

BAB III simpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan ini menyimpulkan pembahasan yang penulis paparkan pada bab satu dan bab dua. Dan juga terdapat saran yang ingin penulis berikan atau sampaikan terkait pembahasan ini.

Pada bagian akhir penelitian ini terdapat daftar sumber yang memuat informasi mengenai sumber atau

¹⁴⁷ susanto zuhri, "Historiografi Dan Metodologi Sejarah" 2 (1996): 2.

referensi yang penulis pakai guna mendukung pembuatan penelitian ini; lampiran-lampiran; dan riwayat hidup penulis.

2.1 Biografi Hasan Albanna

Hasan Al-Banna lahir di desa Mahmudiyah kawasan Buhairah, Mesir pada hari Ahad, 14 oktober 1906, yang bertepatan dengan 25 Sya'ban 1324. Nama lengkap beliau, Hasan Ibn Abdurahman Al Banna. Ia berasal dari keluarga pedesaan kelas menengah. Al-Banna merupakan pribadi berkharisma yang dikenal cerdas, shaleh, mulia, dan berpengaruh dalam bentangan sejarah, baik di dataran Arab khususnya, dunia Islam umumnya, termasuk dunia Barat. Hasan Al-Banna meninggal pada umur 43 tahun, beliau dibunuh pada tanggal 12 Februari 1949 oleh polisi Mesir, atas perintah Raja Farouk I. Kejadiannya, ketika beliau berada didalam mobil untuk suatu keperluan (dakwah), beserta sahabatnya, Dr. Abdul Karim Manshur. Kemudian tiba-tiba datang beberapa polisi rahasia menembak mobilnya dengan peluru, Al-Banna saat itu masih sempat hidup dan sempat dibawa kerumah sakit dua

jam Hasan Al-Banna dibiarkan terbaring dilantai rumah sakit



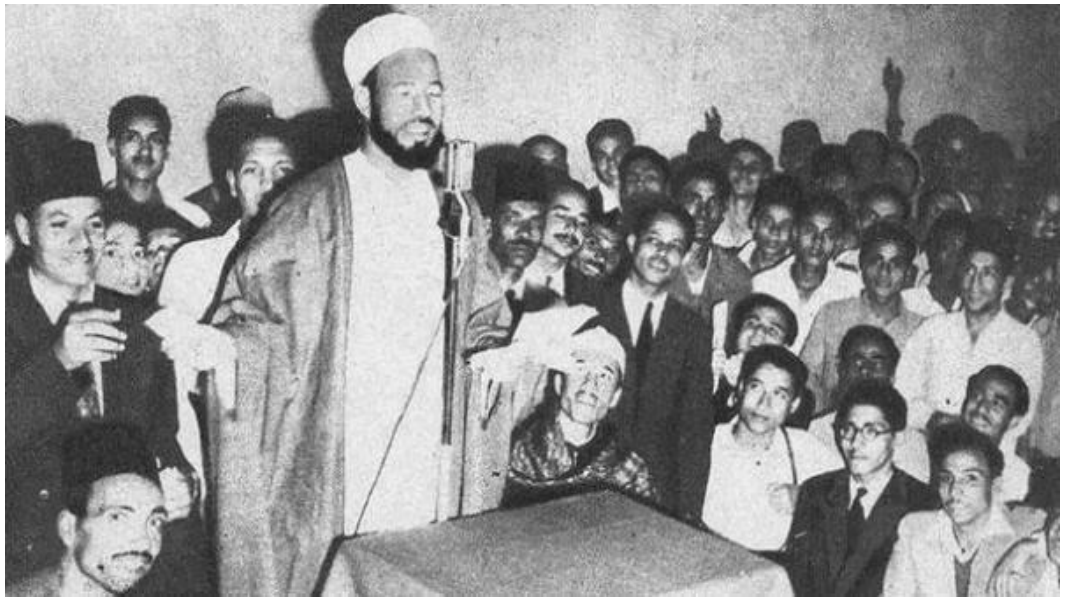
gambar 1 1 sumber :liputanislami. com

tanpa ada petolongan dari pihak rumah sakit. Tidak berselang setelah dua jam tersebut Hasan Al-Banna menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit al-Qashr al Aini, Kairo.¹⁴⁸

Hasan Al-Banna lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang taat. Sebagai seorang ayah, Syeikh Ahmad mencita-citakan putranya (Hasan) sebagai mujahid (pejuang) disamping seorang mujaddid (pembaharu). Sejak kecil Hasan Al-Banna telah dituntut untuk menghafalkan Alquran penuh. Setelah itu ia dimasukkan sekolah persiapan yang dirancang pemerintah Mesir, model sekolah dasar tanpa pelajaran bahasa asing. Di rumah, Hasan bergelut dengan perpustakaan pribadi ayahnya, berisi buku agama, hukum, hadis dan ilmu bahasa. Di keluarga

¹⁴⁸ sakinatul hayati, "Peranan Imam Syahid Hasan Al-Banna Dalam Mengembangkan Ikhwanul Muslimin Di Mesir Pada Tahun1928-1949" 5 (2015): 5.

yang penuh dengan takwa dan ilmu Hasan Al-Banna tumbuh dan berkembang. Kemudian pindah ke madrasah Addadiyah di Almahmudia dan melanjutkan ke Darul Muallimin Bidamanhur tahun 1920. Di sana Hasan Al-Banna menyelesaikan hafalan Alquran pada usia 14 tahun. Julukan bagi Hasan Al-Banna ialah Sang Pembaharu Islam Abad ke-20.



gambar 1 2 sumber :portal-islami.id

Pada usia enam belas (16) tahun, ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan sekolah guru bahasa Arab, sebuah lembaga pendidikan produk abad pembaharuan yang berdiri pada abad 19. Dalam lingkungan pendidikan tersebut Hasan Al-Banna mampu mengorganisasikan kelompok mahasiswa Universitas Al-Azhar dan kelompok mahasiswa Universitas Dar al-Ulum yang melatih diri berkhotbah di masjid-masjid. Dalam kesempatan belajar di Kairo, Hasan Al-Banna sering berkunjung ke toko-toko buku yang dimiliki oleh gerakan

Shalafiyah pimpinan Rasyid Ridha. Di Mesir ia juga aktif membaca al-Manar dan berkenalan dengan Rasyid Ridha serta menjalin komunikasi dengan murid-murid Abduh lainnya. Hasan Al-Banna lulus tahun 1345 H atau 1927 M di Darul Ulum dan mendapat rangking pertama. Selanjutnya Hasan Al-Banna diangkat menjadi guru di Ismailiah Terusan Suez dan di sana lah lahir bibit-bibit Jemaah Al-Ikhwan Al-Muslimin pada bulan Zulqadah 1347 H / Maret 1928 M. Pada tahun 1932 Hasan Al-Banna pindah ke kairo, dengan demikian pindahlah markas besar Al-Islam Al-Muslimun ke kota tersebut. Pada saat itu, mulai besar pula nama Jemaah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Setelah melakukan dakwah dengan semangat yang tinggi dari Hasan Al-Banna yang merupakan jihad yang sangat agung kemudian Hasan Al-Banna ini mati syahid di salah satu jalan raya Kairo tanggal 14 Rabiul tsani 1367 H/ 12 Februari 1949.¹⁴⁹

¹⁴⁹ M. Hanif Fuadi, "Pesan Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Buku Majmu'at Al-Rasail," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 2 (2017): 328.



gambar 1 3 sumber: nu.or.id

2.2 Awal Mula Ikhwanul Muslimin Terbentuk

Gerakan Ikhwan pada mulanya didirikan di Ismailiyah pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna (1906-1949) sebagai wadah untuk menyebarkan Islam berdasarkan “Cinta, Persaudaraan dan Persahabatan”. Ia tumbuh dalam keluarga taat beragama. Ia juga menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Mahmudiyah, kemudian pergi ke Damanhur untuk belajar di sekolah guru. Dari sini, al-Banna pindah ke Kairo untuk belajar di Dar Al-Ulum, cabang Al-Azhar. Selama periode itulah, ia sering menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok Islam yang berasosiasi dengan *al-Manar*. Hasan al-Banna didatangi oleh enam orang yang mengaku tertarik dan terkesan pada dakwah-dakwahnya. Mereka itu antara lain

adalah: Hafidz Abdul, Ahmad al-Husyary, Fuad Ibrahim, Ismael Izz, Zaki al-Maghriby, serta Abdurahman Hasbullah. Sebagian besar pekerjaan mereka adalah wiraswasta. Mereka berenam bermaksud menggabungkan diri dan menawarkan sebagian dari kekayaan yang mereka miliki untuk kepentingan tersebut. Hasan al- Banna menerima mereka dan mengusulkan nama “*Ikhwanul Muslimin*”. Alasannya karena tujuan mereka bersatu dalam sebuah persaudaraan tersebut, semata-mata untuk mengabdikan kepada Islam, sehingga, sangat tepat jika kelompok ini diberi nama Ikhwanul Muslimin yang berarti Persaudaraan Islam.¹⁵⁰



gambar 1 4 sumber : jaddaliya.com

Gerakan ini terus beraktivitas dan menunjukkan kegigihannya berjuang hingga sekarang. Organisasi yang dirintis oleh Hasan al-Banna ini merupakan induk dan sumber inspirasi utama bagi banyak organisasi Islamis di Mesir dan di

¹⁵⁰ maria ulva, “Sejarah Dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin” (2016): 217.

beberapa negara Arab lainnya; termasuk Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait, Yaman dan sebagian negara di Afrika Utara. Perkembangan Ikhwan di Ismailiah sangat pesat dan sudah menembus ke beberapa kota di sekitar Ismailiah, seperti: Syubrahkit, Mahmudiyah, Abu Syuwair, Port Said, Bahr Shaghir, Suez dan Balah. Namun proses yang mereka jalani tidak selamanya mulus. Mereka menghadapi berbagai rintangan serta menanggung berbagai cobaan. Banyak sekali tulisan di berbagai media massa saat itu yang bernada memojokkan dan memfitnah aktivitas mereka. Walaupun demikian, semua itu tidak sedikit pun menghambat aktivitas dakwah mereka. Dakwah Ikhwanul Muslimin di Ismailiah yang hanya membutuhkan waktu beberapa tahun, berkembang sangat pesat.¹⁵¹

Kehadiran Hasan al-Banna di Kairo bertepatan dengan masa gejolak politik dan intelektual serta situasi tidak stabil masyarakat yang menandai tahun 1920-an di Mesir. Ia menemukan problem politik yang menurutnya cukup serius: perebutan kekuasaan di Mesir antara Partai Wafd dan Partai konstitusi Liberal (*Hizb al-Ahrâr al-Dustûriyyah*), hiruk pikuk perdebatan politik, yang menimbulkan perpecahan yang muncul pasca revolusi 1919. Berangkat dari keyakinan bahwa masjid saja tidak cukup untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas, al-Banna mengorganisir sekelompok mahasiswa dari al-Azhar, dan Darul Ulum yang tertarik mengikuti pelatihan untuk berceramah dan penyuluhan. Beberapa mahasiswa setelah menjalani keprihatinan, didelegasikan ke seluruh pelosok Mesir untuk melaksanakan tugas-tugas dan profesi mereka, dan tidak hanya menyebarkan

¹⁵¹ Umma Farida, "Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik Di Mesir," *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014): 53–54.

dakwah Islam, tetapi juga menyemaikan gagasan pembentukan Gerakan Ikhwanul Muslimin.¹⁵²

Di dalam dakwah Hasan Al-Banna beliau mempunyai suatu wacana yaitu *Majmu'at al-Rasail* Hasan Al-Banna terbagi kepada pesan dakwah akidah, pesan dakwah syariah dan pesan dakwah akhlak. *Pertama*, Pesan Dakwah Akidah dalam Wacana Teologi. Hasan Al-Banna, mencoba membuka pikiran akan arti kehidupan setiap manusia dengan nilai Ketuhanan. Hasan Al-Banna berusaha membangun secara sistematis (*systematic reconstruction*) bidang teologi, filsafat dan ilmu-ilmu sosial dalam wilayah pemikiran Islam. Hasan Al-Banna mencoba keluar dari ruang perkembangan yang sempit, membuka diri kepada kemodernan sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Pembahasan akidah bukan saja tertuju pada masalah-masalah yang wajib diimani, akan tetapi juga meliputi masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya, misalnya syirik (menyekutukan Allah), ingkar dengan adanya Tuhan. Semua



itu Hasan Al-Banna ungkapkan sebagai bahan untuk menjadikan sistem kemasyarakatan yang memurnikan akidah dalam kehidupannya.

¹⁵² Sulaiman, "Ikhwanul Muslimin Dan Politik Kenegaraan Mesir," 2.

Kesadaran Ketuhanan hendaknya menggiring masyarakat baik sebagai aktivis organisasi maupun masyarakat umum untuk senantiasa mengagungkan Allah Swt. Pernyataan ini merupakan bagian dari isyarat dalam menguatkan gerakan dengan nilai-nilai ketuhanan dan menjadi suatu pengingat akan tujuan sesungguhnya dari pencapaian hidup. Nilai keimanan sebagai wahana penting bagi pelaku dakwah dalam menginternalisasi ajaran Islam. Titik kelemahan pemikiran teologi Islam klasik terletak pada kekurangan yang dimiliki terkait kenyataan atau realitas sosial empirik kehidupan manusia yang selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maka dari itu, seorang pemikir Islam abad ke-20.¹⁵³

Fase perkembangan Ikhwanul Muslimin dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Di dalam

gambar 1 5 sumber : suara.com

bukunya Ustman Mu'iz Ruslan dengan judul *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin* (2000) terbagi menjadi empat fase antara lain:

1. Fase Perintisan (1928-1932)

Konsentrasi al-Banna pada fase awal ini lebih tertuju pada gerakan dakwah dan tarbiyahnya. Ia menginginkan agar dakwahnya tidak terbatas pada kaum muslimin, tetapi menjadi dakwah yang universal. Segera setelah keenam pekerja yang berbaiat kepadanya, mereka melakukan pembangunan kantor pusat Ikhwan di Ismailia. Keberhasilan dakwah Islamiyah dapat dilihat dari: Bidang pengajaran, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yaitu berdirinya madrasah *tandzib*, berbagai sekolah *ma'had*, serta forum kajian dan ceramah, penerbitan yaitu majalah *al-Fath*. Program madrasah *tahdzib* mencakup tiga aspek yaitu; *pertama*, aspek ilmiah yang meliputi studi-studi

¹⁵³muhammad hanif fuadi, "Pesan Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Buku Majmu'at Arrisalah" (2017): 335.

keislaman (*tilawah* Al Quran, hukum-hukum *tajwid*, menghafal sebagian ayat beserta tafsirnya, menghafal hadis beserta sarahnya, mengenal adab Islam dan mengkaji *sirah* nabi dan sejarah Islam). *Kedua*, program amaliyah yaitu memberi tugas kepada para peserta untuk praktek mengajar dan menyampaikan ceramah di ruang kelas. *Ketiga*, aspek sosial dengan cara membaur, menjalin persaudaraan, dan saling membantu diantara para peserta, dalam berbagai sektor kehidupan. Madrasah ini, merupakan kegiatan *takwiniyah* (pembentukan) pertama yang terorganisir yang bersifat *jam'i* dalam Ikhwanul Muslimin.¹⁵⁴

2. Fase Pembinaan dan Perkembangan (1932-1939)

Kantor pusat berpindah ke Kairo pada tahun 1932, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan kependidikan dan tabligh yang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Forum kajian dan ceramah di masjid-masjid, pada tahun 1939, mereka mengadakan kajian hari selasa yang dikenal dengan *Hadits Tsulasa*, kemudian dibuka kajian pekanan (mingguan) pada hari kamis, khusus untuk mahasiswa. Selain itu, mereka juga mendirikan unit kemahasiswaan, menfokuskan dakwah di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, mereka juga membentuk asosiasi mahasiswa.
- b. Ikhwan menerbitkan Risalah Mursyid 'Am (dua edisi), kemudian menerbitkan surat kabar mingguan Al Ikhwan Al Muslimin mulai 22 Shafar 1352H (1932) sampai November 1938, menerbitkan An Nadzir (majalah politik mingguan) pada tahun 1938 dan beberapa risalah lainnya.
- c. Mereka mendirikan cabang-cabang organisasi di Kairo dan berbagai daerah, sehingga pada tahun 1938 jumlahnya telah

¹⁵⁴ maria ulva, "Sejarah Dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin," 217.

mencapai lebih dari 300 cabang yang masing-masing memiliki sekolah, perpustakaan dan klub olahraga.

Selain hal itu, pengaruh Ikhwan maupun misi publik ambisius al-Banna membawanya terlibat dalam politik nasional. Pada tahun 1936, dia menulis surat kepada raja, perdana menteri, dan penguasa Arab lainnya, untuk mendorong mereka mempromosikan tatanan Islam, dua tahun kemudian, Banna menyeru kepada raja membubarkan partai-partai politik di Mesir, karena partai-partai tersebut korupsi dan berdampak memecah belah negara.

3. Fase Pembinaan Dan Perjuangan (1939- 1952)

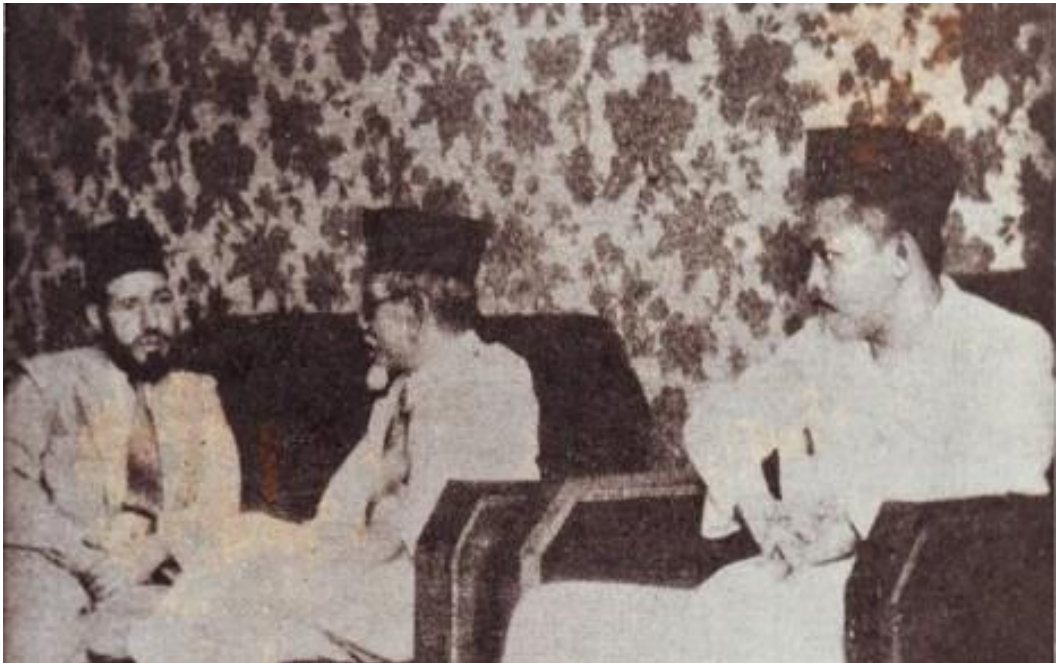
Ikhwan memanfaatkan terjadinya perang dunia ke II (kesibukan penguasa dan penjajah) untuk mengokohkan usaha menyempurnakan berbagai unsur kekuatan dalam rangka menyampaikan dakwah Ikhwan kepada semua individu di Mesir, membentuk cabang-cabang Ikhwan di setiap desa dan kota, dan mengikat mereka yang komitmen kepada dakwah dengan ikatan yang kuat.¹⁵⁵

2.3 Perkembangan Ikhwanul Muslimin di Indonesia

Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Demikian tertulis dalam buku sejarah kemerdekaan Indonesia. Tapi, buku-buku sejarah umumnya tak menjelaskan lebih lanjut, mengapa dan bagaimana Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dari negara lain, merupakan syarat penting berdirinya sebuah negara. Dan, untuk ini, bangsa ini pantas berterima kasih kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Sebab, merekalah yang melobi agar pemerintahnya mendukung kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

¹⁵⁵ Ibid., 218–219.

Ikhwanul Muslimin yang saat itu jaringannya telah tersebar, juga menggalang dukungan-dukungan negara Arab lainnya untuk mendukung ke merdekaan Indonesia. Dan, setelah Mesir, negara-negara Timur Tengah lain pun mendukung kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin Mesir dan negara-negara Arab saat itu, bahkan membentuk Panitia Pembela Indonesia.



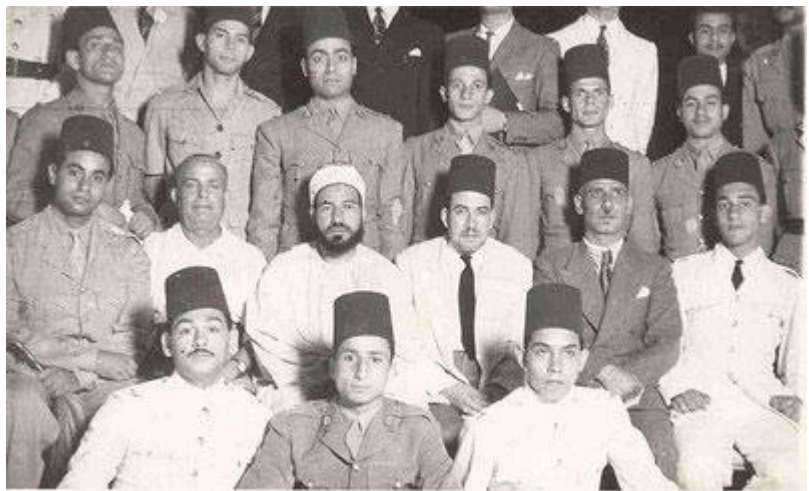
gambar 1 7 sumber: berita wawancara- blogger

Mereka mendorong pembahasan soal isu Indonesia di berbagai lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan Liga Arab. Dalam bukunya, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*, Zein Hassan menulis bahwa pengakuan kemerdekaan itu, pada akhirnya membuat posisi Indonesia setara dengan negara-negara lainnya-termasuk Belanda dalam perjuangan diplomasi internasional.

Proklamator Bung Hatta pun menyatakan, "Kemenangan diplomasi Indonesia dimulai dari Kairo. Karena, dengan pengakuan mesir dan negara- negara Arab lainnya terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, segala jalan tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau memungkiri janji, sebagai selalu dilakukannya di masa-masa yang lampau." Peran Ikhwanul Muslimin dalam

kemerdekaan Indonesia, itu, masih dapat ditelusuri jejaknya dalam artikel bertajuk Ikhwanul Muslimin di Wikipedia.

Di sana dicantumkan foto-foto tokoh bangsa seperti Sjahrir dan H Agus Salim yang menemui Mursyid Am Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, untuk menyampaikan terima kasih atas dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Saat itu, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, Ikhwanul Muslimin kerap mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, termasuk menghalau kapal-kapal Belanda yang melewati Terusan Suez. Terutama, saat Indonesia sedang dalam revolusi fisik melawan kembalinya Belanda.



gambar 1 8 sumber: pksklatenutara. Blogspot. com

Gerakan Ikhwanul Muslimin ini dalam waktu cepat berkembang dan merebut simpati-simpati

terutama kalangan mahasiswa dan kalangan professional muda yang berpendidikan moder, tidak hanya di Mesir, tapi juga dari penjajahan structural dan cultural, serta dalam waktu bersamaan memelopori Gerakan pemurnian aktifitas keagamaan membuat daya Tarik tersendiri dari gerakan ini. Tidak terkecuali adalah Indonesia, sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim terkena imbas globalisasi pemikiran keislaman yang dipelopori Ikhwanul muslimin. Banyak Gerakan Islam di Indonesia yang merupakan konsep pemikiran Ikhwanul Muslimin. Di era 1970-1980 an, pola-pola pembinaan gerakan-gerakan Islam di Indonesia sudah mengacu pada pembinaan yang cukup populer kala itu adalah Usrah.

Namun sangat disayangkan istilah Usrah ini kemudian mengalami pemburukan cerita yang berakhir pada pembusukan istilah. Hal ini terjadi karena para anggotanya yang eksklusif dan cenderung tertutup dari dunia luar.¹⁵⁶



gambar 1 9 sumber : republika.co.id

Sementara di sisi kehidupan yang lain, tepatnya di kampus, di waktu yang hampir bersamaan pola pembinaan Ikhwanul Muslimin juga diterapkan. Ihtwal digunakannya system Unsroh dalam pola pembinaan mahasiswa muslim di kampus-kampus dipelopori oleh Ir. Imaduddin Abdul Rahim atau yang akrab dengan sapaan Imad. Hal ini berawal dari masjid ITB Bandung. Kala itu sekitar awal tahun 1970an bang Imad yang menjabat sebagai ketua *Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam* (LDM), sebuah Lembaga otonom yang berada di bawah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), mencoba menggagas sebuah konsep pengkajian Islam yang sistematis dan terarah. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Umum LDMI, beliau juga terpilih sebagai sekjen IIFSO (Internasional Islamic Federnation of Student Organization).¹⁵⁷

¹⁵⁷ miftahuddin, "Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Di Indonesia" (UIN Sunan Gunung Djati 2008), 9-10.



3.1 Kesimpulan

Kesimpulannya yang dapat di ambil ialah bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi dari Mesir yang didirikan oleh Hasan Al banna yaitu seorang yang genius dalam akademis juga di dalam dakwah nya, sedangkan itu organisasi ini di didirikan pada 1928 dan organisasi ini di

bentuk atas semangat dakwah muslimin yang sadar akan banyaknya penindasan dari para pemerintah di zaman itu.

Kemudian oraganasasi ini hadir tidak hanya di mesir saja akan tetapi dengan perkembangan yang pesat ikhwanul muslimin hadir di berbagai negara dengan bertekad yang kuat untuk menjalin persaudaraan dengan di namakan ikhwanul muslin yang berarti sodara bagi kaum muslim, dan pada ujung pembahasan ini, ikhwanul muslimin yang juga menjadi saksi kemerdekaan Indonesia pada 1945 bisa sampai ke Indonesia dengan melalui aktivis-aktivis dakwah dan juga hubungan yang erat anatara satu sama yang lainnya .

3.1 Saran

Penulis menyadari betapa banyaknya kekurangan dan juga kesalahan yang di buat dalam makalah ini, maka dari itu penulis meminta maaf atas kekurangannya dan juga penulis sangat membutuhkan saran atau kritik dari penilai untuk kedepan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- chalfan chairil. *Ikhwanul Muslimin Di Empat Masa Pemerintahan Di Mesir*. depok: universitas indonesia, 2014.
- Farida, Umma. "Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik Di Mesir." *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2014): 45-70.
- Fuadi, M. Hanif. "Pesan Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Buku Majmu'at Al-Rasail." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 2 (2017): 325-340.
- harun husein. "Peran Ikhwanul Muslimin Untuk Kemerdekaan Indonesia," 2012.
- karuru p. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian" 2 (2013): 1.
- maria ulva. "Sejarah Dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin" (2016): 217.
- miftahuddin. "Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- muhammad hanif fuadi. "Pesan Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Buku Majmu'at Arrisalah" (2017): 335.
- Prof. Dr. Suryana, MSi. "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Universitas Pendidikan Indonesia* (2012): 1-243.

sakinatul hayati. "Peranan Imam Syahid Hasan Al-Banna Dalam Mengembangkan Ikhwanul Muslimin Di Mesir Pada Tahun 1928-1949" 5 (2015).

Sulaiman, Rusydi. "Ikhwanul Muslimin Dan Politik Kenegaraan Mesir" (1998).

sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: pustaka setia, 2014.

susanto zuhri. "Historiografi Dan Metodologi Sejarah" 2 (1996).

PERKEMBANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI KOTA BOGOR TAHUN 2010-2017

1.1 Latar Belakang

Hizbut Tahrir (HT) atau Partai Pembebasan adalah sebuah organisasi politik yang berdiri di atas akidah Islam. HT bertujuan untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam dengan cara menegakkan Negara Khilafah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad. Untuk merealisasikan tujuan yang mulia itu, Hizbut Tahrir mengadopsi metode yang ditempuh oleh Nabi Muhammad saw.¹⁵⁸ HT mempunyai keyakinan, hanya dengan institusi politik yang sah sajalah umat Islam dapat merebutkembali posisi strategis seperti pada masa-masa kejayaan beberapa abad yang lampau.¹⁵⁹ Sasaran sekundernya adalah negara-negara yang dianggap menindas umat Islam.¹⁶⁰ Didirikan pada tahun 1953 di Yerusalem Timur oleh 'Taqiyuddin an-Nabhani. Pada tahun 1977 Taqiuddin an-Nabhani wafat dan digantikan oleh Abdul Qadeem Zaloom, sampai beliau wafat pada April 2003, Ata Abu-l-Rushta, mantan juru bicara Hizbut

¹⁵⁸ *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, ed. by M. Ramadhan Adi. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019). Hlm. 181

¹⁵⁹ Syamsul Arifin, 'Gerakan Keagamaan Baru Dalam Indonesia Kontemporer: Tafsir Sosial Atas Hizbut Tahrir', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14.1 (2014), 117 <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.80>>. hlm. 130.

¹⁶⁰ Michael Whine, 'Is Hizb Ut-Tahrir Changing Strategy or Tactics?', *Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper. Washington DC, Hudson Institute Center for Eurasian Policy*, 1, 2006, 1–11. Hlm. 8.

Tahrir di Yordania, menggantikannya hingga saat ini.¹⁶¹

Hizbut Tahrir telah menyebar di 48 (empat puluh delapan) negara, baik di negara menganut Islam seperti Kazaktan, Uzbekistan, Pakistan, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Irak, Malaysia dan Indonesia. ataupun negara yang minoritas islam seperti Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Kanada, dan Amerika Serikat.¹⁶² Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia yaitu sekitar sekitar tahun 1982. Berawal dari pertemuan antara Abdullah Bin Nur, dan orang Lebanon aktivis Abdurahman al-Baghdadi yang saat itu sedang belajar di Australia. Abdurrahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali di mana banyak siswanya menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor.¹⁶³ Mahasiswa yang telah menerima dakwah tentang seluk beluk HT, memiliki tugas memperkenalkan HT kepada

¹⁶¹ Emmanuel Karagiannis and Clark McCauley, 'Hizb Ut-Tahrir Al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group That Remains Nonviolent', *Terrorism and Political Violence*, 18.2 (2006), 315–34 <<https://doi.org/10.1080/09546550600570168>>.

¹⁶² Sudarno Shobron, 'Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia', *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 15.1 (2014), 44–62 <<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4773>>. Hlm 47.

¹⁶³ Mohamed Nawab Mohamed Osman, 'Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia', *S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)*, 171, 2009, 1–34 <<https://doi.org/10.7202/003033ar>>. Hlm. 4.

aktivis mahasiswa lain di luar perguruan tinggi yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus (LDK).¹⁶⁴

Pada awal Reformasi Hizbut Tahrir telah menjadi organisasi yang paling menonjol menuntut pembentukan khilafah global di bawah penerapan syariah. Keanggotaannya di Indonesia diperkirakan beberapa ratus ribu. Organisasi ini mendapat dukungan utama dari kalangan pelajar dan profesional terdidik di pusat-pusat perkotaan Indonesia. Tuntutan mereka untuk melawan apa yang mereka klaim sebagai sistem sekuler-kapitalis-nasionalis sangat kontroversial, tetapi baik jumlah keanggotaan dan kelompok orang yang mendukung ideologinya terus meningkat.¹⁶⁵

Pada tahun 2001, mereka menambahkan 'Indonesia' ke nama partainya yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun perubahan ini tidak dimaksudkan untuk membuat partai menjadi otonom atau menjadi membatasi fokusnya ke Indonesia saja. Mereka mungkin satu-satunya organisasi di Indonesia yang hanya merupakan cabang lokal (atau 'provinsi') gerakan internasional,

¹⁶⁴ Shobron. Hlm. 48.

¹⁶⁵ Madawi AL Rasheed, Carool Keristen, *Demystifying the Caliphate* (Oxford: Oxford University Press, 2015). hlm. 186.

kecuali organisasi non-pemerintah seperti Transparansi Internasional.¹⁶⁶

HTI hadir diranah publik melalui berbagai publikasi, khususnya jurnal mingguan Al-Islam dan majalah bulanan Al-Wa'ie, yang ditujukan untuk seluruh Masyarakat. Ini juga mencetak banyak terjemahan melalui rumah penerbitannya, Hizbut Tahrir Indonesia Press, yang mendistribusikan buku-buku tentang sejarah kekhalifahan. Hadir di Internet, organisasi secara teratur memperbarui bagian berita dari situs webnya dan terbukti sangat aktif di Facebook dan media sosial lainnya Jaringan.¹⁶⁷ Mereka juga melatih rekrutan mereka melalui sistem 'sel' (halqah).¹⁶⁸ Hizbut Tahrir menerima keanggotaan untuk setiap Muslim, pria atau wanita, terlepas dari apakah dia berasal dari Arab atau bukan, berkulit hitam atau putih. Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi dakwah untuk semua Muslim dan menyerukan kepada umat untuk meneruskan pesan Islam dan untuk mengadopsi dan menetapkan semua aturan Islam tanpa memandang ras, ibu, warna kulit atau aliran pemikiran. Hizbut

¹⁶⁶ Ken Ward, 'Non-Violent Extremists? Hizbut Tahrir Indonesia', *Australian Journal of International Affairs*, 63.2 (2009), 149–64 <<https://doi.org/10.1080/10357710902895103>>. hlm. 90.

¹⁶⁷ Delphine Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy* (New York: Routledge, 2015) <<https://doi.org/10.4324/9781315764986>>. hlm. 90.

¹⁶⁸ Yang artinya (lingkaran belajar) yang terdiri dari kurang dari lima orang. Di bawah pengawasan seorang musrif (pengawas; ketua dari sebuah lingkaran belajar).

Tahrir melihat segala sesuatu dari sudut pandang Islam¹⁶⁹

Hizbut Tahrir meyakini bahwa kebangkitan ummat Islam akan datang ketika umat menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan Khilafah Islamiyah, dan kehancuran umat Islam dimulai ketika umat mengabaikan penerapan syariah Islam, serta hanya menerapkan Islam dalam ritual ibadah saja.¹⁷⁰

Pada tanggal 8 Mei 2017, seorang purnawirawan TNI Jenderal Wiranto, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa setelah mengkaji dengan cermat, pemerintah akan memulai proses hukum untuk mengumumkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi organisasi terlarang di seluruh negeri. Ia mengatakan alasan pelarangan organisasi tersebut karena ideologi HTI yang mempromosikan kekhalifahan Islam global bertentangan dengan ideologi nasional Indonesia Pancasila.¹⁷¹ Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah di Undang-Undang Nomor (Perppu) 2

¹⁶⁹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014). Hlm. 40.

¹⁷⁰ Felix Y Siau, *Khilafah Remake* (Jakarta: Al Fatih Press, 2015). Hlm. 291.

¹⁷¹ Alexander Raymond Arifianto, 'Banning Hizbut Tahrir Indonesia : Freedom or Security?', 2017, 1-3 <<http://hdl.handle.net/10220/42457>>. Hlm. 2.

Tahun 2017¹⁷² yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Sipil (CSO),¹⁷³. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melarang organisasi yang “menyebarkan ajaran ideologis atau filosofis yang melanggar Pancasila dan UUD 1945”, salah satunya HTI. Pasca terbitnya Perppu organisasi tersebut, HTI dan sejumlah pihak mengajukan protes. Bahkan HTI menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perppu yang dikeluarkan Pemerintah.¹⁷⁴ Dengan mengeluarkan undang-undang semacam ini, pemerintah menanggukkan undang-undang normal atau memperkenalkan undang-undang lain untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kehidupan.¹⁷⁵

1.2 Rumusan masalah

¹⁷² Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017*, 2017 <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf>.

¹⁷³ Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, DPR.Go.Id*, 2013.

¹⁷⁴ Mohamad Zaim, ‘Dynamics Development of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and Indonesia’s Economic Reality’, *Journal of Philosophy, Culture and Religion*, 41 (2019), 13–19 <<https://doi.org/10.7176/jpcr/41-03>>. Hlm. 13.

¹⁷⁵ Ahmad Najib Burhani, ‘The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia’, *ISEAS Perspective*, 71, 2017, 1–10 <https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_71.pdf>. hlm.

1. Apa tujuannya penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2011-2017 ?
2. Bagaimana strategi penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2011-2017 ?
3. Bagaimana optimalisasi media sebagai sarana penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2010-2017 ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui tujuan penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2011-2017.
2. Untuk mengetahui strategi penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2011-2017.
3. Untuk mengetahui optimalisasi media sebagai sarana penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2010-2017.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan “telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian”. Penulis telah melakukan observasi ke pelbagai tempat guna mencari sumber-sumber yang terkait dengan judul

penelitian yang penulis angkat. Hasil dari observasi tersebut, penulis menemukan beberapa literatur yang menginformasikan atau berkaitan dengan pergerakan dakwah HTI di Kota Bogor dari tahun 2010 sampai sengan 2017 adapun beberapa sumber seperti buku

Nidzām al-Islām,

Buku ini berisi tentang peraturan hidup dalam Islam. Yang dimana membahas tentang peraturan hidup dalam islam dari individu sampai menyeluruh termasuk rancangan Undang Undang Dasar

Al- Takattul al-Hizbī,

Buku yang membahas mengenai pendirian partai politik yang mendirikan dan melestarikan daulah islam, buku ini juga membahas bahwa partai yang berlandasakan Islam akan terus mengemban dakwah Islam di negri negri Islam dan disetiap penjuru dunia

Mafāhim Hizb al- Tahrīr

Buku ini membahas tentang ide-ide HIzbut Tahrir, mengenai partai polirik yang berideologi Islam, yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan Kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Islam, yang akan menerapkan sistem Islam serta mengemban dakwah ke seluruh dunia.

1.5 Metode

A. Tahapan Heuristik

Berasal dari kata Yunani heuristik, yang mencari atau mengumpulkan sumber. Adapun mengenai tanggal tentunya maksud dari sumber berupa catatan, testimoni dan fakta-fakta lain yang menjadi gambaran dari sebuah acara. Materi yang digunakan sebagai sumber cerita sebagai alat, bukan tujuan. Dengan kata lain, orang harus mengetahui tanggalnya terlebih dahulu untuk menulis tanggalnya. Penelitian sumber adalah ilmu lain yang dikenal sebagai heuristik. Tidak mungkin membuat sejarah tanpa adanya sumber sejarah¹⁷⁶

a. Sumber kebendaan atau material (material sources).

Yaitu sumber sejarah yang berupa benda yang dapat dilihat secara fisik. Sumber ini dapat dibedakan menjadi sumber tertulis (record), seperti buku-buku yang digunakan oleh anggota seperti Nidzām al-Islām, al-Takattul al-Hizbī, Mafāhim Hizb al- Tahrīr dan lain lain. Serta media seperti Media Ummat, Buletin Al islam dan majalah Al Wa'ie.

b. Sumber non-kebendaan atau immaterial (immaterial sources).

¹⁷⁶ M Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 219.

Seperti aktivitas harian seperti halaqah ,dam aktivitas besar seperti megadakan acara nasional seperti Muktamar Khilafah pada tahun 2013, Konfrensi Islam dan Peradaban 2014 Rapat dan pawai akbar pada tahun 2015, dan

B. Tahapan Kritik

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa benda, sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern maupun ekstern.¹⁷⁷

Sumber primer berupa buku media cetak yang biasa yang digunakan oleh anggota dari HTI seperti :

1. Taqiuddin an-Nabhani. 2004 *Nidzām al-Islām*,
2. Taqiuddin an- Nabhni. 2016 *Al-Takattul al-Hizbī*,
3. Taqiuddin an-Nabhani. 2001 *Mafāhim Hizb al-Tahrīr*

Serta acara acara nasional seperti :

1. Muktamar Khilafah
2. Konfrensi Islam dan Peradaban 2014.
3. Muktamar Khilafah 2015.

¹⁷⁷ Wahyudi. Hlm. 223.

4. Muktamar Tokoh Umat 2016.

C. Tahapan Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas. Itu sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subjektivitas penulisan sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi itu dua macam, yaitu analisis dan sintesis.¹⁷⁸

Analisis berarti menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. Didalam buku buku dan media yang digunakan oleh anggota organisasi HTI di kota Bogor dari Tahun 2010 sampai dengan 2017 berisi tentang kejayaan kejayaan islam pada masa kekhlifahan pada masa lampau, bagian-bagian dari kekhlifahan, dan buruknya system demokrasi.

Sintesis berarti menyatukan. Setelah ada data buku buku dan media. juga pendapat dari tokoh tokoh yang merupakan anggota dari HTI melalui dari

¹⁷⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiarawacana, 1995). Hlm. 78.

media serta acara-acara besar bisa temukan fakta bahwa organisasi tersebut sangat merindukan kejayaan islam seperti pada masa kekhalifahan.

Pendekatan struktural fungsional dapat digunakan untuk membahas lembaga-lembaga dakwah yang sudah mapan, seperti lembaga pesantren, ormas sosial keagamaan, dan partai politik berbasis keagamaan.¹⁷⁹

D. Tahapan Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah melalui fase heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan. Pada Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, Tujuan, Kajian Pustaka dan metode penelitian. Pada Bab II berisi pembahasan tentang tujuan penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2011-2017. Strategi penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2011-2017. Optimalisasi media sebagai sarana penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2010-2017. Dan pada Bab III berisi kesimpulan dan saran.

¹⁷⁹ Acep Aripudin, *Sosiologi Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). Hlm. 10.

1.1 Tujuan penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor Tahun 2010-2017.

Islam memandang semua orang dan menganggap bahwa semua orang memiliki pandangan yang sama. Visi Hizbut Tahrir yang sama ketika kita melihat masyarakat, terutama dalam hal berdakwah.¹⁸⁰ Tujuan HTI melakukan dakwahnya di Kota Bogor adalah mengingatkan Kembali kepada seluruh umat muslim di Kota Bogor untuk Kembali kedalam kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Islam.¹⁸¹ HTI adalah organisasi yang paling vokal dan secara ekstensif menyebarkan perlunya pemulihan khilafah (kekhilifahan) tunggal dan

¹⁸⁰ Muhammad Firdaus, 'Pola Komunikasi Aktuvis Hizbut Tahrir Dalam Mengembangkan DaMengembangkan Dakwah Islam', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8.3 (2018). Hlm. 333.

¹⁸¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir* (Jakarta: HTI-Press, 2001). Hlm. 140.

universal bagi semua Muslim di dunia.¹⁸² Karena HTI adalah organisasi dakwah yang berasaskan ideologi Islam, berpedoman dengan Aqidah Islamiyah serta ide-ide yang terlahir dari Aqidah Islamiyah tersebut, mengadopsi hukum-hukum syara' yang digali dengan benar dari sumber-sumber hukum syara. Hizbut Tahrir meneladani *thariqah* (metode) yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, dalam penegakan Daulah Islamiyah dan menjadikannya sebagai *thariqah* untuk mengembalikan Khilafah. Hal itu dilakukan karena metode Rasulullah.¹⁸³ Islam adalah agama yang sempurna. Didalamnya terdapat berbagai macam Interaksi antar sesama manusia, seperti sistem sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini meniscayakan adanya negara yang akan melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut kepada manusia.¹⁸⁴ Sebagai umat muslim memiliki kewajiban menerapkan kehidupan islam secara *kaffah* salah satunya adalah menegakan negara khilafah.¹⁸⁵

¹⁸² Burhanuddin Muhtadi, 'The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia', *Asian Journal of Social Science*, 37.4 (2009), 623–45 <<https://doi.org/10.1163/156853109X460219>>. Hlm. 630.

¹⁸³ M Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah Dan Khilafah Biografi Ringkas Tokoh Senior Huzbut Tahrir* (Bogor: Al Azhar Press, 2012). 1.

¹⁸⁴ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014). Hlm. 114.

¹⁸⁵ Syaikh Ali Belhaj, *Menegakkan Kembali Negara Khilafah Kewajiban Terbesar Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015). Hlm. 21.

Hal ini demikian itu merupakan fakta agama yang tidak bisa di sangkal lagi. Karaena telah dilaksanakan oleh ummat muslim sejak wafatnya Rasulullah SAW Ketika memilih Abu Bakar sebagai khalifah.¹⁸⁶ Dalam ketatanegaraan Islam, sistem Khilafah dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memiliki *mafhum* (pemahaman) yang berbeda, tetapi memiliki *mashadaq* (substansi) yang sama. Artinya, sistem khilafah dan sistem pemerintahan Islam secara bahasa memiliki pengertian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Disebut sistem pemerintahan Islam karena bertujuan atau berorientasi pada terwujudnya syariat Islam serta dibangun atas prinsip-prinsip Islam.¹⁸⁷ Didalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki

¹⁸⁶ Muhammad Dhia'uddin Ar-Rais, *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern* (Jakarta: Penerbit Lantera, 2002). Hlm. 233.

¹⁸⁷ K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCISOD, 2017). Hlm. 41

sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.¹⁸⁸

Khilafah adalah sebutan yang diberikan kepada sistem pemerintahan Islam yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Dengan berlandaskan semata-mata pada Al-Qur'an dan Hadits.¹⁸⁹ Negara Khilafah yang ingin ditegakkan menjadi sebuah negara adalah yang menyampaikan kebenaran kepada umat manusia serta menyampaikan petunjuk kepada manusia.¹⁹⁰ Sejauh ini mungkin yang sesuai bagi ummat yang ingin menggunakan penalaran Syariat Islam untuk memastikan apa yang disyaratkan oleh hukum Islam.¹⁹¹ Metode untuk menjaga dan memelihara syariat Islam adalah hukum Islam yang bisa menjamin tegaknya mabda' Islam yang sebelumnya telah berhasil ditegakkan. Berbeda dengan hukum metode penerapan Islam, hukum ini berkaitan dengan jaminan tegaknya hukum Islam yang sebelumnya belum bisa ditegakkan, dan baru bisa ditegakkan setelah adanya hukum tersebut.¹⁹² Akan

¹⁸⁸ M. Zainuddin, 'ISLAM DAN DEMOKRASI (Telaah Implementasi Demokrasi Di Negara Muslim)', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 4.2 (2018), 73 <<https://doi.org/10.18860/ua.v4i2.6127>>. hlm. 78.

¹⁸⁹ *Khilafah Solusi*, ed. by Abu Faiz (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019). Hlm. 15.

¹⁹⁰ Zahid Ivan Salam, *Negara Khilafah Dan Politik Luar Negeri* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015). Hlm 82.

¹⁹¹ Noah Feldman, *The Fall And Rise of The Islamic State* (New Jersey: Princeton University Press, 2009). Hlm. 120.

¹⁹² Hafidz Abdurahman dkk, *Islam Rahmatan Lil Alamin* (Jakarta: Al Fatih Press, 2018). Hlm. 84.

tetapi sebagian besar Masyarakat beranggapan, tidak kurang di antaranya kalangan muslim, menganggap kesan kejam, *incompatible* dan *off to date* dalam konsep hukum Islam.¹⁹³

Padahal hukum Islam memandang manusia itu dengan sifatnya sebagai manusia, maka syariat Islam itu diarahkan kepada manusia. Walaupun demikian, bukan berarti Islam itu menganggap atau menggeneralisir seluruh manusia itu keadaannya sama. Islam juga memperhatikan karakteristik individual yang ada, yang menuntut pemecahan sesuai dengan realitas yang ada. Contohnya, tatkala mengatur relasi antara lelaki dan wanita, hukum islam memperhatikan sifat-sifat maskulinitas dan feminitasnya yang mengatur keduanya secara langsung. Dan disini tidak ada perbedaan atau diskriminasi.¹⁹⁴ Karena Islam memandang masyarakat sebagai sebuah kombinasi dari sekumpulan manusia, yang memiliki perasaan dan pemikiran yang sama, serta diatur dengan sistem yang sama.¹⁹⁵

¹⁹³ Ismanto and Suparman, 'Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial', *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 3.2 (2020), 67-88 <<https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>>. hlm. 68.

¹⁹⁴ Yasin Bin Ali, *Negara Khilafah Dan Kaum Minoritas* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015). Hlm 82-83.

¹⁹⁵ Ja'far Muhammad Abu Abdullah, *Negara Khalifah Islam Mewujudkan Janji Rasulullah SAW* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019). Hlm. 143.

Salah satu cara untuk menegakkan Daulah Islam adalah dengan memimpin dakwah Islam dan berusaha menerapkan kehidupan Islam. Untuk itu diperlukan upaya untuk mempersatukan negara-negara Islam, karena Salah satu cara untuk menegakkan negara Islam adalah dengan memimpin dakwah Islam dan berusaha melanjutkan kehidupan Islam. Untuk itu diperlukan upaya untuk mempersatukan negara-negara Islam, karena umat Islam adalah masyarakat yang tidak lebih dari sekelompok orang yang disatukan oleh suatu keyakinan yang bersumber dari aturan Islam. Oleh karena itu, terjadinya aktivitas di suatu negara Islam mempengaruhi wilayah Islam lainnya. Dalam hal ini, perasaan dan pikiran juga diprovokasi. Oleh karena itu, semua negara Muslim harus disampaikan di satu negara dan khotbah harus disampaikan ke seluruh negeri untuk mempengaruhi masyarakat.¹⁹⁶

Persatuan ummah telah lama menjadi kesepakatan ideal. Hingga saat ini dunia Muslim terpecah menjadi kerajaan dan republik, yang perbatasannya dibuat sewenang-wenang oleh kekuatan Barat.¹⁹⁷ Setelah kekhalifahan Utsmani runtuk pada tahun 1924 banyak dari Negara-negara Muslim mulai menggunakan sistem Demokrasi. Perkembangan demokrasi di negara-negara Islam

¹⁹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam* (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2019). Hlm. 332.

¹⁹⁷ Karen Armstrong, *Islam A Short History* (New York: Random House Publishing Group, 2002). Hlm. 159.

Arab begitu pesat. Meski berjalannya demokrasi di negara-negara Islam lebih lambat dari negara-negara non-Islam, tetapi tetap ada titik cerah dalam perkembangan demokrasi di dunia Islam.¹⁹⁸

Demokrasi merupakan perencanaan institusional, mencapai keputusan politik di mana individu – individu memperoleh perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. ¹⁹⁹ Prinsip demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dengan semboyan “ *from the people, by the people, and for the people*”, maka segala keputusan hukum dan politik merupakan “jerih payah” rakyat dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh badan legislatif dianggap mencerminkan kehendak umum dari seluruh rakyat.²⁰⁰

Dalam prakteknya rakyat memiliki hak untuk memberlakukan hukum konstitusional dan semua jenis produk yang diwajibkan oleh hukum. Selain itu, masyarakat juga berhak mencabut, menambah atau mengubah konstitusi dan ketentuan perundang-undangan.²⁰¹ Karenanya, rakyat berhak mengubah

¹⁹⁸ M. Bambang Pranowo, ‘Islam Di Indonesia: Mengusung Demokrasi Dengan Basis Budaya’, *Studia Islamika*, 13.1 (2006) <<https://doi.org/10.15408/sdi.v13i1.579>>. hlm. 155

¹⁹⁹ John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 1996). Hlm. 6.

²⁰⁰ Azis Taufik Hirzi, ‘Komparasi Ringkas Antara : Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah Dalam Islam’, *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, XXI.2 (2005), 250–61. Hlm. 254.

²⁰¹ Abdul Qadim Zulum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2019). Hlm. 26.

sistem pemerintahan di kerajaan menjadi republik atau sebaliknya, dan rakyat juga berhak mengubah sistem republik presidensial menjadi republik parlementer atau sebaliknya. Ini terjadi di Prancis, Italia, Spanyol, dan Yunani, misalnya. Di negara-negara ini, orang-orang mengubah sistem pemerintahan yang ada dari kerajaan menjadi republik dan dari republik menjadi kerajaan. Bahkan dalam sistem demokrasi, masyarakat berhak mengubah sistem ekonomi dari kapitalisme ke sosialisme atau sebaliknya. Masyarakat melalui perwakilannya memiliki hak untuk membuat undang-undang tentang diperbolehkannya pindah agama dari satu agama dan pindah agama ke agama lain atau bahkan kepercayaan non-agama (animisme / paganisme).²⁰² Hal ini dapat disebutkan di sini elemen demokratis itu sebagai berikut:

- 1) Ada pengakuan kesetaraan antara seluruh individu.
- 2) Nilai-nilai yang melekat pada individu-mengatasi nilai-nilai yang melekat pada negara.
- 3) Pemerintah merupakan pelayan masyarakat.
- 4) Ada aturan-aturan hukum.
- 5) Ada pengakuan atas nalar, eksperimentasi dan pengalaman.
- 6) Ada pengakuan mayoritas atas hak-hak minoritas.

²⁰² Abdul Qadim Zalum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan Dan Menebarluaskan* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019). Hlm 75-76.

7) Ada prosedur dan mekanisme demokratis sebagai cara mencapai tujuan bersama.²⁰³

Walau demikian sistem demokrasi sangat berbeda dengan sistem kekhalifahan. Karena dalam sistem Khilafah Allahlah yang membuat peraturan hidup bukan rakyat. Islam mengatur segala tingkah laku manusia. baik untuk dirinya maupun sesamanya.²⁰⁴ Diantaranya adalah tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk memeluk keyakinan lain, baik itu yang didasarkan pada agama yang diwahyukan secara asli, seperti Yudaisme dan Kristen, atau keyakinan ideologi lain, seperti Kapitalisme atau Sosialisme, atau keyakinan apa pun dari cara hidup apa pun. atau pemikiran apapun selain dari akidah Islam.²⁰⁵

Sumber utama dari undang-undang dasar dan undang-undang Islam adalah Al-Quran dan As-Sunah. Bukan yang lain. Tempat lahirnya adalah ijtihad para mujtahid. Khalifah akan melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijtihad tersebut dan memerintah rakyat untuk melaksanakannya. Kedaulatan menurut Islam hanya milik syara'.

²⁰³ Miftahul Huda, 'Kajian Atas Relasi Islam Dan Demokrasi', *Jurnal "el-Harakah*, 7. April (2005), 45–52. Hlm. 48.

²⁰⁴ Arief B. Iskandar, *Materi Dasar Islam Islam Mulai Akar Hingga Daunya* (Bogor: Al Azhar Press, 2015). Hlm. 114.

²⁰⁵ Houriya Ahmed & Hannah, *Hizb Ut-Tahrir Ideology and Strategy*, *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (London: The Centre for Social Cohesion, 2009) <<https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm308>>. hlm. 43.

Sedangkan ijtihad untuk menggali hukum-hukum syara' adalah hak bagi seluruh kaum Muslim, yang hukumnya fardlu kifayah. Akan tetapi hanya Khakifah saja yang berhak melegalisasi hukum-hukum syara' tersebut.²⁰⁶ Dari sini tampak jelas bahwa tidak ada pilihan bagi kaum Muslim dalam masalah penetapan hukum dan peradilan Semuanya dikembalikan kepada Allah Swt dan kepada Rasulullah saw. Inilah yang dimaksud dengan merujuk kepada Kitabullah yakni al-Quran, dan Sunnah Rasulullah saw.²⁰⁷ Menegakkan Khilafah adalah tugas yang luar biasa beratnya, melakukan perjuangan yang terus-menerus yang tidak mengenai lalai atau mundur, menuntut pengorbanan yang sangat banyak; dan untuk merealisasikannya sangat diperlukan keikutsertaan seluruh kaum muslimin.²⁰⁸

1.2 Strategi penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor Tahun 2010-2017.

Ketika opini masyarakat sudah terbentuk untuk menginginkan Islam yang muncul sebagai jawaban dari sebuah masalah yang ada, karena masyarakat sudah menyadari bahwa demokrasi adalah system yang rusak, maka tidak ada lagi yang

²⁰⁶ Taqiuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Islam* (Jakarta: HTI-Press, 2011). Hlm. 147.

²⁰⁷ Hafizh Shalih, *Mengadili Demokrasi* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010). Hlm. 80.

²⁰⁸ Abdurrahman Muhammad Khalid, *Soal Jawab Seputar Gerakan Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2015). Hlm. 179.

bisa menahannya. Agama lain saja memiliki filosofis bahwa kebohongan kalau disampaikan secara terus menerus itu akan menjadi kebenaran, seperti demokrasi atau pluralism disampaikan secara terus menerus, disampaikan lewat segala macam media, seperti media cetak dan sosial dan semua tokoh membicarakan tentang baiknya demokrasi maupun pluralisme akhirnya masyarakat menganggap hal itu baik.²⁰⁹ HTI memiliki pandangan bahwa demokrasi sebagai sistem yang *jahili* (ketidaktahuan) dan tidak Islami. Mereka meyakini bahwa manusia membuat hukumnya sendiri adalah perampasan langsung *hakimiyyah* (kedaulatan) Tuhan. Karena itu, mereka tidak akan memilih sistem pemilihan umum. Menurut mereka Muslim yang percaya pada demokrasi dianggap sebagai orang yang kufur, kafir, atau bahkan murtad, mereka yang telah menyimpang dari iman.²¹⁰

Menurut HTI ummat Muslim harus hidup di bawah Hukum Islam (*syariah*). Mereka sangat yakin bahwa kekuatan Barat akan terus-menerus bersekongkol melawan Islam. Beberapa kali, mereka menunjukkan bahayanya ummat Islam jika

²⁰⁹ A. Samsul Anwar, 'Aaktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bogor' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010). Hlm. 55.

²¹⁰ S. R. Valentine, 'Monitoring Islamic Militancy: Hizb-Ut-Tahrir: "The Party of Liberation"', *Policing*, 4.4 (2010), 411–20 <<https://doi.org/10.1093/police/paq015>>. Hlm 415

menggunakan ide-ide *kuffar*²¹¹ yang terus menerus yang bertujuan untuk mengusir Muslim dari iman mereka.²¹² Tujuan ini bukan hanya kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga satu-satunya cara untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil. Oleh karena itu, penerapan syariah oleh HTI menjadi suatu keharusan. Dengan pemahaman ini, HTI secara gamblang mendeklarasikan gagasan anti sekularisme dan mengampunayakan pelarangan sekularisme.²¹³ Oleh karena itu menjadi penting bagi Hizbut Tahrir untuk merebut opini publik, karena memang itu akan sangat mempengaruhi masyarakat kedepannya. HTI memperkuat kehadiran dan mobilisasi nya bersama program yang secara langsung menjangkau ke masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan kelompok sel, pembinaan kader potensial, dan kunjungan ke pimpinan.²¹⁴ Dengan pergerakan terarah tersebut dirancang berdasarkan kajian secara sungguh-sungguh terhadap keadaan lingkungannya. juga

²¹¹ *Kuffar* berarti 'orang-orang kafir', dan pada konsep ini Hizbut Tahrir membingkai visi dualistik tentang dunia yang terbagi antara *Darul Islam* (Tanah Islam) dan *Dar al-Kufr* (Tanah Kafir).

²¹² Elisa Orofino, 'Intellectual Radicals Challenging the State: The Case of Hizb Ut-Tahrir in the West', *Contemporary Social Science*, 10.4 (2015), 401–12 <<https://doi.org/10.1080/21582041.2016.1236212>>. hlm 404.

²¹³ Ali Maksum, 'Discourses on Islam and Democracy in Indonesia: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *Journal of Indonesian Islam*, 11.2 (2017), 405–22 <<https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>>. Hlm. 412.

²¹⁴ Mohammad Iqbal Ahnaf, 'Between Revolution and Reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia', *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 2.2 (2009), 69–85 <<https://doi.org/10.1080/17467580902822163>>. Hlm. 75.

didasarkan pada pengawasan yang penuh kewaspadaan agar organisasi agar tak disusupi oleh unsur yang merusak, dan agar tak terjadi kesalahan dalam menyusun struktur organisasi. Dengan demikian, organisasi ini tidak tergelincir pada pandangan yang bukan pandangannya dan tidak mengalami kehancuran internal.²¹⁵ Berikut strategi penebaran dakwah di Kota Bogor.

A. Halaqah

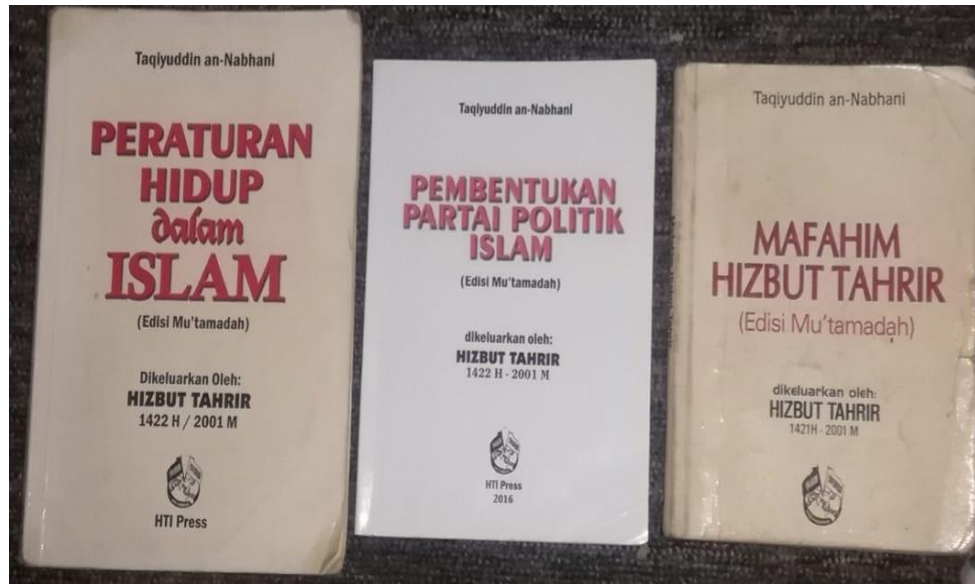
Halaqoh pengajian rutin yang diselenggarakan oleh anggota HTI setiap seminggu sekali. Halaqoh ini sangat penting karena sebagai kajian untuk mereka yang sudah tertarik dengan opini opini yang dikembangkan oleh HTI. Pada awalnya mereka bisa mengikuti halaqoh umum yang diperuntukan bagi mereka yang masih awal dan diikiti secara umum. Selanjutnya, setelah beberapa bulan melakukan halaqoh umum seorang *Musyrif* akan menaikkan statusnya menjadi daris dan wajib mengikuti halaqoh secara intensif di bawah bimbingan seorang musyrif. Daro sini munculah tahap pembinaan sebelum menjadi kader anggota HTI. Untuk menjadi seorang anggota seorang daris harus menghatamkan tiga kitab dasar karya

²¹⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *At-Takattul Al-Hizbiy* (Jakarta: HTI-Press, 2016). Hlm. 46.

penggagas dan pendiri HT, yaitu Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani. Kitab-kitab tersebut adalah Nidzām al-Islām, al-Takattul al-Hizbī, dan Mafāhim Hizb al-Tahrīr. Kitab-kitab tersebut harus dikaji dan dikhatamkan secara keseluruhan.²¹⁶ Melalui halaqah inilah para pemimpin HTI memilih calon anggota. Proses keanggotaan penuh itu rumit. Proses menuju keanggotaan penuh bisa memakan waktu antara dua hingga lima tahun. Karena itu, banyak dari anggota HTI cenderung sangat berkomitmen terhadap organisasi.²¹⁷

²¹⁶ Mohamad Rafiuddin, 'MENGENAL HIZBUT TAHRIR (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir Vis a Vis NU)', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2015), 29 <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.653>>. hlm. 36

²¹⁷ Mohamed Nawab Mohamed Osman, 'The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia', *South East Asia Research*, 18.4 (2010), 735–755 <<https://doi.org/10.5367/sear.2010.0018>>. hlm. 741.



Gambar 2. 1 : Buku karangan Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani. Kitab-kitab tersebut adalah terjemahan dari Nidzām al-Islām, al- Takattul al-Hizbī, dan Mafāhim Hizb al-Tahrīr

Sumber : Pribadi

B. Acara besar

1. Muktamar Khilafah 2013

Muktamar Khilafah di selenggarakan di Stadion Utana Gelora Bung Karno Yang dihadiri lebih Dari 100.000 orang. Acara tersebut dihadiri dari

beberapa anggota HTI dari berbagai daerah di sekitaran Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Tangerang Depok, Dan Sukabumi. Hal ini menandakan bahwa Jumlah anggota dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia Berkembang cukup pesat Acara tersebut merupakan puncak dari rangkaian acara penutup dari acara yang diselenggarakan di 30 kota besar di seluruh Indonesia.²¹⁸

Pada acara tersebut mereka juga mengundang tokoh-tokoh Hizbut Tahrir dari berbagai belahan dunia yang hadir di Jakarta untuk menyampaikan seruannya. Di antara mereka adalah Ahmad al-Qashash (Libanon); Abdul Mu'min (Yaman); Mahmud Kar (Turki); Taji Mustafa (Inggris); Abu Saifullah Ahmad India); Okay Pala (Belanda); Abdul Hakim (Malaysia); Syarif Zaeid (Mesir); Al Araby Karabaka (Tunisia); Saad Jagranvi (Pakistan); Bilal Meri (Australia) dan Hisham Albaba (Suriiah).²¹⁹

Dari acara tersebut HTI berharap ide Khilafah ini semakin didukung oleh segenap lapisan masyarakat, bukan hanya dari kalangan tertentu saja, seperti ulama atau kalangan intelektual saja tapi juga rakyat biasa, pengusaha dan sebagainya karena perjuangan untuk tegaknya syariah dan Khilafah

²¹⁸ Prihandono Wibowo, 'Potensi Irelevansi Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Konstelasi Politik Global', 2.1 (2014), 82–94. Hlm. 89.

²¹⁹ Mujianto, *Gelegar Muktamar Khilafah 2013 Dari Aceh Hingga Papua Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013). Hlm. 13.

adalah kewajiban seluruh umat Islam tanpa kecuali.²²⁰



Gambar 2. 2 : Muktamar Khilafah 2013

Sumber : <https://hizb-indonesia.online/page/2/?s=muktamar+khilafah+2013>. di akses 23/11/2020. Pukul 18:15.

2. Konfrensi Islam dan Peradaban 2014

Pada 27 Mei 2014. Sekitar 10.000 peserta berkumpul di Sentul International Convention Center di Bogor. Peserta terdiri dari berbagai latar belakang seperti cendekiawan, politikus, ustadz, mahasiswa, mahasiswa dan ibu rumah tangga

²²⁰ Muhammad Ismail Yusanto, *Perjuangan Dengan Dakwah Islam* (Yogyakarta: Irtikaz, 2016). Hlm 400.

berkumpul untuk mengikuti Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) 1435 H. acaratersebut meemiliki tema adalah “ *Saatnya Khilafah Mengganti Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal.*²²¹



Gambar 2. 3 : Konfrensi Islam dan Peradaban 2014

Sumber : [FOTO] Puluhan Ribu Peserta Hadiri Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) Bogor | Hizbut Tahrir Indonesia (hizb-indonesia.online) diakses 23/11/2020. Pukul 20:10.

²²¹ ‘10. 000 Peserta KIP Padati Sentul International Convention Center Bogor’, *Https://Hizb-Indonesia.Online/*, 2014.

3. My Movement 2015

Pada tanggal 8 Febuari 2015 Lembaga Dakwah Sekolah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Bogor, menggelar acara My Movement 2015 dengan tema “Kamilah Pemimpin Masa Depan”. Dari acara tersebut memberikan sebuah pesan moral kepada remaja bahwasanya remaja harus membuka mata antara fakta dan kenyataan tentang kebobrokan moral remaja saat ini. Demikian bagaimana menjadi orang sukses yang sesuai dengan harapan orang tua. Keberhasilan Nabi dalam berdakwah, Dimulai dengan Ali bin Abi Thalib (8 tahun), Mushaba bin Umair (24 tahun), Thalhah bin Ubaidillah (11 tahun), Al Arqaam bin Abil Arqaam (12 tahun) dan masih banyak lagi lainnya. Jadi sebenarnya generasi muda memiliki potensi yang sangat besar, karena pelajar dan remaja pada umumnya merupakan salah satu elemen masyarakat yang memiliki potensi yang luar biasa.²²²

²²² Indah Wulandari, ‘Pemuda Islam Harus Sukses Dunia Akhirat’, *Https://Khazanah.Republika.Co.Id*, 2015
<<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/njuoel/pemuda-islam-harus-sukses-dunia-akhirat>>.



Gambar 2. 4 : Acara My Muvement 2015

Sumber : Pribadi

4. Rapat dan Pawai Akbar 2015

Pada 30 Mei, HTI menyelenggarakan sebuah acara besar pawai yang akan diadakan di sepanjang Jalan Tamlin di Jakarta dan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang diperkirakan, sekitar 150.000 orang akan hadir dari berbagai daerah seperti Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi. Acara tersebut engusung tema “*Bersama Umat Tegakkan Khilafah*”, RPA dipandang sebagai sarana untuk memajukan

visi dan pesan perjuangan ummat dalam memulihkan kehidupan Islam dalam sistem kekhalifahan. Visi dan misi tersebut perlu digarisbawahi dan ditegaskan kembali, terutama di tengah banjir besar yang mengancam keamanan negeri ini, yaitu neoliberalisme dan neo-imperialisme.²²³



Gambar 2. 5 : Rapat Pawai Akbar 2015

Sumber : <https://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2015/05/30/37287/allahu-akbar-ratusan-ribu-umat->

²²³ Hizbut Tahrir Indonesia, ‘Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia: Rapat Dan Pawai Akbar (RPA) 2015 “Bersama Umat Tegakkan Khilafah”’, *Https://Hizb-Indonesia.Online* (Jakarta, 9 May 2015) <<https://hizb-indonesia.online/2015/05/09/pernyataan-hizbut-tahrir-indonesia-rapat-dan-pawai-akbar-rpa-2015-bersama-umat-tegakkan-khilafah/>>.

hadiri-rapat-dan-pawai-di-jakarta/. diakses 23/11/2020.
Pukul 18:10.

5. Muktamar Tokoh Umat (MTU) 2016

Sekitar 1.300 tokoh dari Bogor dan Sukabumi mengikuti Muktamar Tokoh Umat yang diselenggarakan di Hotel Brajamustika Bogor. Pada acara tersebut dihadiri Berbagai macam kalangan yang hadir diantaranya adalah: ulama, kyai, takmir masjid, tokoh masyarakat, intelektual, pengusaha, dokter, perwakilan partai politik, wartawan, tokoh mahasiswa, dan lain-lain.²²⁴

²²⁴ Erwin Wahyu, 'Muktamar Tokoh Umat 1437 H Bogor', *Https://Hizb-Indonesia.Online* (Bogor, 29 April 2016) <<https://hizb-indonesia.online/2016/04/29/foto-muktamar-tokoh-umat-1437-h-bogor/>>.



Gambar 2. 6 : Muktamam Tokoh Umat 1437 H

Sumber : <https://hizb-indonesia.online/2016/04/29/foto-muktamar-tokoh-umat-1437-h-bogor/> .di akses 23/11/2020. Pukul 18:10.

2.3 Optimalisasi media sebagai sarana penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor tahun 2010-2017.

Selain melalui halaqah, para anggota membaca dan berdialog dengan ide-ide yang dipasarkan oleh HTI melalui serangkaian publikasinya seperti buku terjemahan, seperti *Shakshiyah Islamiyah* (Kepribadian Islam), *Fikr al-Islam*

(Pemikiran Islam), dan *Nizam al-Islam* (Sistem Islam), Media cetak seperti Buletin Al- Islam, jurnal Al-Wa'ie, dan informasi yang disediakan di situs internet.²²⁵ Media massa yang digunakan oleh organisasi HTI ini terbagi dua yaitu media massa elektronik dan media massa cetak. Pilihan dua jenis media ini sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Media massa elektronik digunakannya pada saat berdakwah dengan orang yang telah menguasai media seperti di perkotaan. Sedangkan media cetak digunakannya sebagai sarana untuk berdakwah kepada orang-orang yang masih belum menguasai media massa elektronik seperti di daerah perkampungan

A. Media cetak

1. Al Islam

Al-Islam terbit setiap hari Jumat dan diedarkan pada masjid-masjid di seluruh Indonesia. Al-Islam senantiasa mengupas masalah-masalah yang menjadi berita utama media massa, seperti masalah poliitik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Al-Islam berupaya mempengaruhi pembaca dengan ideologi yang diyakini paling benar. Dalam upaya mempengaruhi pembaca dengan ideologi tersebut,

²²⁵ Masdar Hilmy, 'Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2014), 1 <<https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>>. hlm. 6.

wacana dakwah Al-Islam menggunakan bahasa sebagai medium, sehingga wacana dijadikan sebagai wujud praktik sosial.²²⁶ Media tersebut sangat efektif untuk membina dan mempersuasi opini publik. Sehingga dapat memahamkan kepada masyarakat bahwa penegakan sistem pemerintahan dengan mengusung sistem khilafah dapat mengurangi indikasi kejahatan - yang muncul di era ini.²²⁷

²²⁶ Budiman, Musyarif, and Firman, 'Ideologi Buletin Dakwah Al-Islam Dalam Kajian Wacana Kritis', *Kuriositas*, 9.1 (2016), 21–34. Hlm. 22.

²²⁷ Sabari, 'Manajemen Media Massa Hizbut Tahrir Indonesia', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11.1 (2017), 53–72 <<https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>>. hlm. 80.



Gambar 2. 7 : Buletin Dakwah Al - Islam

Sumber : Pribadi

2. Media umat

Tabloid Media Umat (MU) merupakan salah satu media utama HTI merupakan media Islam dengan motto "Melanjutkan Kehidupan Islam" dengan analisis peristiwa atau berita dengan kacamata Islam dan memihak kaum Muslim. Penyebaran tabloid ini dilakukan menyasar kepada anggota dan sasaran lainnya yang dianggap berpotensi bergabung dengan HTI. Media Umat ini biasanya diberikan simpatisan dan masyarakat

umum.²²⁸ Tabloid ini mendeskripsikan bahwa sistem Barat dan ide-ide yang tidak islami harus disingkirkan dan kehidupan islami wajib dilanjutkan kembali dengan penerapan hukum-hukum syariah yang lurus melalui kekuasaan, yang eksistensinya telah diwajibkan oleh syariah, yaitu Daulah al-Khilafah.²²⁹

²²⁸ Paelani Setia, 'Islamic-Buzzer Dan Hoaks: Propaganda Kilafah Oleh Eks HTI Kota Bandung Di Jawa Barat' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020). Hlm. 109.

²²⁹ Bugi Kenoh Mulyar, 'Diskursus Khilafah Islamiah Di Indonesia (Analisis Wacana Kritis Buletin Dakwah Al-Islam, Kaffah, Dan Tabloid Media Umat)', 1–15. Hlm. 11.



Gambar 2. 8: Media Ummat

Sumber : pribadi

3. Majalah

Al-Wa'ie merupakan media dakwah dan politik yang secara resmi diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, kurang lebih sejak tahun 2000. Majalah ini mempunyai motto “Membangun Kesadaran Umat” dengan penekanan kajian politik dan dakwah. Majalah ini sebagai sarana pelengkap

dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Sama halnya dengan tabloid Media Umat, majalah ini berisi opini-opini khas HTI dengan menawarkan khilafah sebagai solusi atas permasalahan negara. Al-wa'ie adalah media berkaitan dengan kehidupan Muslim di bidang ekonomi, politik (nasional dan internasional), pemerintahan, ekonomi (lokal dan global), pendidikan, masyarakat dan budaya, serta advokasi. Dan keamanan. kita diskusikan. Sebagai sarana advokasi, majalah tersebut akan menjadi salah satu media yang dapat mengedukasi umat Islam, dan umat Islam akan ingin memperjuangkan terwujudnya kehidupan Islam. Ia melakukannya, tentunya setelah menyadari berbagai kesalahan, kesalahan dan kegagalan yang mengatur sistem urusan publik non-Islam saat ini dan setelah menyadari bahwa hanya sistem Islam yang dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia..²³⁰

²³⁰ Farah Farida, 'Potret Tafsir Ideologis Di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie Oleh:', *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 3.1 (2017), 117–42. Hlm. 122.



Gambar 2. 9 : Majalah Al-Wa'ie

Sumber : Pribadi

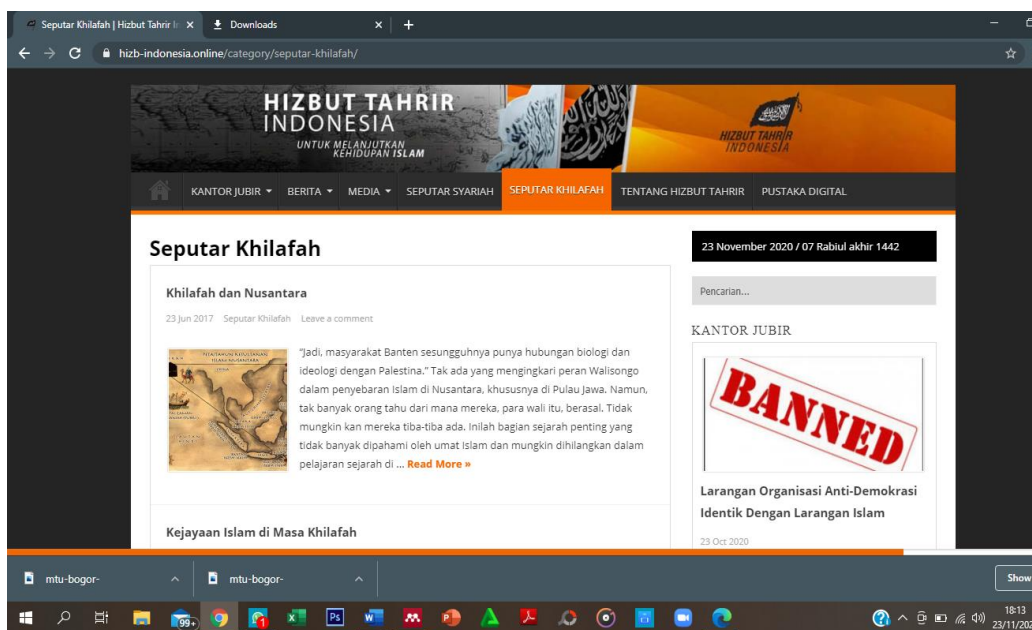
Majalah The Rise adalah majalah HTI yang dibuat khusus untuk kalangan remaja dan pelajar selain buletin Teman Surga. Majalah ini mengupas berbagai masalah anak muda, remaja, dan pelajar dengan opini syariah khilafah. Opini-opini yang dibangun dikemas dengan menarik sesuai dengan trend remaja kekinian.²³¹

B. Media elektronik.

1. Internet

²³¹ Setia. Hlm. 108.

Situs web <https://hizb-indonesia.online/>. Adalah situs resmi Hizbut Tahrir dengan informasi kegiatan organisasi termasuk berita, opini, dan konten buku terkait ekspansi politik HTI di Kekhalifahan Islam. Untuk melanjutkan kehidupan Islam: “ yang merupakan jargon dari organisasi tersebut.²³²



Gambar 2. 10 : Web Hizbut Tahrir Indonesia

Sumber : <https://hizb-indonesia.online/> .di akses 23/11/2020. Pukul 18:10.

²³² Nilda Hayati, 'Konsep Khilafah Islāmiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Komunikasi', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12.1 (2017), 169–200. Hlm. 190.

2. Media Sosial

Menggunakan media sosial menjadi cara baru kelompok Islam radikal menyebarkan benih-benih ekstremisme. Facebook, YouTube, Twitter, blog, dan aplikasi perpesanan gratis seperti WhatsApp sekarang menjadi alat yang ampuh bagi kelompok Islam transnasional dan teroris untuk menyebar, mendapatkan pengaruh, dan bergabung dengan jejaring sosial. Ada banyak laporan di jejaring sosial dan blog yang dijalankan oleh HTI yang menyerukan pembentukan Khilafah Islam, menerapkan politik Islam, menyingkirkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan produk nasional, gagasan dan pemikiran dari Barat seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender Menolak pluralisme, sekularisme. dan liberalisme. Modus diseminasi berupa video aktivitas, tweet reguler, dan poin keputusan organisasi internal.²³³

²³³ Nafi Muthohirin, 'Radikalisme Islam Dan Pergerakannya Di Media Sosial', *Afkaruna*, 11.2 (2015), 240–59 <<https://doi.org/10.18196/aaijis.2015.0050.240-259>>. Hlm. 252.

3.1 Kesimpulan

Hizbut Tahtir Indonesia adalah organisasi transnasional yang berdiri di atas akidah Islam. HT bertujuan untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam dengan cara menegakkan Negara Khilafah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah. Hizbut Tahrir Indonesia datang ke Kota Bogor pada dekade 1980. Pada tahun 2010 sampai dengan 2017 Perkembangan dakwah di Kota Bogor cukuplah pesat. mulai dari kajian mingguan dampai acara-acara nasional. Bukan hanya itu penyebaran dakwah HTI juga melalui imedia maupun media cetak ataupun sosial. Tujuan mereka dakwah adalah mengingatkan umat Islam di Kota Bogor mengenai pentingnya menegakkan Syariat.

3.2 Saran

Penulis berharap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia bisa berdakwah kepada warga Kota Bogor bukan hanya mendirikan Negara Islam akan tetapi mendakwahkan bagaimana pentingnya mendekatkan dirinya kepada Allah SWT seperti ibadah karena tiang agama adalah ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- '10. 000 Peserta KIP Padati Sentul International Convention Center Bogor', *Https://Hizb-Indonesia.Online/*, 2014
- Abdullah, Ja'far Muhammad Abu, *Negara Khalifah Islam Mewujudkan Janji Rasulullah SAW* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019)
- Abdullah, Muhammad Husain, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014)
- Adi., M. Ramadhan, ed., *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019)
- Ahnaf, Mohammad Iqbal, 'Between Revolution and Reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia', *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 2.2 (2009), 69–85 <<https://doi.org/10.1080/17467580902822163>>
- Ali, Yasin Bin, *Negara Khilafah Dan Kaum Minoritas* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015)
- Amstrong, Karen, *Islam A Short History* (New York: Random House Publishing Group, 2002)
- An-Nabhani, Taqiuddin, *Nizham Al-Islam* (Jakarta: HTI-Press, 2011)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *At-Takattul Al-Hizbiy* (Jakarta: HTI-Press, 2016)
- — —, *Daulah Islam* (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2019)

- — —, *Mafahim Hizbut Tahrir* (Jakarta: HTI-Press, 2001)
- Anwar, A. Samsul, 'Aaktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bogor' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)
- Ar-Rais, Muhammad Dhia'uddin, *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern* (Jakarta: Penerbit Lantera, 2002)
- Arief B.Iskandar, *Materi Dasar Islam Islam Mulai Akar Hingga Daunya* (Bogor: Al Azhar Press, 2015)
- Arifianto, Alexander Raymond, 'Banning Hizbut Tahrir Indonesia: Freedom or Security?', 2017, 1-3 <<http://hdl.handle.net/10220/42457>>
- Arifin, Syamsul, 'Gerakan Keagamaan Baru Dalam Indonesia Kontemporer: Tafsir Sosial Atas Hizbut Tahrir', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14.1 (2014), 117 <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.80>>
- Aripudin, Acep, *Sosiologi Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Belhaj, Syaikh Ali, *Menegakkan Kembali Negara Khilafah Kewajiban Terbesar Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015)
- Budiman, Musyarif, and Firman, 'Ideologi Buletin Dakwah Al-Islam Dalam Kajian Wacana Kritis', *Kuriositas*, 9.1 (2016), 21-34
- Burhani, Ahmad Najib, 'The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia', *ISEAS*

Perspective, 71, 2017, 1-10
<https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_71.pdf>

Delphine Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy* (New York: Routledge, 2015)
<<https://doi.org/10.4324/9781315764986>>

Dodiman, M Ali, *Memoar Pejuang Syariah Dan Khilafah Biografi Ringkas Tokoh Senior Huzbut Tahrir* (Bogor: Al Azhar Press, 2012)

Erwin Wahyu, 'Muktamar Tokoh Umat 1437 H Bogor', *Https://Hizb-Indonesia.Online* (Bogor, 29 April 2016)
<<https://hizb-indonesia.online/2016/04/29/foto-muktamar-tokoh-umat-1437-h-bogor/>>

Faiz, Abu, ed., *Khilafah Solusi* (Bogor: Pustaka Thariquul Izzah, 2019)

Farida, Farah, 'Potret Tafsir Ideologis Di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie Oleh:', *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 3.1 (2017), 117-42

Feldman, Noah, *The Fall And Rise of The Islamic State* (New Jersey: Princeton University Press, 2009)

Firdaus, Muhammad, 'Pola Komunikasi Aktuvis Hizbut Tahrir Dalam Mengembangkan DaMengembangkan Dakwah Islam', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8.3 (2018)

Hafidz Abdurahman dkk, *Islam Rahmatan Lil Alamin* (Jakarta: Al Fatih Press, 2018)

Hannah, Houriya Ahmed &, *Hizb Ut-Tahrir Ideology and Strategy, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (London: The Centre for Social Cohesion, 2009)
<<https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm308>>

Hayati, Nilda, 'Konsep Khilafah Islāmiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Komunikasi', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12.1 (2017), 169-200

Hilmy, Masdar, 'Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2014), 1
<<https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>>

Hirzi, Azis Taufik, 'Komparasi Ringkas Antara : Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah Dalam Islam', *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, XXI.2 (2005), 250-61

Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014)

Hizbut Tahrir Indonesia, 'Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia: Rapat Dan Pawai Akbar (RPA) 2015 "Bersama Umat Tegakkan Khilafah"', <https://Hizbut-Indonesia.Online> (Jakarta, 9 May 2015) <<https://hizbut-indonesia.online/2015/05/09/pernyataan-hizbut-tahrir-indonesia-rapat-dan-pawai-akbar-rpa-2015-bersama-umat-tegakkan-khilafah/>>

Huda, Miftahul, 'Kajian Atas Relasi Islam Dan Demokrasi',

Jurnal "el-Harakah, 7.April (2005), 45-52

Ismanto, and Suparman, 'Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial', *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 3.2 (2020), 67-88
<<https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>>

John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 1996)

Karagiannis, Emmanuel, and Clark McCauley, 'Hizb Ut-Tahrir Al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group That Remains Nonviolent', *Terrorism and Political Violence*, 18.2 (2006), 315-34
<<https://doi.org/10.1080/09546550600570168>>

Khalid, Abdurrahman Muhammad, *Soal Jawab Seputar Gerakan Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2015)

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiarawacana, 1995)

Madawi AL Rasheed, Carool Keristen, dkk, *Demystifying the Caliphate* (Oxford: Oxford University Press, 2015)

Maksum, Ali, 'Discourses on Islam and Democracy in Indonesia: A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)', *Journal of Indonesian Islam*, 11.2 (2017), 405-22 <<https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>>

Muhajir, K.H. Afifuddin, *Fiqih Tata Negara Upaya*

Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam (Yogyakarta: IRCISOD, 2017)

Muhtadi, Burhanuddin, 'The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia', *Asian Journal of Social Science*, 37.4 (2009), 623-45 <<https://doi.org/10.1163/156853109X460219>>

Mujianto, *Gelegar Mukhtamar Khilafah 2013 Dari Aceh Hingga Papua Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013)

Mulyar, Bugi Kenoh, 'Diskursus Khilafah Islamiah Di Indonesia (Analisis Wacana Kritis Buletin Dakwah Al-Islam, Kaffah, Dan Tabloid Media Umat)', 1-15

Muthohirin, Nafi, 'Radikalisme Islam Dan Pergerakannya Di Media Sosial', *Afkaruna*, 11.2 (2015), 240-59 <<https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0050.240-259>>

Orofino, Elisa, 'Intellectual Radicals Challenging the State: The Case of Hizb Ut-Tahrir in the West', *Contemporary Social Science*, 10.4 (2015), 401-12 <<https://doi.org/10.1080/21582041.2016.1236212>>

Osman, Mohamed Nawab Mohamed, 'Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia', *S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)*, 171, 2009, 1-34 <<https://doi.org/10.7202/003033ar>>

— — —, 'The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia', *South East Asia Research*, 18.4 (2010), 735-55 <<https://doi.org/10.5367/sear.2010.0018>>

- Pranowo, M. Bambang, 'Islam Di Indonesia: Mengusung Demokrasi Dengan Basis Budaya', *Studia Islamika*, 13.1 (2006) <<https://doi.org/10.15408/sdi.v13i1.579>>
- Rafiuddin, Mohamad, 'MENGENAL HIZBUT TAHRIR (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir Vis a Vis NU)', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2015), 29 <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.653>>
- RI, Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017*, 2017 <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.pdf>
- — —, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, DPR.Go.Id, 2013
- Sabari, 'Manajemen Media Massa Hizbut Tahrir Indonesia', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11.1 (2017), 53-72 <<https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>>
- Salam, Zahid Ivan, *Negara Khilafah Dan Politik Luar Negeri* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015)
- Setia, Paelani, 'Islamic-Buzzer Dan Hoaks: Propaganda Kilafah Oleh Eks HTI Kota Bandung Di Jawa Barat' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020)
- Shalih, Hafizh, *Mengadili Demokrasi* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010)

- Shobron, Sudarno, 'Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia', *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 15.1 (2014), 44-62
<<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4773>>
- Siauw, Felix Y, *Khilafah Remake* (Jakarta: Al Fatih Press, 2015)
- Valentine, S. R., 'Monitoring Islamic Militancy: Hizb-Ut-Tahrir: "The Party of Liberation"', *Policing*, 4.4 (2010), 411-20 <<https://doi.org/10.1093/police/paq015>>
- Wahyyudi, M Dien Madjid dan Johan, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ward, Ken, 'Non-Violent Extremists? Hizbut Tahrir Indonesia', *Australian Journal of International Affairs*, 63.2 (2009), 149-64
<<https://doi.org/10.1080/10357710902895103>>
- Whine, Michael, 'Is Hizb Ut-Tahrir Changing Strategy or Tactics?', *Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper. Washington DC, Hudson Institute Center for Eurasian Policy*, 1, 2006, 1-11
- Wibowo, Prihandono, 'Potensi Irelevansi Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Konstelasi Politik Global', 2.1 (2014), 82-94
- Wulandari, Indah, 'Pemuda Islam Harus Sukses Dunia Akhirat', *Https://Khazanah.Republika.Co.Id*, 2015
<<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/njuoel/pemuda-islam-harus-sukses->

dunia-akhirat>

Yusanto, Muhammad Ismail, *Perjuangan Dengan Dakwah Islam* (Yogyakarta: Irtikaz, 2016)

Zaim, Mohamad, 'Dynamics Development of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and Indonesia's Economic Reality', *Journal of Philosophy, Culture and Religion*, 41 (2019), 13-19 <<https://doi.org/10.7176/jpcr/41-03>>

Zainuddin, M., 'ISLAM DAN DEMOKRASI (Telaah Implementasi Demokrasi Di Negara Muslim)', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 4.2 (2018), 73 <<https://doi.org/10.18860/ua.v4i2.6127>>

Zalum, Abdul Qadim, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan Dan Menebarluaskan* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019)

— — —, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2019)

SEJARAH KARAWANG SEBAGAI KOTA PADI 2009-2019

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L) adalah salah satu tumbuhan penayagunaan yang diperlukan dalam kehidupan. Padi diperkirakan bermula dari Indochina atau India yang hadir ke Indonesia dibawaikan oleh para leluhur yang melakukan perpindahan dari tanah Asia sekitar 1500 SM. Tumbuhan padi merupakan sejenis tanaman yang sangat flexibel didapatkan, terutama kita yang bermukim di daratan pedesaan. Dataran persawahan terisi dengan tumbuhan padi. Padi sebagai sumber bahan makanan utama oleh sebagian besar penduduk.

Padi adalah tumbuhan yang tergolong pada kelompok *Orzya* L. Yang mencakup golongan kurang lebih 25 spesies, menyebarkan di wilayah subtropis dan wilayah tropis. Seperti Amerika, Australia, Asia dan Afrika. Padi yang ada pada saat ini adalah hasil perkawinan antara *Oryzaofficianalis* dan *Oryzasativa* F. *Spontane*. Pengolahan padi di dunia menempati urutan ketiga dari semua golongan sereal, setelah gandum dan jagung. Tetapi, padi menjadi sumber karbohidrat pokok bagi sebagian masyarakat dunia dan padi terbilang masuk dalam kelompok *Poaceae* atau padi-padian.²³⁴

²³⁴ Petani Indo Modern, "Pengertian Tanaman Padi," *Petani Indo Modern*, last modified 2016,

Di daratan Indonesia telah ada penanaman padi yang tersebar luas di wilayah Jawa pada abad ke-8 dan ke-9 serentak dengan tumbuhnya pemerintahan Kerajaan Medang atau disebut Kerajaan Mataram Kuno. Berdasarkan penelitian para sejarawan dan cendekiawan ilmu bumi, cara menanam padi di Indonesia berawal dari Daratan Asia Tenggara (Indochina), bukan dari Jepang. Selain itu, dikuatkan dengan foto-foto masa penjajahan Belanda yang diperkirakan pada abad ke-20, merujuk pada kondisi sawah-sawah di wilayah Jawa sebelum hadirnya tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua.²³⁵

Kadar pangan penduduk Indonesia tumbuh dengan seiringnya jumlah masyarakat di Indonesia, deras perkembangan penduduk Indonesia dari masa ke masa mengalami peningkatan yang relevan. Paradigma ini memberikan dampak terhadap pangan yang diperlukan oleh setiap masyarakat di Indonesia. Dengan berkurangnya hasil produksi karena penurunan, membuat masyarakat di Indonesia tidak memadai untuk wujudkan kepentingan kalori karena harga jagung dan beras

<https://petaniindomodern.wordpress.com/2016/02/10/pengertian-tanaman-padi-3/> .

²³⁵ Richardson Killis, "Bagaimana Sejarah Padi Di Indonesia? Benarkah Karena Pengaruh Bangsa Jepang?," *Quora*, last modified 2018, <https://id.quora.com/Bagaimana-sejarah-padi-di-Indonesia-Benarkah-karena-pengaruh-bangsa-Jepang>.

setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan.²³⁶

Kota lumbung padi yang dikenal luas oleh masyarakat merupakan predikat bagi Kabupaten Karawang. Dalam pengembangannya, Kabupaten Karawang mampu membuat penanaman padi rata-rata 1,4 juta ton GKP tiap tahun. Dengan jumlah pembuatan padi sebanyak itu, Karawang memberikan partisipasi atas pemasokan beras hingga 9% dari produksi beras yang berhasil dikembangkan Provinsi Jawa Barat. Mayoritas masyarakat Karawang yang memiliki jumlah 2,2 juta lebih masyarakatnya memang bekerja sebagai petani.²³⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang diangkat diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Kota Karawang?
2. Bagaimana awal mula julukan Karawang menjadi Kota Padi?
3. Bagaimana perkembangan Karawang sebagai Kota Padi?

²³⁶ Mudiyo and Wasino, "Perkembangan Tanaman Pangan Di Indonesia Tahun 1945-1965," *Journal of Indonesia History* 4, no. 1 (2015): 44.

²³⁷ Koran Sindo, "Mempertahankan Karawang Sebagai Kota Lumbung Padi," *Sindonews.Com*, last modified 2015, <https://nasional.sindonews.com/berita/986576/149/mempertahankan-karawang-sebagai-kota-lumbung-padi?showpage=all>.

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengenal gambaran umum Kota Karawang.
2. Untuk mengetahui awal mula julukan Karawang menjadi Kota Padi.
3. Untuk memahami perkembangan Karawang sebagai Kota Padi.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu aktivitas yang terdiri dari membaca, mencari, dan memahami dan bahan pustaka laporan-laporan penelitian yang berisi tentang ide-ide yang signifikan dengan penelitian yang akan dikerjakan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah satu bagian penting dari segala tahapan prosedur penelitian.²³⁸

Setelah melakukan penelusuran dalam penelitian ini, terdapat beberapa tulisan yang membantu dalam penelitian sebagai kajian pustaka, antara lain:

1. Buku oleh R. H. Tjetjep Supriadi, yang berjudul *Sejarah Berdirinya Kabupaten Karawang: 10 Mulud Taun Alip, 14 September Tahun 1633*, diterbitkan

²³⁸ Fatkhan Amirul Huda, "Pengertian Dan Definisi Kajian Pustaka," *Fatkhan.Web.Id*, last modified 2017, <http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/>.

oleh Theme 76 pada tahun 1994. Buku ini berisikan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Karawang, dari Karawang masa Kerajaan Padjajaran hingga Karawang diserahkan kepada para penjajah. Buku ini menjelaskan bahwa dalam berdirinya Karawang, penuh dengan rentetan peristiwa yang penuh dengan peperangan dan perebutan kuasa.

2. Jurnal oleh Mudiyono dan Wasino, yang berjudul *Perkembangan Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 1945-1965*, diterbitkan oleh Journal of Indonesian History tahun 2015. Jurnal ini berisikan tentang budidaya pangan hingga kebijakan pemerintah terhadap pangan di Indonesia. Jurnal ini memberi penjelasan bahwa padi telah ada sejak dahulu kala. Karena pangan sangatlah penting bagi kebutuhan masyarakat, pemerintah ambil langkah serius dalam menangani pangan.

Dari kajian pustaka tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa tulisan di atas dapat membantu penelitian ini. Karena buku dari R. H. Tjetjep Supriadi menjelaskan sejarah berdirinya Karawang, kemudian jurnal dari Mudiyono dan wasino menjelaskan pangan di Indonesia, dapat menyempurnakan penelitian ini tentang sejarah Karawang sebagai Kota Padi.

1.5 Metode Penelitian

Upaya yang dilakukan dengan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah, yaitu dengan melakukan empat langkah metode

penelitian sejarah. Pertama, pengumpulan sumber (heuristik), yang dilakukan melalui pencarian dokumen dan juga penelitian sumber bibliografi. Kedua, kritik, baik ekstern maupun intern yakni upaya mendapatkan fakta-fakta yang diharapkan. Ketiga, interpretasi, yang merupakan penafsiran dan analisis dari fakta-fakta yang telah didapat dan telah diuji kompetensinya. Keempat, historiografi, yaitu penyusunan seluruh rangkaian dari metode penelitian dalam bentuk tulisan.²³⁹

1. Heuristik

Berdasarkan pemahamannya, heuristik bermula dari bahasa Yunani yaitu *heuristiken* yang dapat diartikan sebagai pengumpulan sumber. Heuristik merupakan suatu cara untuk menangani, mendapatkan, rincian bibliografi atau menjelaskan, dan memelihara tulisan-tulisan. Pada langkah ini investigasi kepastakaan dilakukan dengan menyelusuri lewat dokumen tersurat, baik sumber primer maupun sekunder.²⁴⁰

Dalam tahapan heuristik, penulis melakukan pengumpulan dan mencari data-data yang relevan mengenai pembahasan yang akan penulis teliti, melalui wawancara dan studi pustaka yang baik berupa buku, jurnal, foto, dan internet. Langkah pertama, penulis mencari informasi mengenai

²³⁹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 54.

²⁴⁰ *Ibid.*, 55.

perjalanan Karawang sebagai Kota Padi, dengan mencari arsip yang merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa itu sendiri. Dari sana penulis mendapatkan data dan fakta.

Kemudian dalam studi pustaka penulis mencoba mencari sumber atau hasil penelitian yang dianggap dapat membantu dalam penyusunan penelitian ini. Sehingga penulis mencari sumber ke Perpustakaan Daerah Karawang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Karawang, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang.

Setelah menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian penulis di lokasi keberadaan sumber di atas, akhirnya penulis memperoleh beberapa sumber. Sumber yang diperoleh oleh penulis tersebut terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder yang penulis peroleh, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Penulis mengambil sumber primer dari hasil wawancara dengan orang-orang yang memahami dan yang terkait tentang perkembangan Karawang sebagai Kota Padi. Diantara sumber primer yang sudah penulis wawancara, antara lain:

- Bapak Ir. Kadarisman (Kabid Dinas Pangan Kabupaten Karawang).

- Ibu Rr. Oetami Noviana Raksanagara, M. Pd. (Kabid Dinas Kearsipan Kabupaten Karawang).

Demikian orang-orang di atas yang terkait dengan penelitian ini yang dapat diwawancarai.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber sekunder penulis mengambil beberapa sumber tertulis untuk bisa mendukung terhadap penulisan ini. Adapun sumber sekunder tersebut, antara lain yaitu:

- Dr. Ivan Chofyan dkk, 2015, *Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Islam Bandung.
- R. H. Tjetjep Supriadi, 1994, *Sejarah Berdirinya Kabupaten Karawang: 10 Mulud Taun Alip, 14 September Tahun 1633*, Bandung, Theme 76.
- Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang, 2019, *Sejarah Singkat: Peringatan Hari Jadi Karawang ke-386, 14 September 1633 – 14 September 2019*, Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mudiyono dan Wasino, 2015, *Perkembangan Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 1945-1965*, Journal of Indonesian History.

- Neditira Widya, 2014, *Bangunan-Bangunan Air Masa Hindia Belanda Di Wilayah Karawang: Dalam Konteks Pertanian Padi*, Libra Hari Inagurasi.
- James C. Scott, 2019, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*, Depok, Pustaka LP3ES.

2. Kritik

Sesudah melangsungkan akumulasi sumber, langkah berikutnya yang penulis kerjakan yaitu kritik. Kritik atau verifikasi merupakan tindakan kajian data secara bijaksana, baik intern maupun ekstern. Langkah kritik ini bertujuan untuk memilih data-data yang telah diperoleh secara teliti, terutama memilih data-data primer akan terungkap kebenaran yang sebenarnya. Kritik terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.²⁴¹

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan kritik yang dilakukan untuk memahami seberapa benarnya kredibilitas dan sumber yang relevan. Kritik mengenai kredibilitas sumber yaitu seperti melangsungkan pemeriksaan pada tanggal penerbitan dokumen, pemeriksaan bahan yang berupa kertas, dan melakukan verifikasi terhadap

²⁴¹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2016), 83.

sumber untuk mengetahui sumber asli atau salinan.²⁴²

Untuk bisa diketahui bahwa sumber itu benar, yakin, dan akurat, penulis melakukan tahapan prosedur sebagai berikut: meneliti sifat dari sumber (apakah sumber itu asli atau tidak), dan meneliti pengarang sumber (apakah pengarang tersebut mampu menyampaikan kebenaran dan kesaksian terhadap penulisannya atau tidak).

Terkait dengan kritik ekstern ini, wawancara dengan Bapak Kadarisman (Kepala Bidang Dinas Pangan Karawang) dan Ibu Utami (Kepala Bidang Dinas Kearsipan Karawang), penulis menilai bahwa narasumber tersebut bisa untuk dijadikan sumber primer. Karena menjadi pelaku dan saksi dalam perjalanan Karawang sebagai Kota Padi.

b. Kritik Intern

Kebenaran sumber biasanya merujuk pada kapasitas sumber itu sendiri untuk menggali fakta suatu kejadian sejarah. Peristiwa sejarah tersebut meliputi efisiensi, dan pendekatan atau munculnya sumber dalam kejadian sejarah. Lebih lanjut, kebutuhan, subjektivitas sumber, dan kehadiran sumber untuk menyingkap fakta.²⁴³

²⁴² M. Dien Majdid and Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 223.

²⁴³ *Ibid.*, 233.

Dalam langkah ini, penulis melakukan kritik terhadap isi wawancara tersebut. Karena narasumber merupakan pelaku dan saksi dalam peristiwa tersebut, maka layak untuk dijadikan sumber primer dan dapat dipakai untuk sumber referensi bagi penulis.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan pembedahan data-data sejarah dan garis besar topik sejarah itu sendiri, serta memberi penjelasan tentang masalah saat ini. Tidak ada masa lampau dalam isi sejarah yang mutakhir karena yang ada hanyalah interpretasi historis. Tidak ada interpretasi yang memiliki sifat kesudahan atau penamatan, yang pada akhirnya setiap keturunan dapat memberi pemahamannya sendiri tentang interpretasinya.²⁴⁴

Dalam tahapan interpretasi, penulis mencoba menganalisis sumber tentang perkembangan padi di Kabupaten Karawang. Dari sumber yang didapat, penulis memperoleh beberapa hal yang menyatakan bahwa perkembangan padi di Kabupaten Karawang tidak hanya berperan dalam bidang pertanian saja, tetapi bergerak dalam bidang pembangunan

²⁴⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 107.

Karawang. Sehingga menjadi pusat perhatian bagi pemerintah Karawang.

Berdasarkan pemaparan diatas maka teori yang dapat digunakan yang terkait dengan judul penelitian ini dengan menggunakan teori perkembangan. Karena teori ini berpacu pada perkembangan dan perubahan pada pembangunan Kabupaten Karawang.

4. Historiografi

Historiografi merupakan cara penyusunan dan penggambaran hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Secara garis besar historiografi dapat diartikan sebagai penulisan sejarah atau tulisan tentang sejarah.²⁴⁵ Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, terbagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Dibagian awal, rencana penelitian yang berjudul “Sejarah Karawang sebagai Kota Padi tahun 2000-2019” ini terdapat kata pengantar sebagai ucapan terima kasih penulis. Selanjutnya, terdapat daftar isi untuk memudahkan pembaca dalam pencarian konten yang terdapat pada laporan penelitian ini.

BAB I yaitu Pendahuluan, meliputi: latar belakang (mengapa penelitian ini dilakukan), rumusan masalah (masalah yang akan dikaji),

²⁴⁵ Wahyu Iryana, *Historiografi Umum* (Bandung: Yrama Widya, 2019), 1.

tujuan masalah (tujuan dilakukannya penelitian), kajian pustaka (untuk mengetahui sumber-sumber yang berkaitan), serta langkah-langkah penelitian (metode-metode yang digunakan dalam penelitian).

Pada BAB II merupakan pembahasan mengenai gambaran umum Kota Karawang, awal mula julukan Karawang menjadi Kota Padi, dan perkembangan Kota Karawang sebagai Kota Padi.

Dalam BAB III merupakan bagian penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran, mengenai pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

2.1 Gambaran Umum Kota Karawang



Gambar 1: Tampak depan gerbang utama Gedung Pemda Karawang

Sumber: spn.or.id

Wilayah Kabupaten Karawang ini benar-benar strategis karena letaknya berdampingan dengan Daerah Keistimewaan Indonesia yaitu Jakarta dan daerah sekelilingnya. Tata letak yang strategis dan dekat dengan ibu kota Indonesia tersebut serta hadirnya sarana yang menjanjikan membuat Kabupaten Karawang ikut tumbuh dengan pesat beriringan dengan perkembangan Jakarta dan daerah sekelilingnya.

Berkembangnya Kabupaten Karawang secara besar memberikan dampak bagi sudut sekitar, aktivitas sosial, ekonomi, dan tradisi penduduk. Pertumbuhan pesat yang terus berjalan ini berpotensi berdampak pada tatanan yang tidak teratur dan justru dapat mengancam kelestarian lingkungan. Diantara lainnya adanya implementasi tanah yang tidak berjalan dengan konsep yang telah disetujui oleh delegasi.²⁴⁶

Kabupaten Karawang yang mayoritas tanahnya adalah ladang pertanian mempunyai 2 macam hunian yaitu hunian jenis perkotaan dan hunian jenis perdesaan. Hunian jenis perkotaan adalah hunian yang mempunyai karakter dan berada di daerah yang relatif sudah ada pembangunan yang tidak sedikit, sedangkan hunian jenis perdesaan adalah hunian yang hadir di suatu daerah dengan

²⁴⁶ Ivan Chofyan and dkk, "Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional," *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Uinversitas Islam Bandung* (2015): 23.

pembangunannya masih sedikit dan kelestarian lingkungannya yang masih terjamin.²⁴⁷

Daerah Kabupaten Karawang secara geografis terdapat pada 107° 02 – 107° 40 BT dan 5° 56 – 6° 34 LS. Besarnya daerah Kabupaten Karawang yaitu ± 1. 753, 27 km² atau 175. 327 Ha, 3, 73 % dari besarnya provinsi Jawa Barat. Dinding pemisah daerah tata kelola terdiri dari: Laut Jawa sebagai perbatasan Karawang Utara, Kabupaten Subang sebagai perbatasan Karawang Timur, Kabupaten Purwakarta sebagai perbatasan Karawang Tenggara, Kabupaten Cianjur dan Bogor sebagai perbatasan Karawang Selatan, dan Kabupaten Bekasi sebagai perbatasan Karawang Barat.

Kabupaten Karawang mempunyai dataran yang bervariasi. Diantaranya seperti dataran rendah dengan kemiringan wilayah 0-2 %, 2-15%, 15-40%, dan di atas 40%. Di sebelah utara terdapat dataran berupa pantai, terdapat juga dataran berupa bukit di bagian tengahnya, sedangkan di sebelah selatan terdapat dataran-dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian paling tertinggi memperoleh ± 1291 m di atas permukaan laut yang setara dengan Gunung Sangga Buana.²⁴⁸

Jika kita memandang kembali jauh ke masa lalu, pada periode Kerajaan Tarumanegara sampai

²⁴⁷ Ibid., 39.

²⁴⁸ Pencerah Nusantara, “Kabupaten Karawang,” last modified 2015, <https://pencerahnusantara.org/kabupaten-karawang/>.

berdirinya Kabupaten Karawang, pemerintahan yang sistematis selalu berjalan baik. Akan tetapi pada pusat pemerintahan, sistem pemerintah, dan pemangku wewenang mengalami transisi dan perkembangan serta peralihan. Seperti Kerajaan Tarumanegara (357-618 Masehi), Kerajaan Sunda (abad ke-8 hingga abad ke-16 Masehi), dan Kerajaan Galuh yang memisahkan diri, termasuk Kerajaan Sumedanglarang (1580-1608 Masehi), Kesultanan Cirebon (1482 Masehi), hingga pada masa Kesultanan Banten (abad 15-19 Masehi).

Pada zaman dahulu wilayah Karawang sebagian besar masih menjadi hutan dengan keadaan yang masih luas serta wilayah yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Peristiwa tersebut yang membentuk landasan dalam pemberian nama Karawang, yang bermula dari bahasa Sunda yaitu Ka-rawa-an yang mempunyai makna kawasan yang berawa-rawa. Fakta lain yang dapat memperkuat asumsi tersebut bahwa wilayah rawa-rawa yang masih hadir sampai sekarang, banyak juga kawasan di wilayah Karawang ini yang memiliki nama daerahnya diawali dengan kata "rawa" seperti Rawagede, Rawamerta, Rawagabus, dan masih banyak yang lainnya.

Kehadiran wilayah Karawang, eksistensinya telah berkibar sejak zaman Kerajaan Padjajaran (yang berpusat di Bogor), jadi daerah Karawang ini telah banyak diketahui oleh orang-orang terdahulu. Pada

zaman itu, Karawang menjadi satu-satunya atas lintasan yang sangat berperan sebagai lajur transportasi kekerabatan antara dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Padjajaran dengan Kerajaan Galuh Pakuan yang berpusat di Ciamis.

Sumber lain (buku yang ditulis dalam Sejarah Negara Portugis) mengatakan bahwa tahun 1512 dan 1552 menjelaskan hadirnya pelabuhan yang berperan dari Kerajaan Padjajaran, yakni “Caravan” yang memiliki arti tentang posisi wilayah Karawang yang berada didekat Sungai Citarum. Sejak masa lalu, jika akan melintasi wilayah yang rawan, demi ketentraman di jalan, orang-orang selalu berangkat untuk perjalanan ke suatu daerah secara delegasi atau gerombongan dengan memakai hewan seperti kerbau, kuda, keledai, atau sapi.

Begitu pula halnya yang mungkin terjadi pada masa lampau, integritas rombongan dalam bahasa Portugisnya disebut “Caravan” yang membuat dermaga-dermaga didekat muara Sungai Citarum yang menjuru sampai ke wilayah-wilayah pelosok, sehingga dikenal dengan sebutan “Caravan” yang kemudian beralih nama menjadi Karawang. Luas daerah Kabupaten Karawang pada masa lalu terdiri dari Subang, Bekasi, Purwakarta, dan Karawang itu sendiri.²⁴⁹

²⁴⁹ Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang, *Sejarah Singkat: Peringatan Hari Jadi Karawang Ke-386, 14 September 1633-14 September 2019* (Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang, 2019), 4–6.

Kondisi geografis di Karawang pada saat ini sudah sangat berbeda jika dibandingkan dengan suasana pada masa Kerajaan Padjajaran. Akan tetapi dalam transisinya tidak terlalu signifikan, karena masih terdapat disebagian tempat yang masih mencirikan hadirnya Kerajaan Padjajaran. Kedudukan daratan Karawang sebelah utara sekitar pantai laut Jawa pada garis besarnya berpaya-paya, dengan ketinggian daratan di atas permukaan perairan kurang dari 100 meter, sehingga kondisi temperatur udara menjadi panas.

Jika di Karawang bagian utara udaranya terasa panas, keadaan di Karawang bagian selatan udaranya sejuk. Karena kondisi topografi di Karawang berbukit-bukit yang merupakan daratan pegunungan yang penuh dengan tumbuhan semak belukar dan kawasan hutan sebagai rumah bagi marga satwa, juga karena dengan adanya pegunungan yang dipenuhi tumbuhan. Begitulah ciri khas dari Kabupaten Karawang.²⁵⁰

²⁵⁰ R. H. Tjetjep Supriadi, *Sejarah Berdirinya Kabupaten Karawang: 10 Mulud Tahun Alip, 14 September Tahun 1633* (Bandung: Theme 76, 1994), 12.

2.2 Awal Mula Julukan Karawang Menjadi Kota Padi



Gambar 2: Karawang sebagai Kota Padi ditandai adanya Tugu Padi

Sumber: mauzafiq.com

Menurut Sollewijn Gelpke (1986), penduduk desa di pulau Jawa yang telah berdiam diri sejak lama dalam penanaman padi dan pengembangan tani mempunyai budaya tersendiri yang menjadikan pertanian berhasil dikembangkan. Dalam mengelola areal agraris, penduduk di Pulau Jawa mengikuti budaya “Pranata Mongso” (penentuan musim) dan adanya aktualisasi eksploitasi tanaman padi dengan memakai kalkulasi yang dilakukan secara turun temurun.²⁵¹

Aktivitas penanaman padi dan lada telah ada di Karawang sejak masa Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Yudakarti atas perintah Sultan Agung

²⁵¹ Mudiyono and Wasino, “Perkembangan Tanaman Pangan Di Indonesia Tahun 1945-1965,” 40.

Mataram. Kegiatan ini mengerahkan tenaga dua ribu atas berlangsungnya rencana dari Sultan Agung untuk membentuk Karawang sebagai pusat pertahanan dan pusat logistik dalam melawan tentara Banten dan para penjajah.

Dalam rencananya, Sultan Agung berhasil menjadikan Karawang sebagai gudang padi hingga saat ini. Dengan semakin dibukanya tanah agraria dan tatanan teknologi cocok tanam yang menjadikan para ahli melakukan penelitian, didukung dengan pengelolaan petani yang kompeten, maka Karawang mendapatkan predikat sebagai Kota Padi bukan untuk kebutuhan masyarakat Jawa Barat saja, melainkan untuk relevansi nasional berskala besar.

Perkembangan lada di Karawang sedikit mengecewakan, karena dalam pertumbuhannya sangat kurang memuaskan. Berdasarkan penjelasan dari para orang tua di Karawang, bahwa lada atau pedes hanya bisa berkembang di wilayah Karawang bagian utara. Karena dalam perkembangannya, lada tumbuh dengan kurang membahagiakan.

Suatu wilayah yang dimana lada atau pedes berkembang hingga saat ini disebut Kampung Pedes, tetapi Kampung Pedes di masa sekarang menjadi suatu kecamatan di Karawang yang bernama Kecamatan Pedes. Dari penamaan tersebut bisa

disimpulkan bahwa kata Pedes diambil dari tumbuhan lada di Karawang sebelah utara.²⁵²

Memang benar Karawang dilalui oleh Sungai Citarum, bahkan dahulu Sungai Citarum dijadikan sarana transportasi air. Karawang dilewati oleh Sungai Citarum yang mengalir dari bagian selatan ke bagian utara bermuara di Laut Jawa. Masyarakat Karawang Selatan apabila ingin memasarkan dagangannya dibawa dengan menggunakan perahu atau rakit sebagai kendaraan di air ke hilir.

Para penduduk Karawang Selatan membawa hasil panennya berupa hasil berkebun seperti bambu, kayu bahan bangunan, dan kayu bakar. Semua hasil panen tadi merupakan bahan utama yang diperlukan bagi penduduk Karawang Utara. Sedangkan dari utara, para penduduk Karawang Utara membeli kepentingan pokok seperti pangan padi yang merupakan hasil dari para petani masyarakat Karawang Utara.

Kali Ciparage yang terletak di sebelah utara tidak kalah signifikan sebagai sarana kendaran di air. Penduduk dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sering hadir ke wilayah Karawang. Melewati jalur laut, Jawa terus mengikuti jalur laut tersebut hingga masuk ke Kali Ciparage untuk membeli beras atau “Nempur” yang sampai sekarang terdapat tempat jual beli beras

²⁵² Supriadi, *Sejarah Berdirinya Kabupaten Karawang: 10 Mulud Tahun Alip, 14 September Tahun 1633*, 30.

yang disebut “Tempuran” atau Kecamatan Tempuran.²⁵³

Sebelum para penjajah berpijak, Kabupaten Karawang telah lama menjadi suatu daerah penghasil padi. Tanah agraria yang ditumbuhi padi tersebut memiliki tujuan yakni menjadikan sawah sebagai tadah hujan. Tidak lama kemudian para penjajah datang. Dengan adanya para penjajah ke Kabupaten Karawang, Bangunan-bangunan air didirikan sebagai sebuah rencana untuk kemajuan pertumbuhan tanaman padi dan menjadikan sawah memiliki fungsi lain untuk berjalannya kemakmuran.²⁵⁴

Adanya desakan tentang pembuatan padi bagi petani lewat kekuasaan atas pemakaian tanah sudah menjadi problematika sejak masa para penjajah. Interaksi tentang watak atas kekuasaan tanah dan tentang fundamen tanah agraris yang memiliki tanggungan oleh pajak, yang berawal sejak akhir abad ke-18 dan hingga awal abad ke-20 atas kepentingan para penjajah. Tumbuhan padi adalah budidaya alam yang dilahirkan oleh sebagian besar masyarakat, tetapi juga mayoritas masyarakat menanam tanaman-tanaman lain.²⁵⁵

²⁵³ Ibid., 12–13.

²⁵⁴ Naditira Widya, “Bangunan-Bangunan Air Masa Hindia Belanda Di Wilayah Karawang: Dalam Konteks Pertanian Padi,” *Libra Hari Inagurasi* 8, no. 1 (2014): 17.

²⁵⁵ Mudiyo and Wasino, “Perkembangan Tanaman Pangan Di Indonesia Tahun 1945-1965,” 41.

Selepas Indonesia mengalami kemerdekaan, dengan perjalanan panjang dan penuh perjuangan dari para pahlawan, sawah-sawah di Kabupaten Karawang yang merupakan tanah independen dibagikan kepada para petani sebagai hak kuasa atas pengelolaan sawah-sawah itu sendiri. Sedangkan tanah perseroan atau tanah yang tidak dikelola oleh para petani, diambil menjadi kepemilikan pemerintah dan dikelola oleh Kementerian Perhutanan.

Karena luas wilayah yang begitu besar, pihak pemerintah menciptakan daerah tanah agraria sebagai pembuat padi terbesar di Indonesia. Pemerintah memberikan atensi yang besar pada perkembangan padi di Kabupaten Karawang untuk swasembada pangan yang tercapai dengan memberikan suplemen terbaik berupa pemakaian pestisida, penerapan bibit unggul, dan mendirikan saluran irigasi.²⁵⁶

²⁵⁶ Nur Janti, "Lumbung Padi Yang Jadi Kawasan Industri," *Historia*, last modified 2019, <https://historia.id/ekonomi/articles/lumbung-padi-yang-jadi-kawasan-industri-PdIMk/page/1>.

2.3 Perkembangan Karawang Sebagai Kota Padi Tahun 2000-2019



Gambar 3: Hamparan sawah masih terbentang luas di Karawang

Sumber: liliyuliadi.com

Sejak dahulu, Kabupaten Karawang telah mengenal penanaman padi. Seiringnya zaman, Kabupaten Karawang masih bisa mempertahankan predikatnya sebagai Kota Padi. Walaupun banyak perubahan dalam tatanan pembangunan dan infrastruktur, tetapi dalam suplai padi terhadap negara masih tetap berlanjut dan konsisten. Hal ini menjadi misi untuk Kabupaten Karawang untuk harus tetap berkontribusi dalam pembangunan negara.

Awal tahun 2000-an atau masa reformasi dimulai, Kabupaten Karawang masih tetap hadir dalam partisipasi padi untuk berskala nasional. Bahkan pemerintah pusat telah lama mengetahui predikat Kota Padi atas kontribusinya terhadap negara selama ini. Oleh karena itu, pemerintah

memberikan perhatian lebih atas penanaman padi di Kabupaten Karawang.

Pemerintah memberikan fasilitas seperti penanaman bibit unggul dalam kegiatan bertani untuk menjadikan hasil panen yang berkualitas. Terbukti, hingga tahun 2010-an masih tetap ada partisipasi dalam memberikan pangan terhadap negara. Suplai beras masih terus berlangsung seiringnya dengan perkembangan zaman seperti pembangunan di Kabupaten Karawang, karena pemerintah ingin menjaga penanaman padi agar tetap konsisten untuk tetap berkontribusi terhadap negara.²⁵⁷

Kabupaten Karawang mempunyai luas daerah 175.327 Ha. Pemakaian tanah di Kabupaten Karawang mayoritas terdiri dari tanah agraria dengan luas hingga 97.529 Ha (55,63%), yang keseluruhannya telah dibantu oleh program irigasi. Sebab itu lumbung padi Jawa Barat menjadi julukan bagi Kabupaten Karawang. Lahan disini terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, area atau kawasan industri, ladang gabungan, hunian, sawah, dan semak belukar.²⁵⁸

Salah satu wilayah yang berpartisipasi untuk memenuhi kepentingan pangan beras nasional dalam

²⁵⁷ Wawancara dengan bapak Ir. Kadarisman selaku Kabid Dinas Pangan Kabupaten Karawang, pada tanggal 30 November 2020, pukul 13:26 WIB

²⁵⁸ Chofyan and dkk, "Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional," 26.

masing-masing tahunnya rata-rata memberikan ± 784.000 ton adalah Kabupaten Karawang yang merupakan daerah lumbung padi Jawa Barat. Sebagai wilayah tanah agraria, Kabupaten Karawang memiliki kedudukan sebagai Kota padi. Ambisi pemerintah yakni untuk bisa profit beras 10 juta ton dan Kabupaten Karawang diwajibkan profit GKG 1,5 juta ton/tahun untuk bisa melangsungkan ambisi profit 10 juta ton serta melancarkan swasembada pangan nasional.²⁵⁹

Kepentingan tanah agraria ini memiliki arti bahwa Kabupaten Karawang mesti profit gabah sebesar 1,5 juta ton. Luas tanah agraria yang terdata sekarang 93.800 hektar, dengan daya produksi 7,25 ton/ha. Besar tanah agraria seluas 93.800 hektar dapat mewujudkan kepentingan pangan masyarakat Kabupaten Karawang. Namun jika harus profit 1,5 juta ton, maka tanah agraria yang hadir pada saat ini harus segera ditambah.

Jika tanah agraria beralih fungsi lain, maka penanaman padi harus lebih dikembangkan lagi. Sebab itu, tanah agraria saat ini harus dijaga, agar profit gabah 1,5 juta ton tetap terlaksana. Disisi lain, untuk ketekunan penanaman padi dan kapasitas lahan bisa meningkat, maka harus dibantu oleh pembangunan irigasi yang layak.²⁶⁰

²⁵⁹ Ibid., 45.

²⁶⁰ Ibid., 54–55.

Dalam pertumbuhan tanah di Kabupaten Karawang yang semakin sempit, harus penuh estimasi dalam menyusun rencana untuk mempertahankan tanah agraria. Pemeliharaan terhadap tanah agraria adalah suatu keharusan, karena beras menjadi komoditas penting karena sangat berperan dalam kebutuhan hidup masyarakat. Walau konversi tetap berlanjut, perlindungan harus ada untuk memperlambat laju fungsi tanah agraria.

Di daerah perkotaan akan memiliki dampak signifikan terhadap Karawang dan sekelilingnya. Daerah perkotaan ini seluruhnya akan menjadi pembangunan modern yang berdampak pada luas tanah agraria yang terus merosot. Wilayah potensial yang akan menanggung persyaratan eskalasi sawah ada 9 Kecamatan yang harus dilestarikan dan dipelihara demi tanah agraria di Kabupaten Karawang tetap terjaga.²⁶¹

Seiringnya waktu, tanah agraria akan merosot dan berdampak pada produktivitas padi yang sedikit. Faktanya kepentingan pangan penduduk telah memadai, namun karena predikat Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi nasional dan harus berkontribusi dalam profit gabah sebanyak 1,5 juta ton, maka predikat sebagai Kota Padi menjadi darurat.

²⁶¹ Ibid., 58.

Untuk tetap berlangsungnya kebutuhan pangan tercukupi dan pembangunan yang konsisten, harus lebih bisa beradaptasi pada rencana otonom pangan, ketahanan pangan, dan swasembada pangan. Dalam UU Pangan 2012, selain tetap menjadi dasar dalam melangsungkan swasembada pangan, juga menjadi landasan untuk kedaulatan pangan yang lebih sejahtera.

Kedaulatan pangan adalah hak sebuah bangsa dalam menentukan prosedur pangan yang membuat hak atas pangan bagi masyarakat lebih sejahtera (konsumen) dan hak petani yang tercukupi (produsen) untuk potensi sumber daya lokal yang sesuai dengan sistem pangan. Karena keduanya penting demi menjaga alur kebahagiaan.

Pada tahun 2013 ini pemerintah lebih bekerja keras lagi. Langkah-langkah yang harus diperbuat untuk menangkal kejadian fungsi lain tanah agraria tersebut dengan cara melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian sawah-sawah yang ditumbuhi padi dan melaksanakan sistem perbatasan antara daerah pembangunan dengan wilayah tanah agraria yang ada di Kabupaten Karawang. Bila semua telah tercapai, walau tidak terlalu sempurna, namun bisa mengurangi kecemasan.²⁶²

Suatu wilayah yang terletak di Jawa Barat dan salah satu wilayah yang memiliki predikat sebagai

²⁶² Ibid., 61–63.

Kota Padi adalah Kabupaten Karawang. Disaat musim sedang mengalami masa sulit, Kabupaten Karawang masih tetap hadir dalam penyediaan padi yang siap dipanen. Seperti di Kedung Asem, desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, para kaum petani melaksanakan panen padi pada tanah basah agraria selebar 300 ha yang ditata oleh poktan Mekarsari 112 anggota, poktan Tani Harapan dengan anggota 104 orang, dan Permata Tani 98 anggota.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa pada 2017 luas panen di Karawang 160.983 hektar, dengan pengelolaan mencapai 6,89 ton per hektar, sehingga seluruh kapasitas memperoleh 1.1 juta ton. Dengan jumlah masyarakat Kabupaten Karawang hingga 2,3 juta jiwa, kepentingan pangan hingga 187.000 ton/tahun, dan melakukan suplai 508.215 ton.

Karena Pemerintah sungguh-sungguh dalam mengamati terhadap perkembangan padi, dan peningkatan kinerja yang pesat, produktivitas padi di Kabupaten Karawang masih terjamin. Seperti partisipasi dalam masa sulit, pemerintah telah memberikan dukungan yang baik terhadap para petani. Berupa penanaman bibit unggul, traktor, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pompa air, dan lainnya.

Keseluruhan panen padi 2017 ini dengan lahan 1,1 juta hektar berhasil tercapai hingga 6 juta ton GKG atau 3 juta ton beras. Perkembangan ini

mampu mewujudkan kepentingan pangan dalam konsumsi beras nasional 2,6 juta ton dan dapat memenuhi suplai 0,4 juta ton. Dalam “Program Upsus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman” memberikan solusi terhadap perkembangan pesat tumbuhnya padi di musim kemarau hingga bisa naik dua kali lipat.

Peningkatannya, telah menanggulangi rehabilitasi jaringan irigasi tersier 3,4 juta hektar atau 113%, pembangunan 2.278 unit embung/dam parit/long storage, ekspansi dan pertimbangan lahan 1,08 juta hektar, perluasan wilayah rawa 367 ribu hektar, dan adanya prosedur dengan dukungan berupa traktor, pompa, rice transplanter, combine harvester 284.436 unit naik 2.175 persen dari tahun 2014. Lalu, dukungan berupa benih 12,1 juta hektar, pupuk bersubsidi 27,64 juta ton serta jaminan dalam pengelolaan para petani padi 1,2 juta hektar.²⁶³

²⁶³ Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, “Panen Padi Di Kabupaten Karawang Melimpah Di Saat Biasanya Paceklik,” last modified 2017, <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/panen-padi-di-kabupaten-karawang-melimpah-di-saat-biasanya-paceklik> .



Gambar 4: Potret para petani yang sedang melangsungkan penanaman padi

Sumber: republika.co.id

Para petani yang menanam padi dalam kehidupannya selalu bergantung pada alam dengan penuh belas kasihan. Dari sebagian besar metode yang ada, petani yang cerdas dapat menentukan kesempatan kegagalan menjadi kecil. Namun karena kedudukannya di permukaan bumi sangatlah kecil, sebaik apapun metode yang dipakai tetap rawan.

Setelah memahami langkah-langkah metode yang paling cermat sekalipun, kaum petani harus tetap bersiteguh dalam melewati periode kurang menyenangkan seperti kebutuhan pokok yang tidak mencukupi kehidupannya. Untuk bisa hidup dengan tercukupi, sebagian mereka melakukan pekerjaan lain agar hidup lebih sejahtera. Jika masalah masih terus berlanjut, akan lahir alternatif subsistensi yang

digolongkan sebagai “swadaya” mencakup sebuah pekerjaan seperti buruh lepas.²⁶⁴

Walaupun ada beberapa hal yang tidak menguntungkan, tetapi dalam ekonomi subsistensi petani kecil, kaum petani memahami bahwa jika hasil panen tercukupi maka kebutuhan hidup bisa dikatakan meyakinkan. Namun jika hasil panen dipasarkan atau untuk kepentingan pembayaran bunga, pajak, dan sewa, maka pertanggung jawaban menyenangkan itu tidak terjadi.²⁶⁵

Pada masa sekarang ini, atau lebih tepatnya tahun 2018-2019, Kabupaten Karawang masih bisa dipercaya atas perdikatnya sebagai Kota Padi. Suplai pangan masih tetap berlangsung terhadap negara walaupun sekarang banyak lahan yang sudah menjadi perkotaan atau didirikan dengan pembangunan yang begitu pesat dan maju.

Banyak yang mengatakan bahwa sekarang Kabupaten Karawang memiliki wajah baru yakni kawasan industri yang membuat lahan pertanian Karawang semakin berkurang. Namun menurut data yang ada sawah-sawah yang ada masih terbilang banyak dan masih tetap terpelihara akan kelestariannya. Oleh karena itu suplai pangan masih tetap berlanjut.

²⁶⁴ James c. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergalakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara* (Depok: Pustaka LP3ES, 2019), 41–42.

²⁶⁵ *Ibid.*, 94.

Tanah agraria ini terbagi menjadi dua kepemilikan. Pertama milik petani itu sendiri, para petani bebas untuk melakukan apa saja dalam pengelolaan lahannya sendiri. Yang kedua milik pemerintah. Ketika Indonesia mengalami kemerdekaan, banyak lahan dari penajajah yang tidak memiliki kepunyaan atau tidak ada kepemilikan. Sehingga pemerintah mengambil lahan tersebut untuk kebutuhan pembangunan.

Seperti contoh pembangunan yang ada di Kabupaten Karawang yaitu Jalan Baru. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah menggunakan lahan milik pemerintah itu sendiri. Sebenarnya pembatasan antara kawasan industri dan tanah agraria itu benar adanya, kawasan industri berdiri tanpa mengurangi tanah agraria yang ada. Kawasan industri berdiri di lahan milik pemerintah, sedangkan tanah agraria masih ada dan dikelola oleh para petani itu masing-masing.

Jika kita jalan-jalan sebentar, daerah Karawang Timur dan Karawang Utara masih banyak tanah agraria yang tersedia. Disana pelestarian lahan masih tetap hadir dalam pengelolaan petani-petani tersebut, sehingga dalam kontribusi pangan terhadap negara, Kabupaten Karawang masih tetap konsisten.

Maka dalam predikat Kota Padi tersebut masih pantas disandang oleh Kabupaten Karawang.²⁶⁶

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa padi merupakan salah satu makanan pangan yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan. Khususnya di Indonesia, mayoritas penduduknya membutuhkan beras sebagai kebutuhan utama. Maka dari itu pemerintah benar-benar serius dalam penanganan padi agar mayoritas penduduknya sejahtera.

Karawang hadir sebagai salah satu pemasok padi terbesar terhadap negara. Dengan tanah agraria yang memadai dan sarana yang begitu menjanjikan, Karawang mampu memberikan kebutuhan pokok yang diinginkan oleh mayoritas penduduk Indonesia, yaitu beras. Pemerintah tidak tanggung-tanggung dalam menangani permasalahan padi di

²⁶⁶ Wawancara dengan ibu Rr. Oetami Noviana Raksanagara, M. Pd. selaku Kabid Dinas Kearsipan Kabupaten Karawang, pada tanggal 23 November 2020, pukul 13:54 WIB

Karawang. Terbukti, hingga saat ini Karawang masih konsisten dalam suplai beras terhadap negara.

3.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penulisan di atas banyak sekali kekeliruan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan komentar dan masukan atas penulisan yang telah disusun oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. "Panen Padi Di Kabupaten Karawang Melimpah Di Saat Biasanya Paceklik." Last modified 2017.
<http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/panen-padi-di-kabupaten-karawang-melimpah-di-saat-biasanya-paceklik> .

Chofyan, Ivan, and dkk. "Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional." *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Uinversitas Islam Bandung* (2015).

Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang. *Sejarah Singkat: Peringatan Hari Jadi Karawang Ke-386, 14 September 1633-14 September 2019*. Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang, 2019.

Huda, Fatkhan Amirul. "Pengertian Dan Definisi Kajian Pustaka." *Fatkhan.Web.Id*. Last modified 2017.
<http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/>.

Iryana, Wahyu. *Historiografi Umum*. Bandung: Yrama Widya, 2019.

Janti, Nur. "Lumbung Padi Yang Jadi Kawasan Industri." *Historia*. Last modified 2019.
<https://historia.id/ekonomi/articles/lumbung-padi-yang-jadi-kawasan-industri-PdlMk/page/1>.

Killis, Richardson. "Bagaimana Sejarah Padi Di Indonesia? Benarkah Karena Pengaruh Bangsa Jepang?" *Quora*. Last modified 2018. <https://id.quora.com/Bagaimana-sejarah->

padi-di-Indonesia-Benarkah-karena-pengaruh-bangsa-Jepang.

Koran Sindo. "Mempertahankan Karawang Sebagai Kota Lumbung Padi." *Sindonews.Com*. Last modified 2015. <https://nasional.sindonews.com/berita/986576/149/mempertahankan-karawang-sebagai-kota-lumbung-padi?showpage=all>.

Majdid, M. Dien, and Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Mudiyono, and Wasino. "Perkembangan Tanaman Pangan Di Indonesia Tahun 1945-1965." *Journal of Indonesia History* 4, no. 1 (2015).

Pencerah Nusantara. "Kabupaten Karawang." Last modified 2015. <https://pencerahnusantara.org/kabupaten-karawang/>.

Petani Indo Modern. "Pengertian Tanaman Padi." *Petani Indo Modern*. Last modified 2016. <https://petaniindomodern.wordpress.com/2016/02/10/pengertian-tanaman-padi-3/> .

Scott, James c. *Moral Ekonomi Petani: Pergalakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Depok: Pustaka LP3ES, 2019.

Sjamsudin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2016.

Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Supriadi, R. H. Tjetjep. *Sejarah Berdirinya Kabupaten Karawang: 10 Mulud Tahun Alip, 14 September Tahun 1633*. Bandung: Theme 76, 1994.

Widya, Naditira. "Bangunan-Bangunan Air Masa Hindia Belanda Di Wilayah Karawang: Dalam Konteks Pertanian Padi." *Libra Hari Inagurasi* 8, no. 1 (2014).

Asep Sulaeman
Muhammad Fikri Arsyad
Muhammad Yusuf Kurniawan
Muhammad Fikri Hidayat
Muhammad Kautsar Thariq S.
Nabilla Ilmidini
Nadila Aulia Nurfauzah



Program Studi
Sejarah Peradaban Islam
UIN Sunan Gunung Djati



pusbangter

ISBN 978-623-6004-20-3



9 786236 004203



<http://ski.uinsgd.ac.id>



@spi_uinbandung



@spiuinsgd